

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
C. Maksud dan Tujuan.....	I-6
D. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
A. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-1
a. Posisi Astronomis.....	II-1
b. Posisi Geografis	II-1
3. Topografi.....	II-1
a. Kemiringan Lahan.....	II-1
b. Ketinggian Lahan	II-2
4. Geologi.....	II-2
a. Struktur dan Karakteristik	II-2
b. Potensi Kandungan.....	II-3
5. Demografi	II-3
a. Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan	II-3
b. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-4
c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kewarganegaraan, Agama	II-4
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-6
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-6
2. Pertumbuhan Sektor PDRB	II-7
3. PDRB Perkapita	II-10
4. Indeks Gini	II-12
5. Laju Inflasi.....	II-13
6. Indeks Pembangunan Manusi.....	II-14
a. Angka Harapan Hidup	II-16
b. Angka harapan lama sekolah.....	II-17
c. Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan	II-17
7. Angka Kemiskinan	II-18
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-22
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	II-24
C. Aspek Daya Saing Daerah	II-25
1. Nilai Tukar Petani	II-25
2. Desa Berstatus Swasembada	II-27
3. Rasio Ketergantungan.....	II-28
D. Aspek Pelayanan Umum	II-28
1. Layanan Umum Urusan Wajib Dasar.....	II-28
a. Pendidikan.....	II-29
1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-29
2) Angka Partisipasi Murni (APM)	II-29
3) Angka Putus Sekolah (APtS)	II-30
4) Angka Kelulusan Sekolah (AL).....	II-30
5) Angka Melanjutkan (AM)	II-30

6)	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD dan Pendidikan Dasar	II-31
7)	Rasio guru/murid sekolah PAUD dan pendidikan dasar	II-32
8)	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	II-33
9)	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-34
b.	Kesehatan.....	II-34
1)	Angka Kematian Ibu.....	II-34
2)	Angka Kematian Bayi	II-35
3)	Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-35
4)	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	II-36
5)	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup.	II-37
6)	Rasio posyandu per satuan balita	II-37
7)	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.....	II-38
8)	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	II-38
9)	Rasio dokter per satuan penduduk	II-39
10)	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	II-39
11)	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.....	II-40
12)	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	II-41
13)	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	II-41
14)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	II-42
15)	Cakupan kunjungan bayi.....	II-42
16)	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	II-43
17)	Cakupan pelayanan nifas	II-43
c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-44
1)	Jalan kondisi baik.....	II-44
2)	Jembatan kondisi baik	II-45
3)	Rasio jaringan irigasi.....	II-45
d.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-46
1)	Persentase rumah tinggal bersanitasi dan air minum layak	II-46
2)	Persentase areal kawasan kumuh	II-47
3)	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.....	II-47
e.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-48
1)	Angka Kriminalitas	II-48
2)	Cakupan petugas linmas	II-48
3)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).....	II-49
4)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten ..	II-49
f.	Sosial.....	II-50
1)	Rumah Tidak Layak Huni.....	II-50
2)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial ...	II-51
2.	Layanan Umum Urusan Wajib Non Dasar	II-51
a.	Tenaga Kerja	II-51
1)	Rasio Penduduk yang Bekerja.....	II-51
2)	Persentase kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-53
3)	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan	II-53
4)	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS.....	II-54
5)	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.....	II-54

6)	Persentase tenaga kerja yang dilatih berdasarkan basis pelatihan.....	II-54
7)	Rasio lulusan S1/S2/S3.....	II-55
b.	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	II-55
1)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	II-55
2)	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD ..	II-56
3)	Partisipasi perempuan di lembaga swasta.....	II-56
4)	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	II-57
5)	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.....	II-58
6)	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-58
7)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu....	II-58
8)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	II-59
9)	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.....	II-59
10)	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.....	II-59
11)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.....	II-60
12)	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.....	II-60
13)	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.....	II-61
c.	Pangan	II-62
1)	Skor Pola Pangan Harapan	II-62
2)	Ketersediaan energi dan protein perkapita.....	II-62
3)	Data Konsumsi dan Ketersediaan Energi.....	II-63
4)	Produktivitas Ternak	II-64
d.	Pertanahan.....	II-65
1)	Persentase luas lahan bersertifikat	II-65
e.	Lingkungan Hidup.....	II-66
1)	Timbunan sampah yang ditangani.....	II-66
2)	Persentase sampah yang berkurang melalui 3 R (bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll).....	II-66
3)	Persentase cakupan area pelayanan	II-66
4)	Persentase jumlah sampah yang tertangani.....	II-67
5)	Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	II-67
f.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	II-67
1)	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk.....	II-67
2)	Persentase bayi berakte kelahiran	II-68
3)	Persentase pasangan berakte nikah.....	II-68
4)	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk....	II-68
5)	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran.....	II-69
g.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	II-69
1)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	II-69
2)	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	II-70
3)	Persentase LSM aktif	II-70
4)	Persentase LPM Berprestasi.....	II-70
5)	Persentase PKK aktif.....	II-71

6) Jumlah Posyandu.....	II-71
h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II-72
1) Total Fertility Rate (TFR)	II-72
2) Rasio Akseptor KB	II-72
3) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	II-72
4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need) .	II-73
i. Perhubungan.....	II-73
1) Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal	II-73
j. Komunikasi dan Informatika	II-73
1) Desa Terhubung Internet.....	II-73
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-74
1) Jumlah BPR/LKM	II-74
l. Penanaman Modal	II-74
1) Laju Investasi	II-74
2) Penyelesaian izin lokasi	II-75
m. Kepemudaan dan Olahraga	II-76
1) Besaran Prestasi Olahraga.....	II-76
2) Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	II-76
n. Statistik.....	II-76
o. Persandian	II-77
p. Kebudayaan	II-77
1) Cakupan Fasilitasi Cagar Budaya.....	II-77
2) Cakupan Promosi Cagar Budaya	II-77
q. Perpustakaan	II-78
1) Jumlah pengunjung dan jumlah peminjam buku perpustakaan	II-78
r. Kearsipan.....	II-78
1) Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku	II-78
3. Layanan Umum Urusan Pilihan.....	II-78
a. Kelautan dan Perikanan	II-78
1) Produksi Perikanan	II-78
b. Pariwisata.....	II-79
1) Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan	II-79
c. Pertanian.....	II-79
1) Produktifitas Tanaman Pangan.....	II-79
2) Produktifitas Tanaman Perkebunan.....	II-80
3) Populasi dan Produksi Ternak	II-81
d. Kehutanan	II-82
e. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-83
1) Jumlah SPBU dan SPBE.....	II-83
f. Perdagangan.....	II-84
1) Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan	II-84
g. Perindustrian	II-84
1) Kondisi Industri Mikro/Kecil, Menengah dan Besar	II-84
2) Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja	II-85
h. Transmigrasi	II-88
1) Jumlah Transmigran	II-88
2) Jumlah Transmigran yang diberangkatkan terhadap Animo Transmigrasi.....	II-88
E. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-90
a. Pendidikan.....	II-90
b. Pemuda dan Olahraga.....	II-90
c. Kesehatan	II-98
d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-105
e. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-107

f.	Pertanahan	II-108
g.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-109
h.	Sosial	II-111
i.	Ketenagakerjaan	II-113
j.	Transmigrasi.....	II-114
k.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-115
l.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-117
m.	Pangan.....	II-119
n.	Pertanian	II-121
o.	Lingkungan Hidup	II-124
p.	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-126
q.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-127
r.	Perhubungan	II-128
s.	Komunikasi dan Informatika.....	II-129
t.	Statistik	II-131
u.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-131
v.	Perdagangan	II-132
w.	Perindustrian	II-134
x.	Penanaman Modal	II-134
y.	Kebudayaan.....	II-136
z.	Pariwisata	II-138
aa.	Perpustakaan.....	II-139
bb.	Kearsipan	II-140
cc.	Perikanan	II-140
dd.	Pertanian sub Urusan Peternakan	II-142
ee.	Perencanaan Pembangunan.....	II-143
ff.	Penelitian dan Pengembangan	II-145
gg.	Kuangan	II-145
hh.	Kepegawaian.....	II-147
ii.	Fungsi Lainnya	II-148
F.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis	II-158
a.	Permasalahan Pembangunan.....	II-158
1.	Kelompok Pembangunan Manusia	II-158
2.	Kelompok Ekonomi	II-165
3.	Kelompok Infrastruktur	II-173
4.	Kelompok Pemerintahan.....	II-177
b.	Isu Strategis.....	II-179
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
A.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
1.	Pertumbuhan Ekonomi	III-2
2.	Produk Domestik Regional Bruto.....	III-3
3.	PDRB Perkapita.....	III-4
4.	Inflasi	III-6
B.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	III-8
2.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.....	III-12
3.	Realisasi Belanja Daerah	III-13
4.	Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah	III-16
5.	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah	III-16
6.	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-17
7.	Realisasi Pembiayaan Daerah	III-17
8.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
1. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pembangunan Manusia..	IV-9
2. Tujuan dan Sasaran Kelompok Ekonomi.....	IV-9
3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pemerintahan.....	IV-10
4.2 Prioritas Pembangunan	IV-10
1. Kelompok Pembangunan Manusia.....	IV-10
2. Kelompok Ekonomi.....	IV-11
3. Kelompok Pemerintahan.....	IV-11
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan.....	IV-20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Kerja Daerah.....	V-1
5.2 Inovasi Daerah	V-57
5.3 Pendanaan Daerah	V-57
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	II-1
Tabel 2.2.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	II-2
Tabel 2.3.	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di tiap kecamatan Tahun 2017	II-3
Tabel 2.4.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018	II-4
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2017	II-5
Tabel 2.6.	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2018	II-6
Tabel 2.7.	Nilai PDRB Tahun 2013 – 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung	II-7
Tabel 2.8.	Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010.....	II-8
Tabel 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-9
Tabel 2.10.	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017....	II-10
Tabel 2.11.	Target dan Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-11
Tabel 2.12.	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017....	II-11
Tabel 2.13	Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2013-2019.....	II-12
Tabel 2.14	Rasio Perubahan Gini Rasio dengan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017.....	II-13
Tabel 2.15.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017.....	II-14
Tabel 2.16.	IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2013 – 2017	II-15
Tabel 2.17.	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-15
Tabel 2.18	Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung dan IPM Nasional Tahun 2017	II-15
Tabel 2.19.	Rasio Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017	II-19
Tabel 2.20.	Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017	II-20
Tabel 2.21.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017.....	II-21
Tabel 2.22.	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.23.	Target, Realisasi, Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017.....	II-23
Tabel 2.24.	Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.25.	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.26.	Status Desa di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.....	II-27
Tabel 2.27.	Rasio Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.28.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.29.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-29

Tabel 2.30.	Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.31.	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.32.	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-31
Tabel 2.33.	Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-31
Tabel 2.34.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.35.	Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.36.	Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S1/D-IV, S2 atau lebih Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.37.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.38.	Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.39.	Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.40.	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.41.	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.42.	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016	II-37
Tabel 2.43.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung, 2015-2017	II-38
Tabel 2.44.	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017	II-38
Tabel 2.45.	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017	II-39
Tabel 2.46.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.47.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.48.	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.49.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-42
Tabel 2.50.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017.....	II-42
Tabel 2.51.	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.52.	Cakupan Ibu Hamil K4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.53.	Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.54.	Jalan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.55.	Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017	II-45
Tabel 2.56.	Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik	II-46
Tabel 2.57.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.58.	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.59.	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-47

Tabel 2.60.	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2017	II-48
Tabel 2.61.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.62.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.63.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.64.	Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017	II-50
Tabel 2.65.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-51
Tabel 2.66.	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017	II-52
Tabel 2.67.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2017	II-55
Tabel 2.68.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.69.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.70.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-62
Tabel 2.71.	Tingkat Konsumsi Energi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.72.	Produktivitas Ternak Tahun 2014-2017	II-64
Tabel 2.73.	Jumlah Lahan Bersertifikat Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 - 2017	II-65
Tabel 2.74.	Timbunan sampah yang ditangani di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.75.	Sampah yang tertangani melalui TPS3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.76.	Cakupan area pelayanan di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.77.	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.78.	Sampah Terangkut dan Timbulan Sampah di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.79.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.80.	Persentase bayi berakte kelahiran Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.81.	Persentase pasangan berakte nikah Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.82.	Penerbitan KTP Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.83.	Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.84.	Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.85.	LPM Berprestasi Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017...	II-71
Tabel 2.86.	PKK Aktif Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.87.	Jumlah Posyandu Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.88.	Angkat TFR Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017.....	II-72
Tabel 2.89.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.90.	Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.91.	PUS yang istrinya dibawah 20 tahun dan yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>) Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-73
Tabel 2.92.	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal tahun 2016-2017 .	II-73
Tabel 2.93.	Desa Terhubung Internet Tahun 2015-2017	II-74

Tabel 2.94.	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.95.	Laju Investasi 2014-2017	II-75
Tabel 2.96.	Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.97.	Jumlah Perolehan Medali Ajang Olahraga Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.98.	Jumlah Prestasi Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.99.	Cakupan Fasiilitasi Cagar Budaya Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.100.	Cakupan Fasiilitasi Cagar Budaya Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.101.	Jumlah Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.102.	Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.103.	Perkembangan Sektor Perikanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.104.	Perkembangan Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.105.	Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.106.	Produktifitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.107.	Produktifitas Ternak Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.108.	Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.109.	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.110.	Nama dan Alamat SPBU – SPBE Kabupaten Temanggung, Tahun 2017	II-83
Tabel 2.111.	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016	II-84
Tabel 2.112.	Perkembangan Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.113.	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung, Tahun 2016	II-85
Tabel 2.114.	Jumlah Transmigran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.115.	Jumlah Transmigran dan Animo Transmigrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.116.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pendidikan Sampai Tahun 2017.....	II-90
Tabel 2.117.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pemuda dan Olahraga sampai Tahun 2017.....	II-97
Tabel 2.118.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kesehatan Sampai Tahun 2017	II-98
Tabel 2.119.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kesehatan yang diimplementasikan RSUDSampai Tahun 2017... ..	II-104
Tabel 2.120.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai Tahun 2017 ..	II-105
Tabel 2.121.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Sampai Tahun 2017..	II-107
Tabel 2.122.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Pertanahan Sampai Tahun 2017.....	II-109
Tabel 2.123.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sampai Tahun 2017	II-110
Tabel 2.124.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	

Sosial Sampai Tahun 2017	II-111
Tabel 2.125. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Ketenagakerjaan Sampai Tahun 2017	II-113
Tabel 2.126. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Transmigrasi Sampai Tahun 2017	II-114
Tabel 2.127. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai Tahun 2017.....	II-115
Tabel 2.128. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sampai Tahun 2017.....	II-118
Tabel 2.129. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pangan Sampai Tahun 2017	II-120
Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pertanian Sampai Tahun 2017.....	II-121
Tabel 2.131. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup Sampai Tahun 2017.....	II-124
Tabel 2.132. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017	II-126
Tabel 2.133. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sampai Tahun 2017.....	II-127
Tabel 2.134. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perhubungan Sampai Tahun 2017.....	II-128
Tabel 2.135. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Komunikasi Dan Informatika Sampai Tahun 2017.....	II-129
Tabel 2.136. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Statistik Sampai Tahun 2017.....	II-131
Tabel 2.137. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Koperasi Dan UKM Sampai Tahun 2017	II-131
Tabel 2.138. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perdagangan Sampai Tahun 2017.....	II-133
Tabel 2.139. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perindustrian Sampai Tahun 2017	II-134
Tabel 2.140. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Penanaman Modal Sampai Tahun 2017	II-135
Tabel 2.141. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kebudayaan Sampai Tahun 2017	II-137
Tabel 2.142. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pariwisata Sampai Tahun 2017.....	II-138
Tabel 2.143. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perpustakaan Sampai Tahun 2017	II-139
Tabel 2.144. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kearsipan Sampai Tahun 2017	II-140
Tabel 2.145. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perikanan Sampai Tahun 2017.....	II-141
Tabel 2.146. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pertanian Sub Urusan Peternakan Sampai Tahun 2017	II-142
Tabel 2.147. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Sampai Tahun 2017	II-143
Tabel 2.148. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sampai Tahun 2017	II-145
Tabel 2.149. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah Sampai Tahun 2017.....	II-146
Tabel 2.150. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Sampai Tahun 2017.....	II-147
Tabel 2.151. Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Inspektorat Pembangunan Sampai Tahun 2017	II-149
Tabel 2.152. Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah Sampai Tahun 2017.....	II-149
Tabel 2.153. Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Sekretariat Dewan	

Perwakilan Rakyat Daerah Sampai Tahun 2017	II-154
Tabel 2.154. Capaian Kinerja Fungsi Lainnya BPBD Sampai Tahun 2017.....	II-155
Tabel 2.155. Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Kantor Kesatuan Bangsa Sampai Tahun 2017.....	II-156
Tabel 2.156. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pendidikan.....	II-158
Tabel 2.157. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Kesehatan	II-161
Tabel 2.158. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perpustakaan.....	II-163
Tabel 2.159. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Sosial	II-163
Tabel 2.160. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-164
Tabel 2.161. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-165
Tabel 2.162. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Tenaga Kerja	II-166
Tabel 2.163. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Koperasi dan UKM	II-167
Tabel 2.164. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perdagangan	II-168
Tabel 2.165. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Penanaman Modal.....	II-169
Tabel 2.166. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pariwisata	II-170
Tabel 2.167. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pertanian	II-171
Tabel 2.168. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pertanian dan Peternakan.....	II-172
Tabel 2.169. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perikanan.....	II-172
Tabel 2.170. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-173
Tabel 2.171. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perumahan dan Pemukiman	II-174
Tabel 2.172. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pertanahan	II-174
Tabel 2.173. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perhubungan	II-175
Tabel 2.174. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-175
Tabel 2.175. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup	II-176
Tabel 2.176. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Sosial Kebencanaan	II-176
Tabel 2.177. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Kelompok Pemerintahan.....	II-177
Tabel 3.1. Indikator Pembangunan Tahun 2019.....	III-1
Tabel 3.2. Prediksi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2019	III-2
Tabel 3.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019 (persen)	III-3
Tabel 3.4. PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya Tahun 2013-2017	III-5
Tabel 3.5. Perkiraan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional, 2018-2019.....	III-7
Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun	

	2013–2017.....	III-10
Tabel 3.7.	Persentase Pendapatan Asli terhadap Total Pendapatan Daerah	III-13
Tabel 3.8.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2017.....	III-15
Tabel 3.9.	Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah	III-16
Tabel 3.10.	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah	III-16
Tabel 3.11.	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah.....	III-17
Tabel 3.12.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2017	III-19
Tabel 3.13.	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2017	III-20
Tabel 4.1.	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan Prioritas Nasional RKP 2019.....	IV-14
Tabel 5.1	Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019	V-2
Tabel 5.2.	Keterkaitan Program Prioritas dan Pagu Anggaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Program Prioritas Nasional RKP 2019	V-52
Tabel 5.3.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2019	V-58
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Penyusunan RKPD Tahun 2019.....	I-3
Gambar 2.1. Peta Tematik Rata-rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017.....	II-17
Gambar 2.2. Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	II-20
Gambar 2.3. Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	II-21
Gambar 2.4. Peta Komposit Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017	II-64
Gambar 4.1. Komponen Penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	IV-1
Gambar 4.2. Prioritas Nasional RKP 2019.....	IV-13
Gambar 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2019.....	IV-20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-18
Grafik 2.2.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-22
Grafik 2.3.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-53
Grafik 2.4	Persentase pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-54
Grafik 2.5.	Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017.....	II-54
Grafik 2.6.	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Berdasarkan Basis Pelatihan di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017.....	II-55
Grafik 2.7.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-56
Grafik 2.8.	Persentase perempuan di lembaga swastadi Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-57
Grafik 2.9.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur ..di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-58
Grafik 2.10.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-58
Grafik 2.11.	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-59
Grafik 2.12.	Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-60
Grafik 2.13.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-60
Grafik 2.14.	Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban Kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017.....	II-61
Grafik 2.15.	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2016	II-63
Grafik 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-2
Grafik 3.2.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2017	III-4
Grafik 3.3.	PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017..	III-6
Grafik 3.4.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2019. Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahun transisi, karena di luar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, yang disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 memuat rancangan isu strategis, kerangka ekonomi daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2019 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

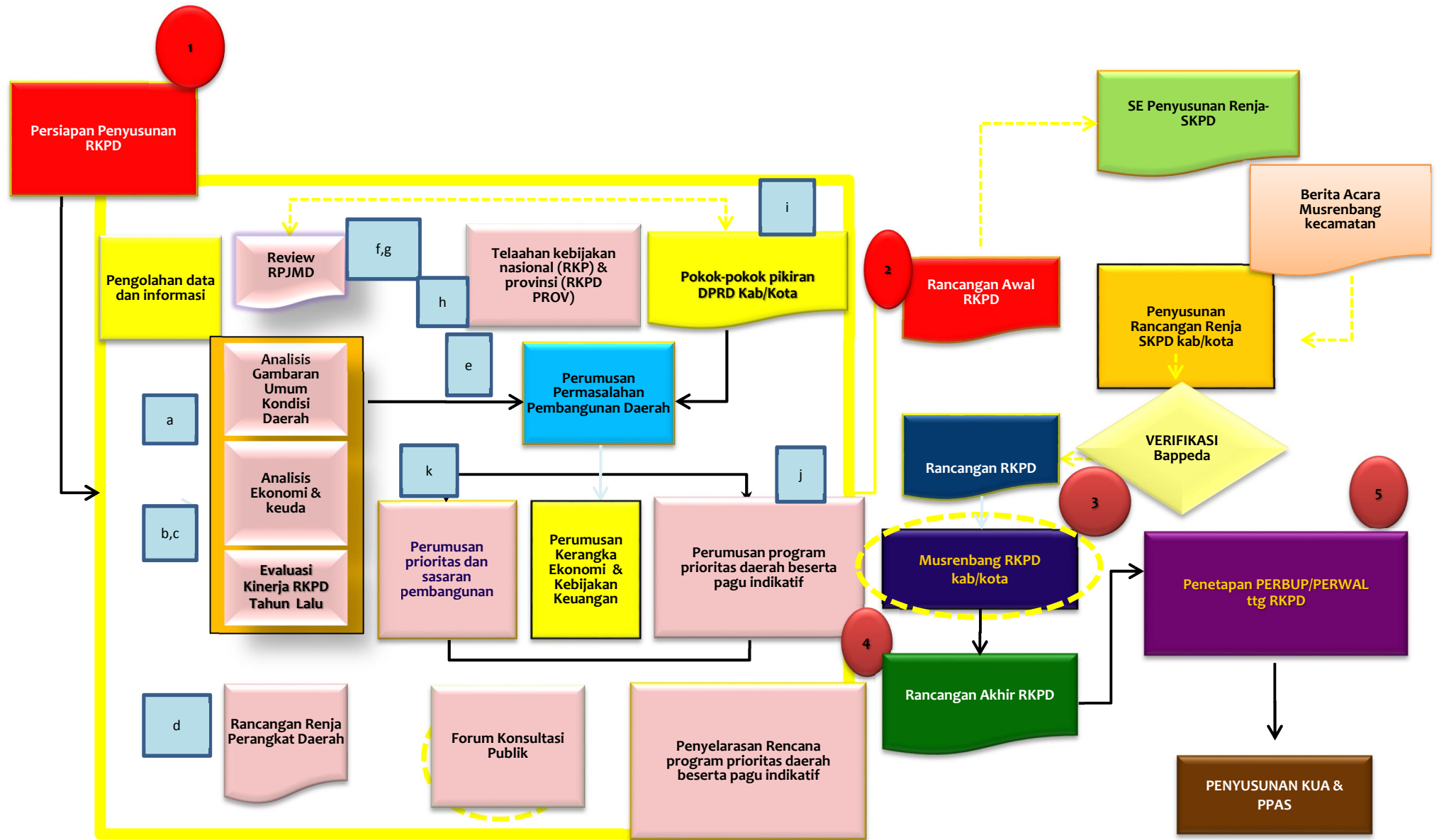
Dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan RKPD dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. penelaahan RPJPD Tahun 2005-2025;
- b. review capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
- e. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
- f. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

- g. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- h. penelaahan perencanaan tematik pembangunan daerah;
- i. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- j. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- k. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- l. perumusan rencana kerja program berdasarkan indikasi rencana program prioritas daerah.

Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dijelaskan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2019



B. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
3. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, ruang lingkup, tahapan, proses, dan alur penyusunan RKPD.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

C. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

D. Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika penulisan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi:

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi:

1. Aspek Geografi

Memuat kondisi geografi daerah meliputi: letak astronomis, luas wilayah, batas wilayah, posisi geo ekonomis, topografi wilayah, dan kondisi geologi.

2. Aspek Demografi
Memuat kondisi demografi yang meliputi : pertumbuhan, sebaran, kepadatan, struktur, dan komposisi penduduk.
 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Memuat kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator makro kinerja pembangunan secara keseluruhan.
 4. Aspek Daya Saing Daerah
Memuat kondisi umum daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.
 5. Aspek Pelayanan Wajib Dasar
Memuat kondisi umum aspek pelayanan yang meliputi urusan pemerintahan umum bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 6. Aspek Pelayanan Wajib Non Dasar
Memuat kondisi umum aspek pelayanan yang meliputi urusan pemerintahan umum bidang: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 7. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan
Memuat kondisi umum aspek pelayanan yang meliputi urusan pemerintahan umum bidang: pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perikanan; peternakan; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.
 8. Aspek Pelayanan Umum Fungsi Penunjang Urusan
Memuat kondisi umum aspek yang meliputi penunjang urusan: perencanaan; penelitian dan pengembangan; serta keuangan.
- B. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi dan status capaian indikator kinerja daerah.
- C. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, kondisi ekonomi regional, nasional dan global, dan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisi uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah yang.

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2019 yang dikelompokkan dalam kelompok: Pembangunan Manusia, Ekonomi, dan Pemerintahan.

B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah program pembangunan daerah yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD, indikasi rencana program pembangunan daerah, indikator program, target kinerja program, rumus indikator kinerja program, penjelasan yang diperlukan tentang ruang lingkup indikator program, dan perangkat daerah pengampu, serta memuat kegiatan dan pagu indikatif pendanaan kegiatan. Bab ini juga memuat berbagai inovasi program dan kegiatan dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam penyajiannya meliputi:

Indikator Kinerja, satuan, target kinerja, rumus indikator, penjelasan yang diperlukan tentang ruang lingkup indikator, dan perangkat daerah pengampu.

BAB VII PENUTUP

Berisi rangkuman dokumen RKPD yang memuat : jumlah sasaran, jumlah program, jumlah kegiatan, jumlah indikator kinerja daerah, jumlah indikator kinerja program, rencana pendapatan daerah, dan rencana belanja daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.
Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.622 RW, dan 5.779 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan.

b. Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0 % – 70 %. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi

kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

b. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

b. Potensi Kandungan

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.

5. Demografi

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk pada Tahun 2017 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 772.289 jiwa, terdiri dari laki-laki 387.812 jiwa (50,22 %) dan perempuan 384.477 jiwa (49,78 %). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,93 jiwa per rumah tangga.

Kepadatan penduduk tahun 2017 rata-rata 887 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Tiap Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sebaran (%)	rasio jenis kelamin
1	Bulu	24.212	23.149	47.361	6,13	105
2	Tembarak	15.506	14.984	30.490	3,95	103
3	Temanggung	40.017	41.190	81.207	10,52	97
4	Pringsurat	25.184	25.156	50.340	6,52	100
5	Kaloran	22.293	22.250	44.543	5,77	100
6	Kandangan	25.537	25.101	50.638	6,56	102
7	Kedu	28.952	28.321	57.273	7,42	102
8	Parakan	26.353	26.160	52.513	6,80	101
9	Ngadirejo	27.719	27.129	54.848	7,10	102
10	Jumo	14.886	14.633	29.519	3,82	102
11	Tretep	10.666	10.228	20.894	2,71	104
12	Candiroto	16.191	16.278	32.469	4,20	99
13	Kranggan	23.384	24.083	47.467	6,15	97
14	Tlogomulyo	11.373	11.200	22.573	2,92	102
15	Selopampang	9.585	10.236	19.821	2,57	94
16	Bansari	11.813	11.610	23.423	3,03	102
17	Kledung	13.785	13.264	27.049	3,50	104
18	Bejen	10.535	10.469	21.004	2,72	101
19	Wonoboyo	13.217	12.860	26.077	3,38	103
20	Gemawang	16.604	16.176	32.780	4,24	103
Jumlah Total		387.812	384.477	772.289	100,00	101

Sumber: Data Konsolidasi Bersih, Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu.

Tabel 2.4.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laju pertumbuhan penduduk (‰)	0,98	0,96	0,93	0,90	0,88	0,86*

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2018, * angka sementara

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Kewarganegaraan, Agama

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Total
		Belum/ Tidak sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D I / D II	D III	D IV / S1	S2	S3	
1	Bulu	9.669	17.245	9.946	5.416	3.845	177	293	746	24	0	47.361
2	Tembarak	9.485	5.766	6.869	4.488	3.069	148	151	492	15	7	30.490
3	Temanggung	15.827	12.952	17.676	11.062	16.135	702	1.690	4.825	331	7	81.207
4	Pringsurat	17.945	4.848	12.677	8.230	5.462	202	231	717	27	1	50.340
5	Kaloran	16.571	5.616	10.507	6.879	3.979	239	174	560	14	4	44.543
6	Kandangan	20.988	7.444	10.504	6.524	3.948	252	241	705	28	4	50.638
7	Kedu	13.424	16.430	12.895	6.795	5.692	340	444	1.194	58	1	57.273
8	Parakan	16.521	10.436	9.298	6.296	7.302	313	680	1.571	75	21	52.513
9	Ngadirejo	11.597	10.648	16.328	8.824	5.671	304	440	1.010	24	2	54.848
10	Jumo	8.793	6.226	7.144	4.052	2.496	166	168	462	11	1	29.519
11	Tretep	6.151	5.415	6.053	2.568	525	44	42	93	2	1	20.894
12	Candiroto	5.323	10.909	8.533	3.959	2.657	233	272	571	12	0	32.469
13	Kranggan	13.586	9.280	8.806	8.086	6.120	246	307	986	46	4	47.467
14	Tlogomulyo	6.771	5.322	5.602	3.015	1.502	51	93	204	9	4	22.573
15	Selopampang	5.164	4.017	5.647	2.593	1.876	94	108	312	8	2	19.821
16	Bansari	3.193	10.223	4.953	3.074	1.507	70	111	286	6	0	23.423
17	Kledung	10.160	4.945	6.958	3.268	1.451	36	80	144	6	1	27.049
18	Bejen	6.213	3.224	6.367	3.248	1.535	103	96	210	8	0	21.004
19	Wonobojo	7.360	5.001	8.256	3.655	1.403	106	97	192	4	3	26.077
20	Gemawang	10.676	8.422	8.178	3.699	1.396	102	84	214	7	2	32.780
Jumlah Total		215.417	164.369	183.197	105.731	77.571	3.928	5.802	15.494	715	65	772.289
Persentase		27,89	21,28	23,72	13,69	10,04	0,51	0,75	2,01	0,09	0,01	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari Tabel di atas, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Tamat SD sebesar 183,197 jiwa atau 23,72 %, disusul Tamat SLTP sebesar 105.731 jiwa atau 13,69 %. Hal ini berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yaitu 6,9 tahun. Untuk tamatan jenjang S1/S2/S3 masih relatif kecil yaitu sejumlah 16.274 jiwa atau 2,11%. Faktor yang mempengaruhi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S1/S2/S3 antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan nasional 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.

Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013 – 2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,03	5,27	5,01
2015	5,21	5,47	4,88
2016	4,98	5,28	5,02
2017	4,68	5,27	5,07
2018	5,02*	5,9 – 6,2**	5,17

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018. * angka sementara **Prediksi Bank Indonesia

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebesar 5,02 dengan asumsi ada peningkatan ekonomi dari upaya pemerintah daerah menggenjot perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan dan pelebaran jalan di beberapa titik pusat keramaian. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, tetapi jika dibandingkan dengan perkiraan tahun 2018, ekonomi Kabupaten Temanggung tumbuh melebihi target yang diharapkan.

2. Pertumbuhan Sektor PDRB

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Temanggung didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: (a) Industri Pengolahan; (b) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (c) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di beberapa lapangan usaha yaitu pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol terjadi di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Pada era industri 4.0, ini koneksi internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan yang positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Tabel 2.7.
Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Temanggung

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.477.229,66	3.734.880,55	4.191.112,83	4.473.537,13	4.576.312,64
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.284.990,64	3.526.969,95	3.955.969,84	4.223.379,67	4.309.622,67
	a. Tanaman Pangan	1.054.814,29	980.763,74	1.126.018,27	1.215.970,44	1.212.036,09
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	220.051,35	252.931,51	266.506,08	288.962,24	279.574,82
	c. Perkebunan Semusim	121.077,06	142.322,47	166.188,07	167.206,44	174.044,58
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	844.105,61	997.171,64	1.122.199,08	1.186.946,98	1.189.960,00
	e. Perkebunan Tahunan	420.795,97	492.395,92	537.555,83	581.659,64	607.499,10
	f. Peternakan	555.630,28	591.181,99	661.273,79	702.852,80	762.460,31
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	68.516,08	70.202,68	76.228,72	79.781,13	84.047,77
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	91.874,58	100.903,98	116.011,28	120.015,87	125.409,20
	3 Perikanan	100.364,44	107.006,62	119.131,71	130.141,60	141.280,77
B	Pertambangan dan Penggalian	102.661,37	120.932,60	140.869,76	156.457,15	168.895,50
C	Industri Pengolahan	3.338.185,67	3.862.669,12	4.272.806,45	4.701.848,97	5.094.768,39

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.303,83	11.007,07	11.587,27	13.013,55	15.455,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.687,03	11.574,60	12.127,79	12.813,06	13.702,29
F	Konstruksi	572.397,76	653.214,91	746.199,56	809.212,25	907.369,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.747.353,08	3.023.320,05	3.272.212,65	3.566.485,32	3.847.197,71
H	Transportasi dan Pergudangan	547.071,87	608.594,08	686.350,23	747.672,70	832.071,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197.017,55	213.504,18	246.607,25	276.550,89	306.656,95
J	Informasi dan Komunikasi	181.440,43	200.781,14	201.264,64	213.859,58	247.563,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402.243,87	457.785,68	512.164,62	569.008,46	621.146,06
L	Real Estate	97.770,15	109.485,78	120.585,15	130.154,37	143.469,16
M,N	Jasa Perusahaan	41.465,65	47.019,69	53.391,10	59.598,38	66.797,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	398.121,54	428.090,15	467.468,30	505.212,67	533.605,62
P	Jasa Pendidikan	592.610,81	675.857,01	733.057,80	803.891,53	877.849,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133.626,33	156.940,16	174.067,87	190.018,66	213.295,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	238.215,65	276.796,63	297.838,41	335.138,34	367.010,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.088.402,25	14.592.453,38	16.139.711,67	17.564.473,01	18.833.169,01

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2018

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 mencapai 18,83 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,30 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 17,52 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi, sebagaimana tabel diatas.

Tabel 2.8.
Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.871.059,36	2.817.953,21	2.952.682,34	3.047.963,51	3.105.053,83
	¹ Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.713.667,55	2.661.558,22	2.792.873,99	2.882.478,75	2.933.379,99
	a. Tanaman Pangan	837.490,05	737.954,15	793.957,34	820.532,53	808.527,32
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	191.604,05	194.369,72	197.890,73	206.183,34	209.295,66
	c. Perkebunan Semusim	112.679,49	119.103,14	129.107,10	124.662,84	129.768,07
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	693.609,84	701.228,50	718.651,51	729.786,51	738.660,72
	e. Perkebunan Tahunan	352.274,49	367.310,10	385.239,41	403.016,56	410.817,27
	f. Peternakan	471.004,90	485.329,39	509.367,86	538.911,06	575.386,94
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	55.004,74	56.263,23	58.660,04	59.385,91	60.924,01
	² Kehutanan dan Penebangan Kayu	74.211,42	74.073,61	74.061,40	75.082,32	77.462,43
	³ Perikanan	83.180,39	82.321,38	85.746,94	90.402,43	94.211,42
B	Pertambangan dan Penggalian	92.520,80	95.804,47	98.311,19	103.312,76	107.693,22
C	Industri Pengolahan	2.816.645,10	3.042.972,31	3.213.426,65	3.390.420,60	3.562.767,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.059,50	11.551,20	11.498,93	12.142,41	13.268,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.288,14	10.492,18	10.708,90	11.076,26	11.623,42
F	Konstruksi	513.555,74	537.587,76	583.260,43	616.827,10	677.337,84

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.506.858,95	2.699.337,09	2.794.198,91	2.934.591,91	3.084.877,39
H	Transportasi dan Pergudangan	539.878,18	568.600,74	613.424,36	652.232,98	675.719,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.241,36	188.554,34	201.299,78	212.590,36	228.950,64
J	Informasi dan Komunikasi	177.729,90	201.372,33	217.689,74	228.831,23	253.041,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	334.178,70	359.101,23	387.625,77	417.733,22	437.364,84
L	Real Estate	93.685,54	99.757,63	106.710,74	112.914,98	121.778,81
M,N	Jasa Perusahaan	35.783,82	39.261,61	42.446,28	44.735,51	48.390,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	341.071,86	341.603,70	358.689,45	368.628,49	377.512,44
P	Jasa Pendidikan	442.804,76	486.466,65	516.481,64	547.866,88	575.205,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.154,37	123.929,28	130.646,25	140.356,69	154.280,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	222.826,88	243.333,84	250.293,19	268.520,73	289.599,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.299.342,97	11.867.679,59	12.489.394,54	13.110.745,64	13.724.464,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel 2.8, nilai PDRB Temanggung pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Nilai PDRB Temanggung tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,72 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,11 triliun rupiah pada tahun 2016.

Tabel 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 – 2017 (persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	-1,85	4,78	3,23	1,87
	¹ Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,84	-1,92	4,93	3,21	1,77
	a. Tanaman Pangan	-0,11	-11,89	7,59	3,35	-1,46
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0,19	1,44	1,81	4,19	1,51
	c. Perkebunan Semusim	6,04	5,70	8,40	-3,44	4,10
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,04	1,10	2,48	1,55	1,22
	e. Perkebunan Tahunan	3,92	4,27	4,88	4,61	1,94
	f. Peternakan	5,80	3,04	4,95	5,80	6,77
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9,95	2,29	4,26	1,24	2,59
	² Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0,01	-0,19	-0,02	1,38	3,17
	³ Perikanan	2,18	-1,03	4,16	5,43	4,21
B	Pertambangan dan Penggalian	2,08	3,55	2,62	5,09	4,24
C	Industri Pengolahan	6,44	8,04	5,60	5,51	5,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,08	4,45	-0,45	5,60	9,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,25	1,98	2,07	3,43	4,94
F	Konstruksi	4,13	4,68	8,50	5,76	9,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	7,68	3,51	5,02	5,12

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
H	Transportasi dan Pergudangan	11,41	5,32	7,88	6,33	3,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	5,20	6,76	5,61	7,70
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	13,30	8,10	5,12	10,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	7,46	7,94	7,77	4,70
L	Real Estate	8,52	6,48	6,97	5,81	7,85
M,N	Jasa Perusahaan	13,85	9,72	8,11	5,39	8,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,91	0,16	5,00	2,77	2,41
P	Jasa Pendidikan	8,97	9,86	6,17	6,08	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,79	12,51	5,42	7,43	9,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,02	9,20	2,86	7,28	7,85
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,20	5,03	5,24	4,98	4,68

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2018

3. PDRB Perkapita

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi. Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik.

Tabel 2.11.
Target dan Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2017
(Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB*	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2013	17.700.000	17.882.505,18	15.300.000	15.438.137,93
2014	18.800.000	19.748.487,14	16.000.000	16.060.953,69
2015	20.500.000	21.597.662,68	16.500.000	16.742.910,81
2016	22.300.000	23.290.715,45	17.000.000	17.422.775,86
2017	24.000.000	24.810.094,42	18.000.000	18.080.083,48

Sumber: BPS Kab. Temanggung 2018, *Target Bappeda Kab. Temanggung

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung selalu lebih tinggi dari target yang ditetapkan, meskipun dengan target yang optimis. PDRB ADHK meningkat searah dengan pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mempunyai efek *multiplier* dan menjadi pengungkit pertumbuhan sektor lainnya.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (dalam persen)

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	4,18	5,11	5,71
2014	4,03	5,27	5,21
2015	4,25	5,47	5,43
2016	4,06	5,27	5,26
2017	3,77	5,27	5,21

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional.

Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakrataaan agregat yang dapat bervariasi antara 0 sampai 1. Koefisien Gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien Gini sama dengan 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Dalam sasaran pembangunan RKP 2019 pemerintah menetapkan target rasio gini (indeks) pada kisaran angka 0,38 – 0,39. Melihat target Nasional dalam RKP 2019, Kabupaten Temanggung telah searah dengan target Nasional yaitu di kisaran rasio gini 0,38.

Tabel 2.13.
Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2013-2019

Variabel	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Indeks Gini	0,34	0,38	0,38	n.a	n.a	0,38	0,38

Sumber: SIPD dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Temanggung 2018

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Gini rasio sepanjang 2013-2019. Indeks gini mengalami penurunan dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan antara masyarakat semakin kecil. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari 0,34 menjadi 0,38 pada tahun 2014 dan 2015 yang artinya ketimpangan pendapatan meningkat. Adapun indeks gini tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia. Target rasio gini Kabupaten Temanggung tahun 2018-2019 mengacu pada target RKP 2019 yaitu pada kisaran angka 0,38.

Tabel 2.14.
Rasio Perubahan Gini Rasio dengan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung			Nasional		
	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi	Rasio	Gini Rasio	Pertumbuhan Eonomi	Rasio
2013	0,34	5,20	1:4,25	0,4	5,56	1:25
2014	0,38	5,03	1:4,25	0,4	5,01	1:55
2015	0,38	5,21	1:4,5	0,4	4,88	1:23
2016	n.a	4,98	n.a	0,394	5,02	1:23
2017	n.a	4,68	n.a	0,391	5,07	1:17
2018	0,38*	5,02*	1:32	0,38*	5,50**	1:6

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Keterangan: * angka sementara **berita resmi Statistik triwulan I 2018

Pada angka tahun 2018 di Kabupaten Temanggung setiap kenaikan gini rasio 1 digit akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 32 poin atau setara kenaikan gini rasio 0,1 akan memberikan efek pertumbuhan ekonomi 3,2 point. Agak tidak senada dengan rasio perubahan gini rasio dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional karena perkiraan pertumbuhan nasional yang sangat optimis di titik 5,50 dengan angka sebelumnya yang terpaut jauh yaitu 5,07 maka rasionya menjadi kenaikan 1 point untuk perubahan gini rasio akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 6 point atau setara setiap perubahan 0,1 gini rasio akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan ekonomi 0,6 poin.

5. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi mencerminkan kestabilan nilai jual mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah. Perkembangan inflasi selama 6 tahun terakhir.

Tabel 2.15.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018

No	Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2013	5,07	7,99	8,33
2	2014	6,15	8,22	8,36
3	2015	5,10	2,73	3,35
4	2016	3,67	2,36	3,02
5	2017	2,43	3,71	3,61
6	2018	3,00*	n.a	3,13*

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018 *angka sementara

Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah-satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Inflasi terendah Kota Temanggung selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 2,43 persen.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional eks karisidenan Kedu dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2013 – 2017

Kab/Kota	IPM					Peringkat IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Kab.Kebumen	64.86	65.67	66.87	67.41	68,29	5	5	5	5	5
Kab.Purworejo	69.77	70.12	70.37	70.66	71,31	2	2	2	2	2
Kab.Wonosobo	64.57	65.20	65.70	66.19	66,89	6	6	6	6	6
Kab.Magelang	65.86	66.35	67.13	67.85	68,39	3	3	3	3	3
Kab.Temanggung	65.52	65.97	67.07	67.60	68,34	4	4	4	4	4
Kota Magelang	75.29	75.79	76.39	77.16	77,84	1	1	1	1	1
JAWA TENGAH	68.02	68.78	69.49	69.96	70,52					
NASIONAL	68.31	68.90	69.55	70.18	70,81					

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Di Indonesia IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu: angka harapan hidup (dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (dimensi pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi).

Perkembangan angka IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Variabel	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	64,01	65,52	65,97	67,07	68,34
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,31	75,34	75,35	75,39	75,42
2.	Harapan Lama Sekolah(tahun)	11,39	11,69	11,89	12,06	12,07
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,13	6,18	6,52	6,55	6,90
3.	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	8.042	8.062	8.369	8.593	8.794

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.18.
Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kabupaten Temanggung dan
IPM Nasional Tahun 2017

No	Variabel	Kabupaten Temanggung		Nasional
		Target	Realisasi	
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,00	68,34	70,81
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,40	75,42	71,06
2.	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,07	12,07	12,85
3.	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	8.700	8.794	10.660

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Target IPM Nasional yang termuat di RKP 2019 ada di kisaran 71,98. Kabupaten Temanggung masih mempunyai harapan untuk meningkatkan IPM mendekati target Nasional dengan program-program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD 2019 ini untuk meningkatkan IPM hingga selaras dengan target Nasional yaitu pada angka 71,98. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target ini sesuai arahan Nasional yaitu:

- 1) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, serta mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; dan
- 3) upaya urusan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

a. Angka Harapan Hidup

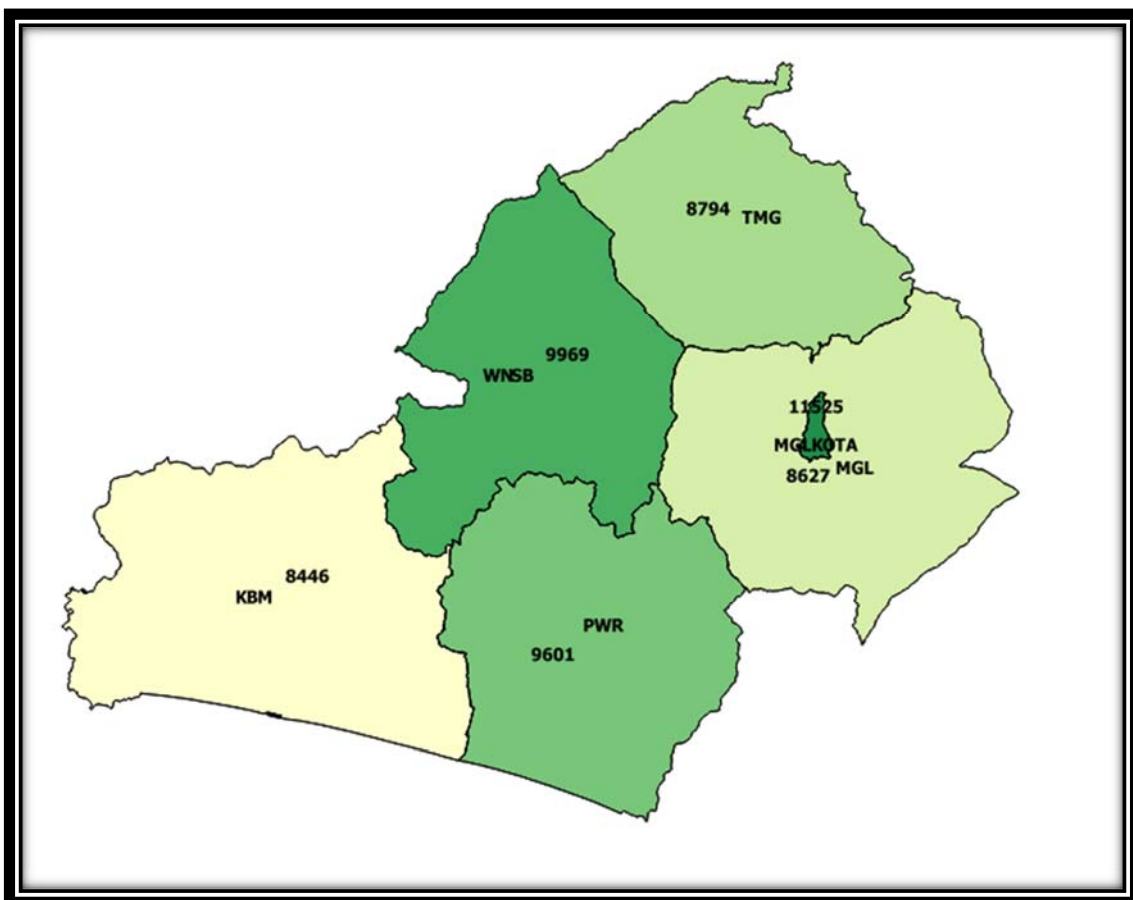
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula. Dari tabel 2.12 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 AHH di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,42 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 75,39 dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

b. Angka harapan lama sekolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 mencapai 12,07 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,07 tahun (Diploma I) lebih lama 0,01 tahun dibanding anak berusia sama di tahun 2016.

c. Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan untuk keperluan perbandingan antar negara. Sebagai catatan, setidaknya terdapat dua kelemahan penggunaan PDB riil perkapita sebagai ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk Indonesia, karena data PDB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS sebagai proksi pendapatan.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Gambar 2.1.
Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017

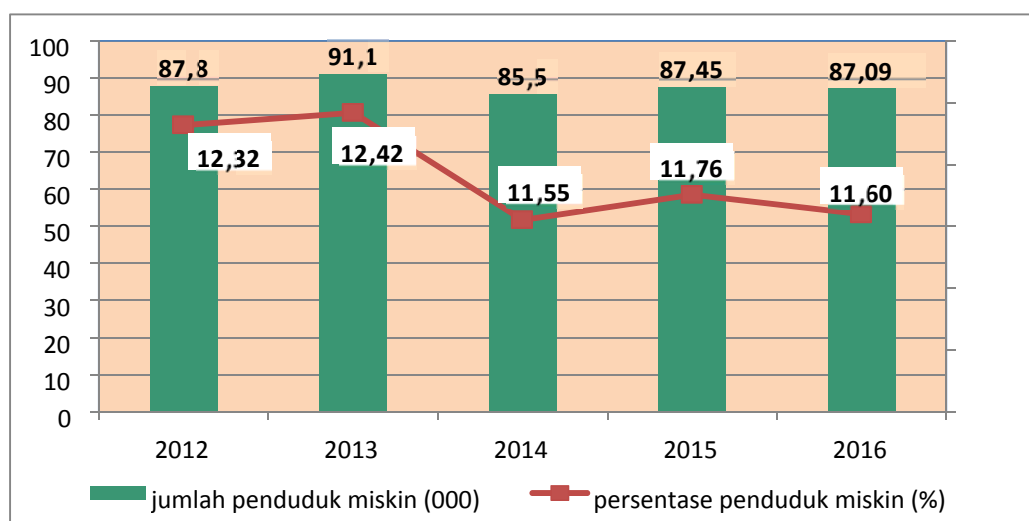
Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.794.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 10.377.000,00.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

7. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk miskin) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, -2016



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2017

Pada tahun 2013 angka kemiskinan meningkat dibanding tahun 2012 baik secara jumlah maupun presentase penduduk miskin yaitu 12,42 persen atau sebesar 91,1 ribu orang. Angka kemiskinan pada tahun 2013 ini merupakan tingkat kemiskinan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada

tahun berikutnya, tingkat kemiskinan turun cukup tajam yaitu menjadi 85,5 ribu atau sebesar 11,55 persen dan merupakan tingkat kemiskinan paling rendah pada periode 2012-2016.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin turun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 11,76 persen menjadi 11,60 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2017 belum tersedia. Target angka kemiskinan yang termuat dalam sasaran pembangunan RKP 2019 yaitu pada kisaran 8,5% – 9,5%. Jadi target Kabupaten Temanggung harus sejalan dengan target penurunan angka kemiskinan Nasional di tahun 2019 sebesar 9,5%.

Tabel 2.19.
Rasio Penduduk Miskin Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Temanggung dan Nasional
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung			Nasional		
	Penduduk miskin	Pertumbuhan ekonomi	Rasio	Penduduk miskin	Pertumbuhan ekonomi	Rasio
2013	91.100	5,20	1:17.519	28.600.000	5,78	1:4.948.096
2014	85.500	5,03	1:16.998	27.730.000	5,02	1:5.523.904
2015	87.450	5,21	1:16.785	28.510.000	4,88	1:5.842.213
2016	87.090	4,98	1:17.418	27.760.000	5,02	1:5.529.880
2017	86.800	4,68	1:17.290	26.580.000	5,01*	1:5.305.389

Sumber: BPS 2018, *trivulan I 2017

Penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebanyak 86.800 jiwa dari 4.197.490 jiwa di Provinsi Jawa Tengah atau sebesar 2% dari orang miskin di Jawa Tengah ada di Temanggung. Jumlah penduduk miskin ini dibanding jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 merupakan 11,24% dari 772.289 jiwa.

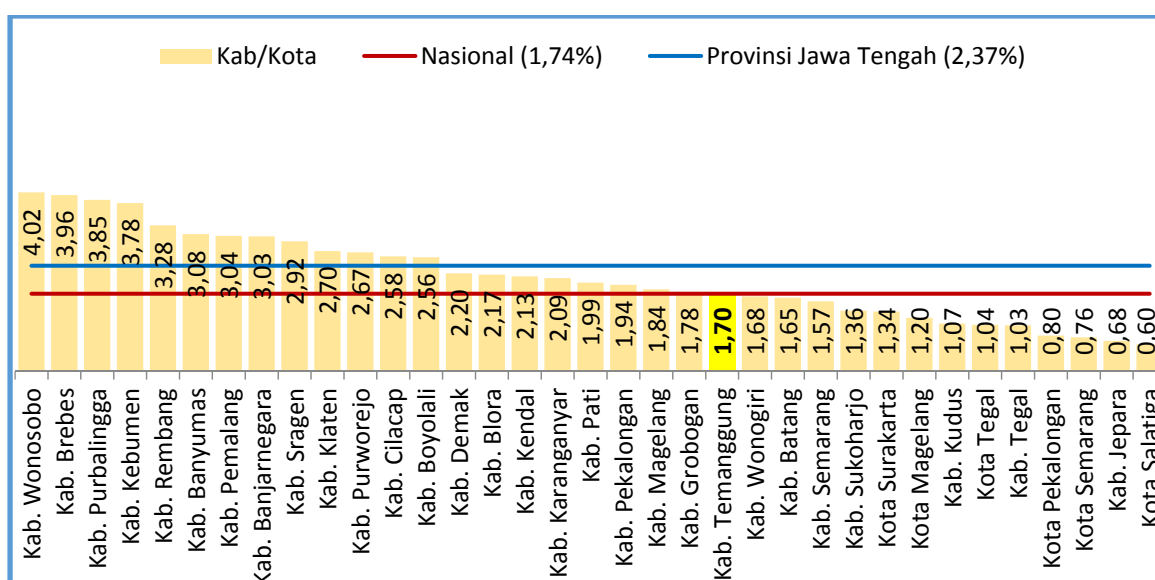
Berdasarkan rasio pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin dapat diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menurunkan penduduk miskin di Kabupaten Temanggung sebanyak 17.290 jiwa pada tahun 2017. Angka ini lebih sedikit 130 jiwa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini seiring dengan kondisi nasional, bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Tahun 2016 kondisi perekonomian lebih baik dan pada tahun 2017 menurun 224 jiwa untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu pada angka 5.305.389 jiwa.

Tabel 2.20.
Target dan Realisasi Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung		Nasional
	Target	Realisasi	
2013	12,30	12,42	11,46
2014	12,00	11,55	10,96
2015	11,50	11,76	11,13
2016	11,65	11,60	10,70
2017	11,30	11,24	10,12

Sumber: BPS dan SIPD Kabupaten Temanggung 2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 2.2
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 1,70% berada sedikit dibawah angka Nasional sebesar 1,74% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,37%. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di

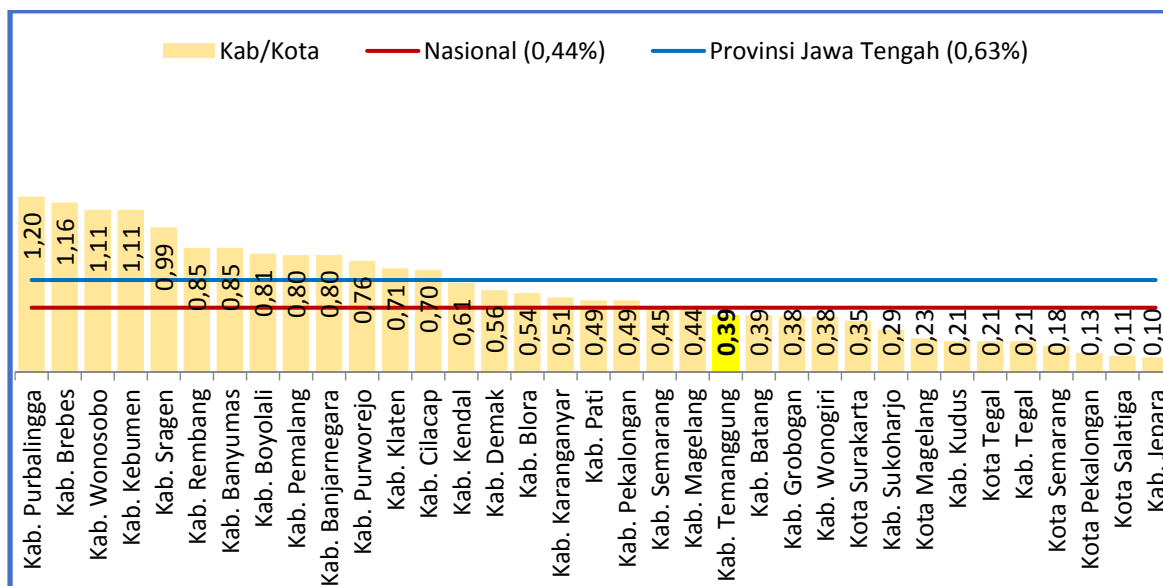
wilayah eks Karesidenan Kedu, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo (4,02%), Kabupaten Kebumen (3,78%), Kabupaten Purworejo (2,67%), Kabupaten Magelang (1,84%) dan hanya lebih buruk dari Kota Magelang (1,20%).

Tabel 2.21.
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung			Nasional	
	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
2013	1,70	1,46	-21	1,89	+0,53
2014	1,45	1,51	+3,42	1,75	+7,41
2015	1,50	1,99	+31,79	1,84	-5,14
2016	1,80	1,70	-14,57	1,74	-5,43
2017	1,65	1,81	+6,47	1,79	+2,87

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung 2018

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Lima tahun terakhir mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 1,81. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 2.3
Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung sebesar 0.39% berada di bawah angka Nasional sebesar 0.44 % dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0.63%. Hal ini berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada di tingkat provinsi maupun tingkat Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten di wilayah eks Karesidenan Kedu, maka angka Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen (1,11%), Kabupaten Wonosobo (1,11%), Kabupaten Purworejo (0,76%), Kabupaten Magelang (0,44%) dan hanya lebih buruk dari Kota Magelang (0,23%).

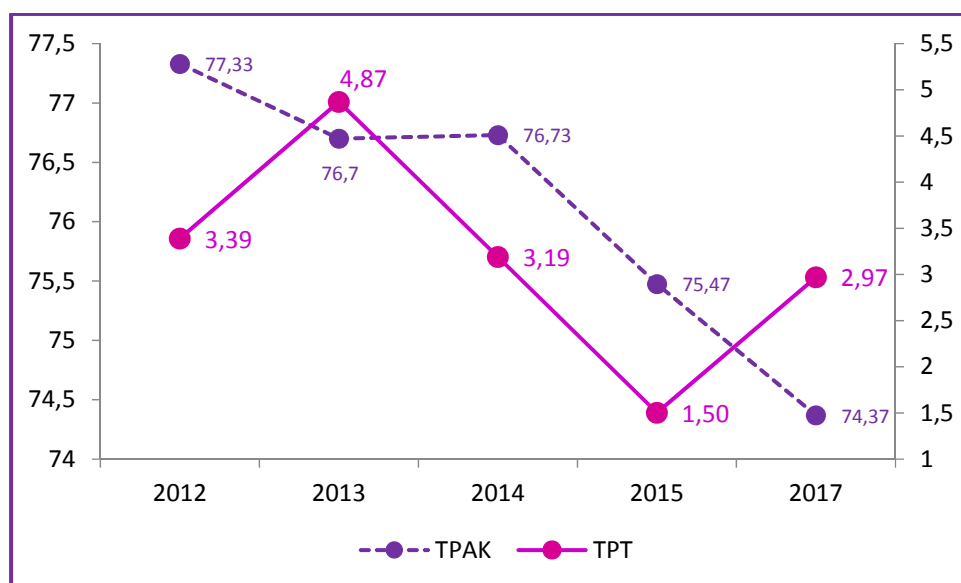
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

Grafik 2.2.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung Tahun 2012–2017



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Sepanjang lima tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah yaitu dibawah 5 persen, tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 4,87 persen dan terendah pada Tahun 2015 sebesar 1.50 persen. Meski naik di angka 2,97 persen di tahun 2017 namun pencapaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik disbanding dengan pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Hal ini karena banyak sektor pertanian terutama pertembakauan dan industry pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Temanggung dan Nasional
Tahun 2013 – 2017

Tahun	TPT Kab. Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Temanggung	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2013	4,87	5,20	5,56
2014	3,19	5,03	5,01
2015	1,50	5,21	4,88
2016	n.a	4,98	5,02
2017	2,97	4,68	5,07

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung 2018

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. Pada tahun 2017 rupanya pertumbuhan ekonomi sedikit melambat mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik.

Tabel 2.23
Target, Realisasi, Pertumbuhan TPT Kabupaten Temanggung dan Nasional
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung			Nasional	
	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
2013	3,30	4,87	-43,66	6,17	-0,65
2014	4,00	3,19	+34,50	5,94	+3,73
2015	3,00	1,50	+52,98	6,18	-4,04
2016	3,00	n.a	-66,66	5,61	+9,22
2017	3,00	2,97	+18,8	5,50	+1,96

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung 2018

Pada tahun 2016 BPS se-Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penghitungan urusan ketenagakerjaan oleh sebab itu tidak ada data yang dipublikasikan terkait ketenagakerjaan di tahun 2016 baik TPT, TPAK, jumlah penganggur dan sebagainya. Dengan asumsi perkembangan dari 2015 ke 2017 trennya meningkat, maka angka rata-rata pencapaian tahun 2016 pada kisaran 2,5% untuk TPT Kabupaten Temanggung. Apabila kita memakai asumsi pertumbuhan TPT pada angka 2,5%, pencapaiannya lebih tinggi dari pada angka TPT Nasional yaitu pada kisaran 5,61 namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sangat rendah maka ada tambahan jumlah pengangguran terbuka sehingga di tahun 2017 TPT meningkat menjadi 2,97 meskipun bila dibandingkan dengan pencapaian Nasional yang terus turun TPTnya, Kabupaten Temanggung selalu mencapai titik angka lebih tinggi karena angka TPTnya lebih rendah, artinya prosentase pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dibandingkan jumlah angkatan kerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian Nasional lebih baik di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.24
Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dan Nasional
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Temanggung		Nasional	
	Pengangguran terbuka	Pertumbuhan	Pengangguran terbuka	Pertumbuhan (%)
2013	20.685	-44,71	7.410.931	0,89
2014	13.724	33,65	7.244.905	2,24
2015	6.459	52,94	7.560.822	-4,36
2016	n.a	n.a	7.031.775	6,99
2017	12.908	-99,85	7.040.323	-0,12

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang termaktub dalam sasaran pembangunan RKP 2019 sebesar 4,8% – 5,2%. Kabupaten Temanggung optimis dapat mencapai target yang lebih baik dari target TPT Nasional, yaitu pada kisaran 3%.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Sepanjang 2012–2017, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kecenderungan menurun dari 77,33 persen pada tahun 2012 menjadi hanya 74,37 persen pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan

bahwa persentase penduduk yang aktif secara ekonomi menurun. Kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di Kabupaten Temanggung terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,87 persen dan mencapai pengangguran terendah pada tahun 2015 yaitu hanya 1.5 persen.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.25
 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	BULAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Januari	101,71	101,71	101,60	102,31	100,26
2.	Februari	101,27	101,27	102,37	101,62	100,01
3.	Maret	101,16	101,16	100,44	99,70	99,68
4.	April	101,05	101,05	98,72	98,15	100,65
5.	Mei	101,13	101,13	99,47	99,25	101,62
6.	Juni	101,49	101,49	99,59	99,76	101,98
7.	Juli	101,31	101,31	99,99	99,82	102,68

No	BULAN/ TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
8.	Agustus	101,77	101,77	100,83	100,15	103,36
9.	September	101,99	101,99	102,52	100,11	103,09
10.	Oktober	102,20	102,20	102,74	100,10	103,78
11.	Nopember	102,01	102,01	103,42	99,89	104,16
12.	Desember	101,34	101,34	103,24	99,64	104,74
	Rata - Rata	101,53	101,53	101,24	100,04	102,17

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 terlihat cukup fluktuatif pada kisaran 99,68–104,74.

104,74 persen, dengan rata-rata indeks sebesar 102,17 berarti bahwa rata-rata petani di Kabupaten Temanggung mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta untuk penambahan barang modalnya.

Fluktuasi NTP akan menunjukkan kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Berbagai fenomena perubahan situasi yang terjadi baik yang bersifat alami (gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat distorsi pasar (seperti penerapan kebijakan yang disengaja, baik di sektor pertanian maupun non pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga yang pada akhirnya mempengaruhi NTP, akan menjadi masukan penting bagi penyusunan program kebijakan ke arah pembentukan NTP yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian akan mempengaruhi besaran NTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

NTP Kabupaten Temanggung mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2017, yakni sebesar 104,74 sedangkan Bulan Maret merupakan bulan dengan NTP terendah sebesar 99,68. Selama tahun 2017 secara umum NTP mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 2,13 persen. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 2,98 persen yaitu dari NTP bulan Desember 2016 sebesar 95,06 menjadi 97,90 dibulan Januari 2017. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga gabah mencapai 3,17 persen yang menyebabkan Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,22 persen, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,20 persen.

2. Desa Berstatus Swasembada

Berdasarkan kriteria status, desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarsa; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.

Penilaian manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menentukan status desa.

Tabel 2.26
Status Desa di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 TW 1
1.	Jumlah Desa Swadaya	275	275	215	215	2	2
2.	Jumlah Desa Swakarya	14	14	40	40	215	215
3.	Jumlah Desa Swasembada	0	0	6	6	46	46
4.	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kab. Temanggung dalam SIPD Triwulan I 2018

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.27
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	176.077	165.550	173.743	176.904	162.005
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	58.575	49.657	58.791	60.951	61.846
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	234.652	215.207	232.534	237.855	223.851
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	505.223	515.854	555.730	565.890	548.438
5.	Rasio ketergantungan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2:1
6	Persentase	46,46	41,72	41,84	42,03	40,81

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas, dapat diperoleh angka ketergantungan pada Tahun 2017 sebesar 40,81 persen. Angka ketergantungan dari tahun ketahun semakin menurun artinya ini merupakan *windows of opportunity* yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan kesejahteraan secara ekonomi serta menuju bonus demografi. Dengan angka ketergantungan 40,81 persen dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Layanan Umum Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perbandingan jumlah murid usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu dikali 1.000. APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihitung dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak terhadap seluruh jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%.

Sedangkan APS SD/MI/Paket A diperoleh dari perbandingan jumlah murid usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 1.000. APS SMP/MTs/Paket B diperoleh dari perbandingan murid usia 13-15 tahun terhadap penduduk usia 13-15 tahun dikali 1.000.

Tabel 2.28.
Angka Partisipasi Sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
	APS PAUD	76,15	76,15	76,18	76,38	74,00
	Pendidikan Dasar					
1.	APS SD/MI/Paket A	987,91	994,25	999,31	996,04	996,00
2.	APS 13 - 15 tahun	873,60	993,25	993,34	998,02	998,00

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu dikali 100%.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Jenis Sekolah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A	95,42	95,45	95,49	96,59	96,65
2.	SMP/MTs/Paket B	83,64	83,69	83,74	84,01	84,20

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

APM baik itu di tingkat SD maupun SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (AptS) menunjukkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen.

Tabel 2.30.
Angka Putus Sekolah (APtS)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APtS SD/MI	0,16	0,17	0,16	0,07	0,08
2.	APtS SMP/MTs	0,82	0,55	0,51	0,33	0,29

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

4) Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada jenjang tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian (orang)	Tahun				
		2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1.	SD/MI	11.799	11.911	12.058	11.764	11.542
2.	SMP/MTs	9.480	9.389	9.911	10.296	10.536

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

5) Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan adalah persentase lulusan sekolah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.32.
Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI ke SMP/MTS	92,53	97,02	97,20	97,37	97,00
2.	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	64,36	72,97	73,74	82,15	80,52

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

6) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD dan Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
	Jumlah sekolah PAUD	152	152	271	813	280
	Jumlah Siswa PAUD	4.912	7.439	5.472	30.551	6.877
	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah negeri	411	411	411	411	411
1.1.1	Jumlah SD negeri	409	409	409	409	409
1.1.2	Jumlah MI negeri	2	2	2	2	2
1.2.	Jumlah sekolah swasta	163	164	165	166	166
1.2.1	Jumlah SD swasta	23	23	23	23	23
1.2.2	Jumlah MI swasta	140	141	142	143	143
1.3.	Jumlah sekolah SD/MI	574	575	576	577	577
1.4.	Jumlah penduduk usia 7-12 th	71.530	72.848	69.970	69.459	69.670
1.5.	Rasio per 10.000	80,25	78,93	86,61	83,07	82,78
	Rasio ideal per 10.000	52				
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah negeri	44	44	44	44	44
2.1.1	Jumlah SMP negeri	42	42	42	42	42
2.1.2	Jumlah MTs negeri	2	2	2	2	2
2.2.	Jumlah sekolah swasta	61	61	62	63	64
2.2.1	Jumlah SMP swasta	30	30	31	32	33
2.2.2	Jumlah MTs swasta	31	31	31	31	31
2.3.	Jumlah sekolah	105	105	106	107	108

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	SMP/MTs					
2.4.	Jumlah penduduk usia 13-15 th	35.740	36.005	34.381	34.318	34.394
2.5.	Rasio per 10.000	29,38	29,16	30,83	31,18	31,39
	Rasio ideal per 10.000	52				

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

7) Rasio guru/murid sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar

Tabel 2.34.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
	Jumlah Guru PAUD	583	909	1.719	2.499	788
	Jumlah Siswa PAUD	4.912	7.439	5.472	3.051	5.969
	Rasio Guru terhadap siswa	1 : 8,43	1 : 8,18	1 : 3,18	1 : 1,2	1:7,57
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah guru	5.728	5.527	5.488	5.550	5.449
1.1.1	Jumlah guru SD PNS	2.806	2.616	2.689	2.568	2.567
1.1.2	Jumlah guru SD Non PNS	1.576	1.634	1.558	1.722	1.721
1.1.3	Jumlah guru MI PNS	164	162	153	156	149
1.1.4	Jumlah guru MI Non PNS	1.182	1.115	1.088	1.104	1.169
1.2.	Jumlah murid sekolah negeri	56.305	55.245	54.599	54.920	54.966
1.2.1	Jumlah murid SD negeri	55.598	54.492	53.773	54.032	54.032
1.2.2	Jumlah murid MI negeri	707	753	826	888	934
1.3.	Jumlah murid sekolah swasta	19.461	20.107	20.978	22.108	45.138
1.3.1	Jumlah murid SD swasta	4.860	5.174	5.233	5.316	25.756
1.3.2	Jumlah murid MI swasta	14.601	14.933	15.745	16.792	19.382
1.4.	Jumlah murid	75.766	75.352	75.577	77.028	100.104
1.5.	Rasio per 10.000	756,01	733,49	726,15	720,52	544,35
	Rasio ideal per 10.000	500				
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah guru	2.136	2.201	2.167	2.159	2.164

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.1	Jumlah guru SMP PNS	975	950	933	936	1.075
2.1.2	Jumlah guru SMP Non PNS	557	581	612	610	460
2.1.3	Jumlah guru MTs PNS	94	102	95	84	98
2.1.4	Jumlah guru MTs Non PNS	510	568	527	529	582
2.2.	Jumlah murid sekolah negeri	21.944	20.032	20.498	21.111	21.145
2.2.1	Jumlah murid SMP negeri	20.310	18.431	18.788	19.352	19.352
2.2.2	Jumlah murid MTs negeri	1.634	1.601	1.710	1.759	1.802
2.3.	Jumlah murid sekolah swasta	11.292	10.588	11.521	11.943	12.000
2.3.1	Jumlah murid SMP swasta	5.531	5.067	5.633	5.900	5.695
2.3.2	Jumlah murid MTs swasta	5.761	5.521	5.888	6.043	6.305
2.4.	Jumlah murid	33.236	30.620	32.019	33.054	33.145
2.5.	Rasio per 10.000	642,67	718,81	676,79	653,17	652,98
	Rasio ideal per 10.000	500				

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

8) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus.

Tabel 2.35.
Angka Melek Huruf
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	95,99	95,99	98,34	98,37	98,70

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

9) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Pendidik yang memenuhi kualifikasi S₁/D_{IV}, S₂ atau lebih diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S₁/D_{IV}, S₂ atau lebih di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S1/D-IV, S2 atau lebih
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kualifikasi S₁/D_{IV}					
a. Guru SD/MI	3.576	4.508	4.666	4.809	4.809
b. Guru SMP/MTs	1.726	1.823	1.904	1.815	1.815
Kualifikasi S₂ atau lebih					
a. Guru SD/MI	19	19	31	69	69
b. Guru SMP/MTs	53	53	62	49	49

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

b. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Tabel 2.37.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	62,34	127,16	27,00	93,17	67,45

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, kadang jumlahnya menurun dan bertambah secara drastis, dan Tahun 2014 adalah yang tertinggi yaitu sebesar 127,16%.

2) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

Tabel 2.38.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	173	167	183	136	137
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	11.228	11.010	10.935	10.733	10.378
3.	Angka kematian bayi	15,41	15,17	16,8	12,7	13,20

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Angka kematian bayi pada tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel 2.31. Pada tahun 2017 angka ini mengalami kenaikan dari 12,70 ‰ menjadi 13,20 ‰. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil, bayi.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil

kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,85 persen dari tahun 2015 yang sebesar 0,75 persen. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase balita gizi buruk	0,93	2,00	0,75	0,85	0,51
2.	Persentase balita gizi kurang	13,47	14,00	6,56	5,81	5,29
3.	Persentase balita gizi baik	83,75	82,20	89,9	92,21	92,22
4.	Persentase balita gizi lebih	1,85	1,80	2,79	1,98	1,98

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

4) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian balita selama lima tahun masih fluktuatif, dari 16,74 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 14,26 per

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena penyakit infeksi dan juga dipengaruhi kematian bayi.

Tabel 2.40.
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita Per 1.000 KH	16,74	20,98	19,00	14,26	14,26

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Tabel 2.41.
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kelahiran kasar (CBR) per 1.000	7,95	9,36	9,42	n.a	n.a
2	Angka kematian kasar (CDR) per 1.000	4,90	5,30	5,38	n.a	n.a
3	Angka kematian bayi (IMR) per 1.000	15,41	15,00	16,82	12,7	n.a

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan Kab. Temanggung, 2018

6) Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Tabel 2.42.
Rasio Posyandu dan Balita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	1.497	1.505	1.506	1.505	1.506
2.	Jumlah balita	58.221	45.428	53.645	55.019	60.480
3.	Rasio	1 : 39	1 : 31	1 : 36	1 : 37	1:38
	Rasio Ideal	1 : 50				

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

7) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.43.

Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung, 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	760.297	768.290	772.289
2	Jumlah Puskesmas	24	24	26
	Puskesmas Rawat Inap	4	4	5
	Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	21
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 31.844	1 : 33.489	1:29.703
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	40	40	40
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 19.706	1 : 20.094	1:29.703
6	Jumlah Pos Kesehatan Desa	162	215	212
7	Rasio PKD per satuan penduduk	1 : 4.866	1 : 3.738	1:3.642

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

8) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.44.

Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017

NO	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk	760.297	768.290	772.289
2.	Jumlah Rumah Sakit	4	4	4
	Rumah Sakit Pemerintah	1	1	1
	Rumah Sakit Swasta	3	3	3
3.	Rasio Rumah Sakit	1:190.074	1:192.072	1:193.072
	Rasio ideal	1:100.000		

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2016 adalah 1 : 200.936 artinya satu rumah sakit melayani 200.936 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Temanggung dengan penduduk sebesar 803.745 jiwa membutuhkan 8 rumah sakit atau membutuhkan 4 rumah sakit baru.

9) Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk selama lima tahun terakhir tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.45.
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk	788.264	768.290	772.289
2	Jumlah dokter umum	91	71	30
3	Rasio dokter umum	1 : 8.662	1 : 10.820	1:25.743
4	Jumlah dokter gigi	29	28	23
5	Rasio dokter gigi	1 : 27.181	1 : 27.438	1:33.577
6	Jumlah dokter spesialis	25	49	19
7	Rasio dokter spesialis	1 : 31.530	1 : 15.679	1:40.646

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter.

10) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU).

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2017 mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan

atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya. Secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2.652	3.619	3.863	3.796	3.151
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	2.972	3.619	3.863	3.796	3.151
3	Cakupan komplikasi kebidanan	112,07	100	100	100	100

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

11) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.47.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	9.495	11.031	10.970	10.616	9.440
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.628	11.033	11.561	10.616	10.724
3	Cakupan pertolongan persalinan	75,19	99,98	94,9	100	88,02

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2013 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif, hal ini bukan karena kurangnya penanganan namun karena sebagian dari jumlah ibu sasaran bersalin belum proses melahirkan sampai dengan bulan Desember.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

12) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada $\geq 80\%$ sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 (satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B, 1 (satu) dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT.

Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan desa UCI tiap tahun sama dari tahun 2013, sampai tahun 2017 mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	288	288	288	288	288
3	Persentase	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian yang sama tersebut dikarenakan ada 1 (satu) desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretep.

13) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak 2013 sampai dengan 2017 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

Tabel 2.49.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Gizi Buruk	16	28	25	19	33
2	Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan	16	28	25	19	33
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Tabel 2.50.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis (orang)	154.771	158.834	51.530	47.146	64.123
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	53,01	34,42	76,29	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

15) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Capaian pada tahun 2017 sebesar 106,67 persen. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Temanggung telah melebihi target SPM sebesar 90 persen, perkembangannya selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.51
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Bayi	10.960	10.876	10.531	10.480	9.010
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	11.228	11.010	10.939	10.733	10.378
3	Persentase Kunjungan Bayi	97,8	98,8	96,27	97,64	86,82

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

16) Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 masih fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Cakupan Ibu Hamil K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Ibu Hamil	12.654	11.765	12.081	11.634	10.724
2	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	11.694	11.094	10.991	10.794	8.810
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,41	94,30	90,98	92,78	82,15

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

17) Cakupan pelayanan nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada kurun waktu tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu pasca melahirkan telah merata dan sesuai standar. Data cakupan kunjungan nifas dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Cakupan Kunjungan Nifas
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Nifas	10.828	11.031	10.677	10.378	9.412
2	Jumlah Ibu Nifas	10.842	11.031	11.561	10.616	10.724
3	Cakupan Kunjungan Nifas	96,25	100	92,35	97,76	87,76

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta adanya dukungan program dari provinsi maupun pusat. Total panjang jalan kabupaten adalah 739,127 km dan terdapat 335 unit jembatan.

Jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.
Jalan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang jalan (km)	Kondisi baik (km)	%
2013	739,127	502,606	68,00
2014	739,127	504,313	68,23
2015	739,127	552,818	74,79
2016	739,127	566,488	76,64
2017	739,127	607,25	82,16

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas, jalan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jalan pada Tahun 2017, dari total 739,127 km panjang jalan yang ada terdapat 607,25 km jalan berkondisi baik atau setara dengan 82,16 %.

2) Jembatan kondisi baik

Jembatan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jembatan pada Tahun 2017, dari total 335 unit jembatan yang ada terdapat 302 unit jembatan berkondisi baik atau setara dengan 90,15%.

Tabel. 2.55.
Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	jumlah (unit)	kondisi baik (unit)	%
2013	335	276	82,39
2014	335	282	84,18
2015	335	283	84,48
2016	335	285	85,07
2017	335	302	90,15

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

3) Rasio jaringan irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jumlah DI kabupaten berkondisi baik ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	jumlah DI (unit)	kondisi baik (unit)	%
2013	577	392	67,94
2014	577	405	70,19
2015	577	433	75,04
2016	577	433	75,04
2017	577	484	83,88

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas, DI kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi DI pada Tahun 2017, dari total 577 DI yang ada terdapat 484 DI berkondisi baik atau setara dengan 83,88%. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 17.711 hektar.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Persentase rumah tinggal bersanitasi dan air minum layak

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.57.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2014-2017

NO	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tinggal	224.980	246.088	247.568	249.049
2	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak	149.590	172.041	194.493	199.408
	Persentase	66,49	69,91	78,56	80,06

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat, dari 66,49% menjadi 80,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat. Akses sanitasi layak ini, tidak dapat dipisahkan dari akses air minum yang layak.

Akses air minum dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur

gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.58.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2014-2017

NO	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tinggal	224.980	246.088	247.568	249.049
2	Jumlah rumah tinggal berakses air minum yang layak	161.662	183.740	205.818	205.907
	Persentase (%)	71,85	74,66	83,13	82,67

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat dari 71,85 % menjadi 82,67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

b) Persentase areal kawasan kumuh

Luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 ada 297,81 Ha meliputi kawasan perkotaan Temanggung dan Parakan.

c) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Salah satu indikator untuk melihat kinerja di persampahan adalah dengan melihat rasio jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per 1.000 penduduk sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPS (unit)	139	164	430	437	437
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	47.450	98.259	50.779	48.049	96.098
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	746.313	731.061	788.264	768.290	772.289
4.	Persentase daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	6,36	13,44	6,44	5,68	5,65
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap jumlah penduduk	1:15,73	1:7,44	1:15,52	1:16,73	1:17,67

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Adapun angka kriminalitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.60.
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013–2017

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kasus Narkoba	3	14	13	17	21
2.	Kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
3.	Kejahatan Seksual	3	6	11	19	19
4.	Kasus Penganiayaan	13	35	24	39	9
5.	Kasus Pencurian	64	97	134	117	87
6.	Kasus Penipuan	20	29	60	52	20
7.	Kasus Pemalsuan uang	0	2	3	0	0
8.	Total Tindak Kriminal	104	184	245	244	157
9.	Angka Kriminalitas	1,42	2,49	3,28	3,17	2,03

Sumber: Kepolisian Resort Temanggung dan Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD 2018

Selama Tahun 2013-2016 jumlah tindak kriminal cenderung meningkat dari 104 kasus di Tahun 2013 menjadi 244 kasus di Tahun 2016, namun jumlah kasus berkurang pada tahun 2017 menjadi 157 kasus dengan jumlah kasus terbanyak adalah pencurian. Angka kejahatan yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kasus narkoba dan kejahatan seksual, yang cenderung naik setiap tahun.

2) Cakupan Petugas Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Tabel 2.61.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Linmas	8.879	8.789	8.797	9.158	8.112
2.	Jumlah penduduk	746.313	731.061	788.264	768.290	772.289
3.	Rasio	1 : 84	1 : 83	1 : 89	1 : 83	1:95

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD 2018

3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun terakhir tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	1.200	965	263	638	797
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan (kasus)	1.200	965	263	638	797
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD 2018

4) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadam kebakaran dibagi jumlah penduduk kali 100. Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2013-2017 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran	4	4	5	12	13
2.	Jumlah penduduk	746.313	731.061	788.264	768.290	772.289
3.	Cakupan	0,000535	0,000547	0,000634	0,001519	0,00168

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)					

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, SIPD 2018

f. Sosial

1) Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.64.
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BASIS DATA TERPADU)	RTLH YANG DITANGANI				JUMLAH RTLH 2018
			2015	2016	2017	JUMLAH	
1	PARAKAN	1.492	116	60	43	219	1.273
2	KLEDUNG	1.376	17	3	50	70	1.306
3	BANSARI	1.452	40	114	209	363	1.089
4	BULU	2.483	126	87	165	378	2.105
5	TEMANGGUNG	804	19	49	42	110	694
6	TLOGOMULYO	1.086	27	59	129	215	871
7	TEMBARAK	1.401	17	47	42	106	1.295
8	SELOPAMPANG	933	48	61	28	137	796
9	KRANGGAN	1.171	61	17	24	102	1.069
10	PRINGSURAT	1.723	140	51	199	390	1.333
11	KALORAN	2.979	72	83	84	239	2.740
12	KANDANGAN	2.821	30	0	138	168	2.653
13	KEDU	1.115	327	7	11	345	770
14	NGADIREJO	4.104	36	171	114	321	3.783
15	JUMO	1.816	19	31	114	164	1.652
16	GEMAWANG	2.411	37	26	117	180	2.231
17	CANDIROTO	2.177	54	83	119	256	1.921
18	BEJEN	1.420	29	9	3	41	1.379
19	TRETEP	2.149	40	9	106	155	1.994
20	WONOBOYO	1.940	32	28	109	169	1.771
JUMLAH		36.853	1287	995	1846	4128	32.725

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2018

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (varabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 36.853 unit menjadi 32.725 unit.

Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 4.128 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

2) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 menurun menjadi 19,97%. Pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami kenaikan secara drastis menjadi 42,14% dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 42,22%. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara jelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	9.834	9.204	8.963	20.210	20.468
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	45.898	45.003	44.877	47.955	48.470
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan	21,43	20,45	19,97	42,14	42,22

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2. Layanan Umum Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Rasio Penduduk yang Bekerja

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Hingga tahun 2017, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 47,93 persen. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan

yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.

Selain industri pengolahan dan sektor perdagangan juga terlihat menunjukkan peran yang agak dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan adalah sebesar 13,78 persen, sedangkan sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 15,76 persen. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Temanggung khususnya industri mikro dan industri kecil (IMK) tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian karena sebagian besar IMK di Kabupaten Temanggung merupakan industri perajangan tembakau. Yang waktu produksinya bersifat musiman.

Tabel 2.66.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Temanggung, 2017

Status Pekerjaan Utama	2017
Berusaha sendiri	15.02
Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap	22.47
Berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap	2.47
Pekerja/Buruh/Karyawan	25.79
Pekerja bebas di pertanian	4.56
Pekerja bebas di non pertanian	6.11
Pekerja tak dibayar	23.57
Jumlah	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2018

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Status pekerjaan juga dapat digunakan untuk membedakan tenaga kerja formal dan informal. Status pekerjaan berusaha dibantu dengan buruh tetap dan buruh/karyawan dipakai sebagai proksi pekerja sektor formal sedangkan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar digunakan sebagai proksi pekerja sektor informal.

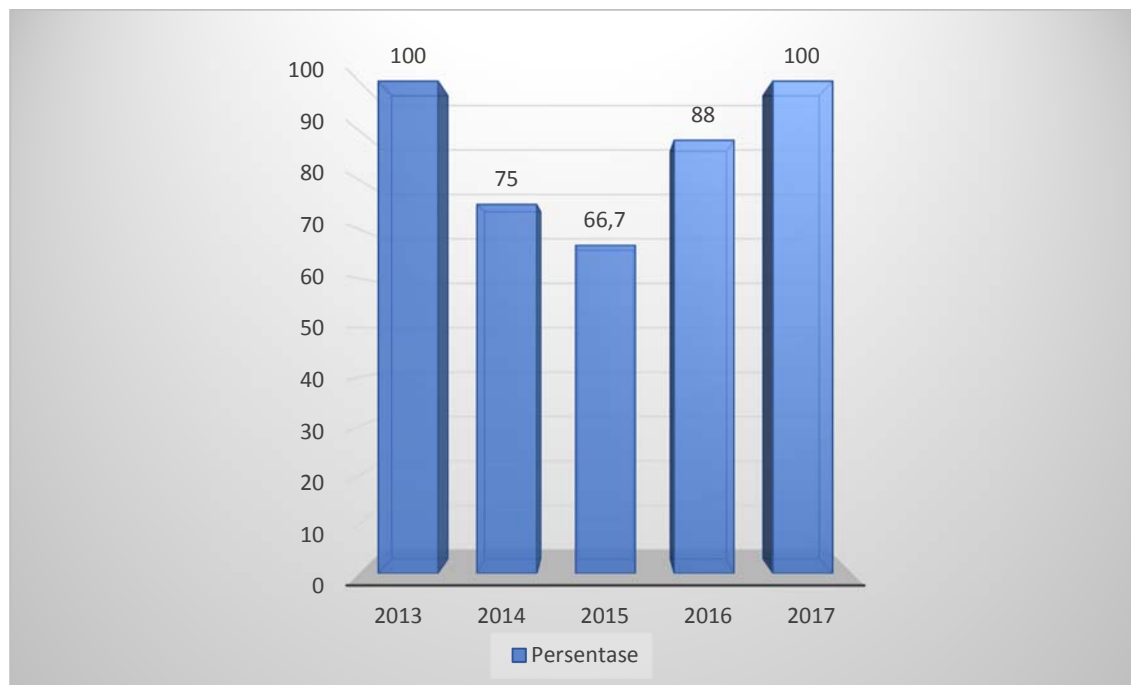
Jika dilihat dari status pekerjaannya, ternyata sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar yaitu mencapai

lebih dari 23 persen pada tahun 2017. Jika diperluas lagi, maka sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada sektor informal yaitu mencapai 71,73 persen pada tahun 2017. Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal.

2) **Persentase kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Temanggung antara tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak semuanya terselesaikan yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Secara rinci perkembangan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik.

Grafik 2.3.
Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

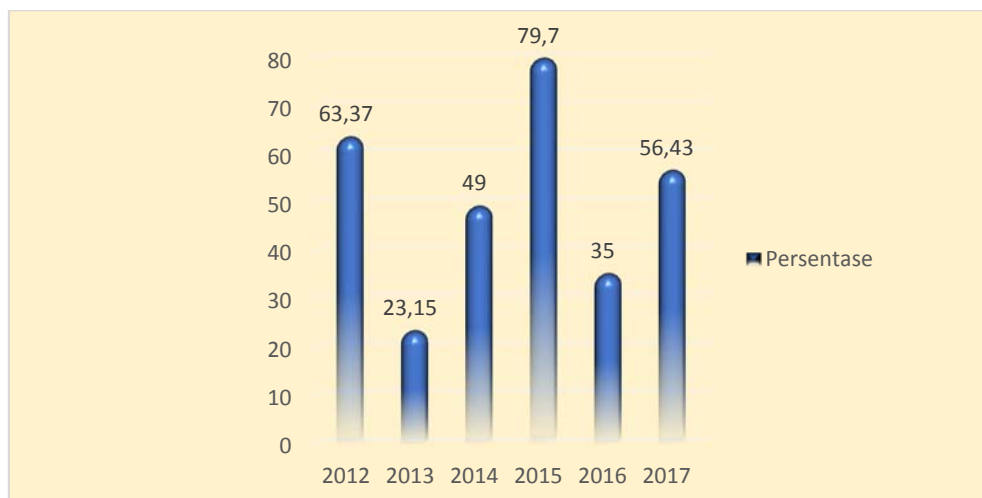


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) **Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang Ditempatkan**

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Secara jelas terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4.
 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
 di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

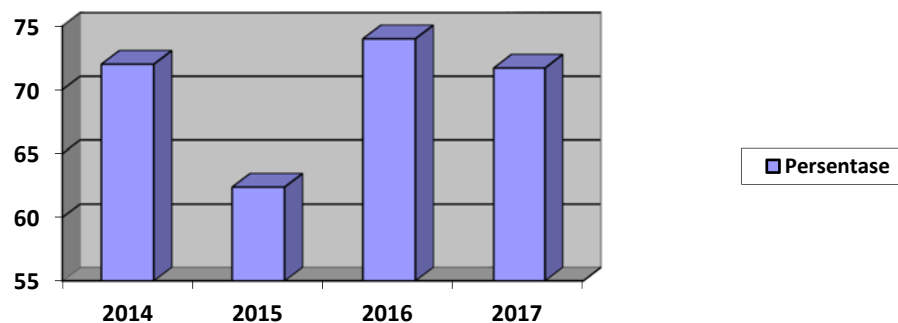


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS

Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2017 terlihat fluktuatif. Secara jelas terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5.
 Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

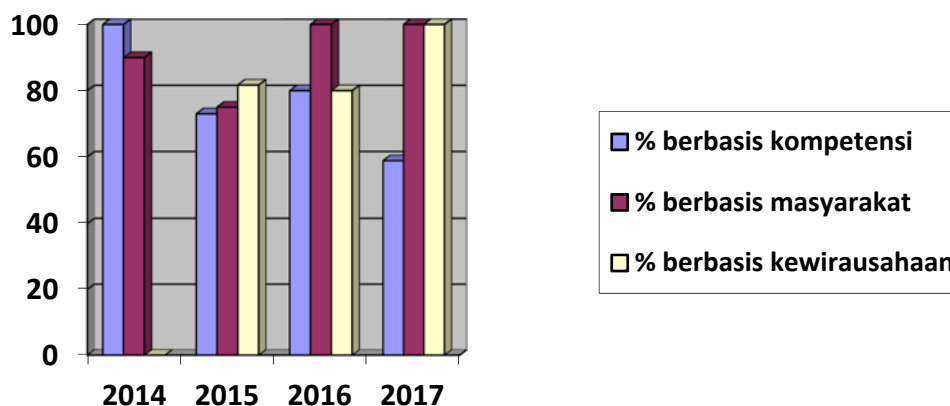
Sejak tahun 2013-2017 tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin bagus sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan suasana menjadi kondusif.

6) Persentase tenaga kerja yang dilatih berdasarkan basis pelatihan

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pelatihan tenaga kerja berdasarkan basis kompetensi terdiri

dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan/*off the job training*, penilaian di lembaga pelatihan, *on the job training*, penilaian di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi.

Grafik 2.6.
Persentase tenaga kerja yang dilatih berdasarkan basis pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

7) Rasio lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67.
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	12.006	13.804	14.902	15.964	16.274
2.	Jumlah penduduk	739.873	731.061	788.264	768.290	772.289
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 62	1 : 54	1 : 53	1 : 48	1:47
4	Persentase	1,62	1,84	1,89	2,07	2,10

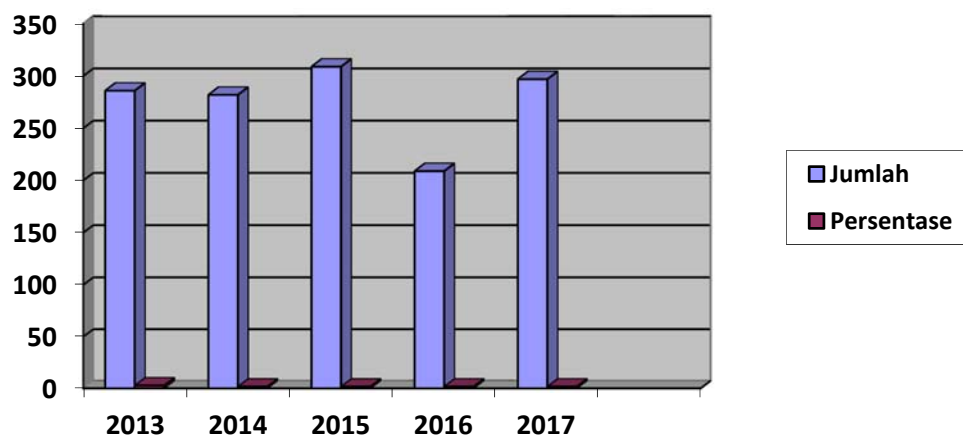
Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Secara jelas tercantum pada grafik berikut.

Grafik 2.7.
 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di
 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Partisipasi perempuan yang berkecimpung di dunia politik, terutama yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2013-2017 sebanyak 8 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 17,78% dan sejak tahun 2014 bertambah menjadi 14 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 31,11%. Hal ini sudah sesuai ketentuan bahwa unsur perempuan dalam partai politik minimal 25%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68.
 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

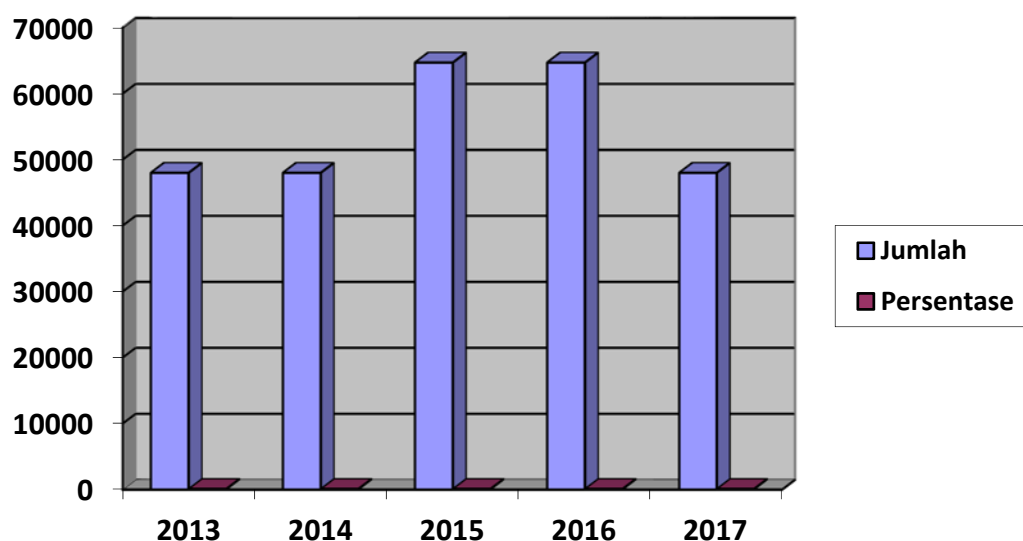
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	8	14	14	14	14
2	Jumlah kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45
3	Persentase perempuan yang menjadi menduduki kursi DPRD (%)	17,78	31,11	31,11	31,11	31,11

Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat dengan grafik berikut.

Grafik 2.8
 Persentase perempuan di lembaga swasta di
 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

4) Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.69.
 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	KDRT	89	63	35	39	43
2	Rumah Tangga	193.096	194.116	195.368	196.385	198.785
3	Rasio KDRT	1:2169	1:3081	1:5582	1:5036	1:4623

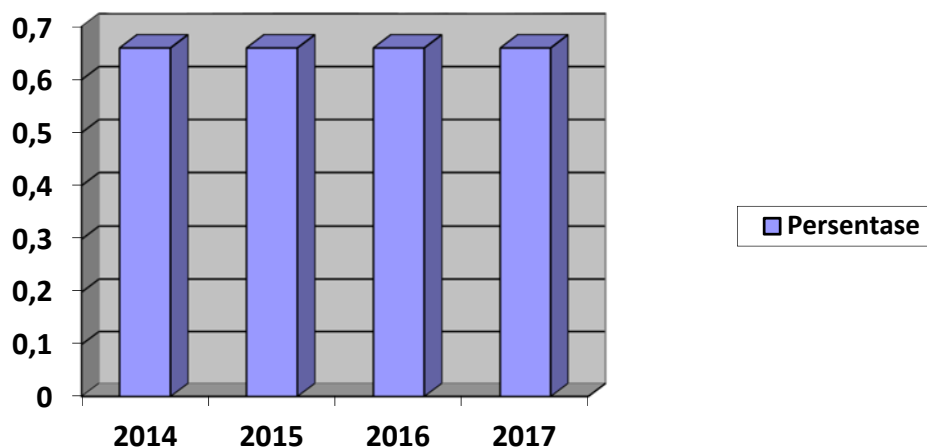
Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

Dari tabel 2.71, KDRT di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, pada tahun 2015 sebanyak 16 kejadian menjadi 15 kejadian pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan anak dan perempuan di keluarga.

5) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tenaga kerja dibawah umur adalah pekerja anak pada usia dibawah 15 tahun. Secara jelas persentase dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.8.
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2017



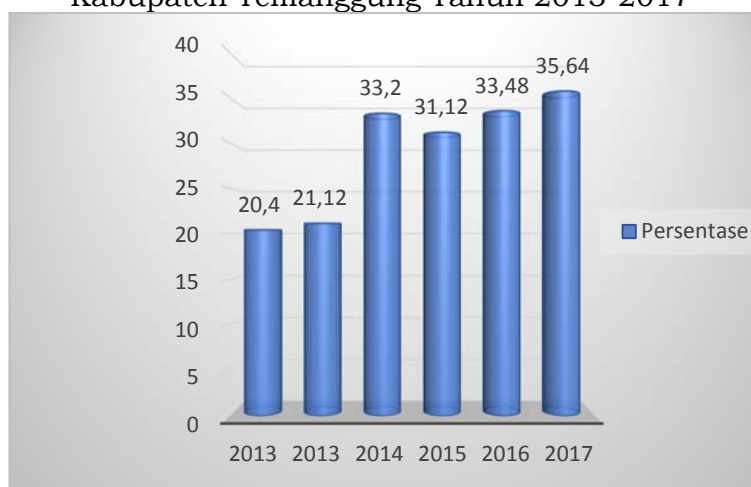
Sumber: BPPKBPPPA Kab.Temanggung, 2018

6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.9.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2013-2017 di Kabupaten Temanggung semua (100%) telah mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2013-2017 di Kabupaten Temanggung semua telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

9) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Temanggung, selama tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif, sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 2.10.

Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



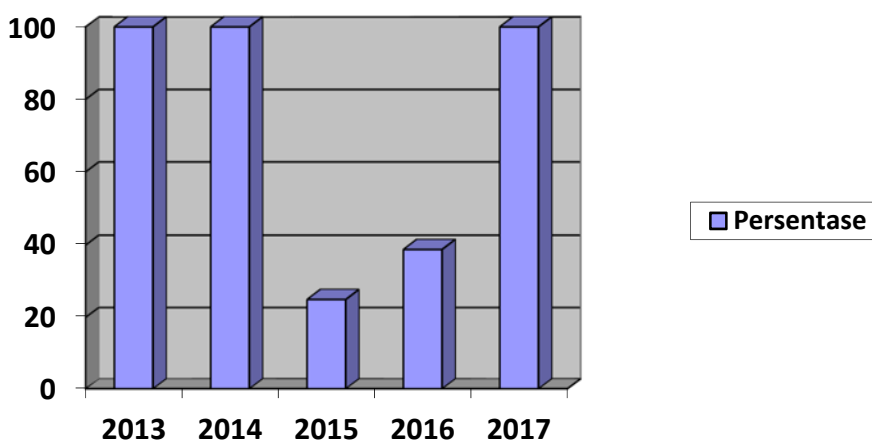
Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

10) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Banyaknya perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016 tidak semua perkara diputuskan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Grafik 2.11.

Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung, 2013-2017



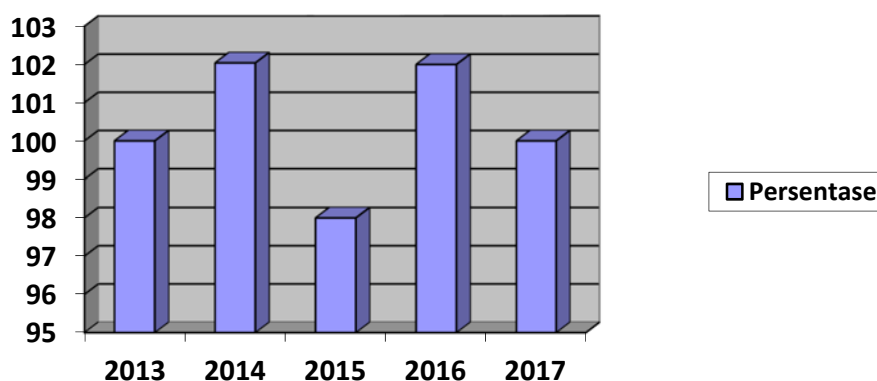
Sumber: BPPKBPPPA Kab.Temanggung, 2018

11) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 tidak semua korban mendapatkan layanan bantuan hukum.

Grafik 2.12.

Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

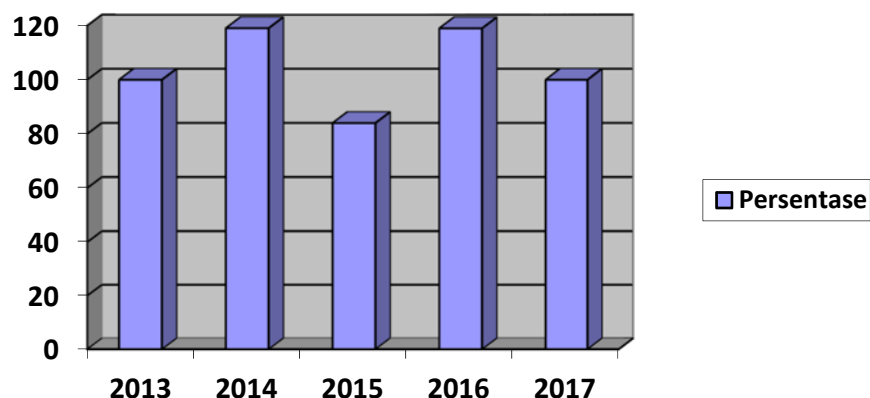


Sumber: BPPKBPPPA Kab.Temanggung, 2018

12) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang mendapatkan layanan pemulangan di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 tidak semua korban kekerasan mendapatkan layanan pemulangan.

Grafik 2.13.
Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

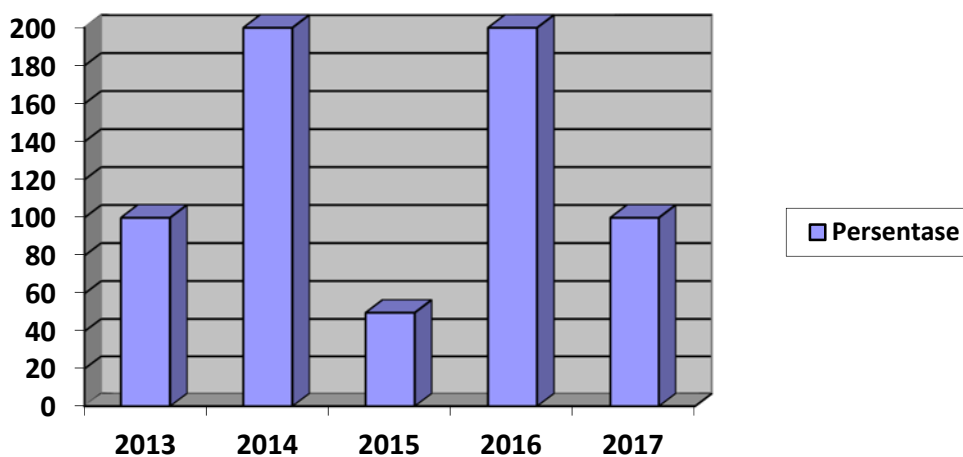


Sumber: BPPKBPPPA Kab.Temanggung, 2018

13) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 tidak semua korban mendapatkan layanan reintegrasi sosial.

Grafik 2.14.
Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



Sumber: SIPD Kab.Temanggung, 2018

c. Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk ,menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan didapat dari energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi dikali 100%.

Tabel 2.70.
Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Skor Pola Pangan Harapan	n.a	89,2	82,5	85,5	87,5

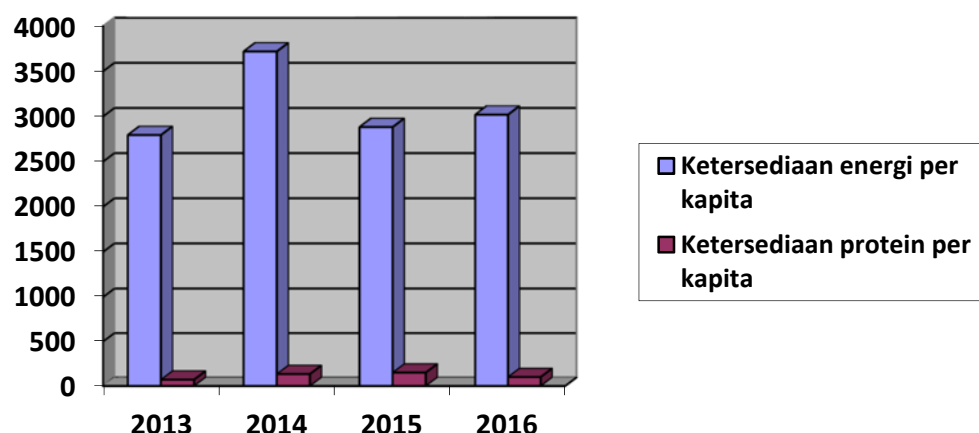
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2017

Berdasarkan tabel di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014-2017 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah yaitu 86,41, namun masih di bawah skor ideal yaitu 100. Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung.

2) Ketersediaan energi dan protein perkapita

Ketersediaan energi perkapita yaitu ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali BDD dibagi 100. Ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali BDD dibagi 100.

Grafik 2.15.
Ketersediaan Energi dan Protein per kapita
di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2016



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2018

3) Data Konsumsi dan Ketersediaan Energi

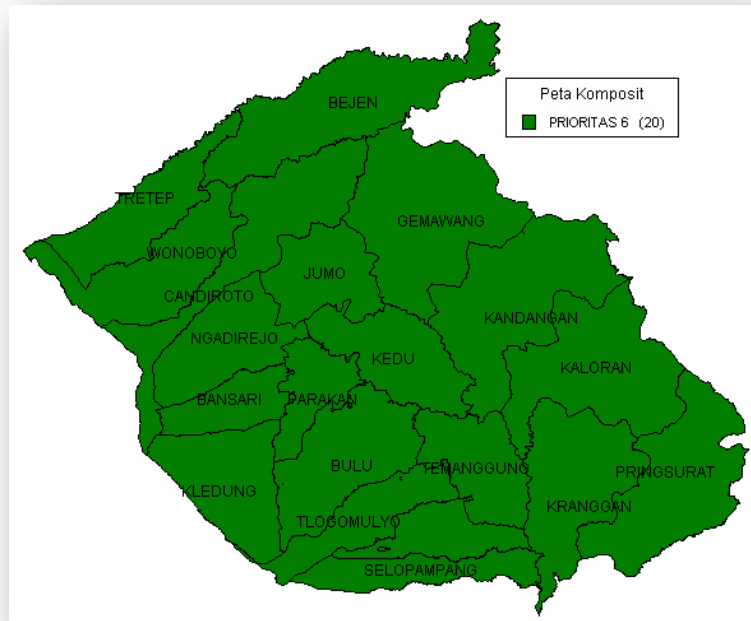
Tabel 2.71.
Tingkat Konsumsi Energi Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2017

Kelompok pangan	2014		2015		2016		2017	
	ketersediaan	konsumsi	ketersediaan	konsumsi	ketersediaan	konsumsi	ketersediaan	konsumsi
Padi-padian	2244	1034,2	2.218	1.080,1	2453	1121,6	2471	1035,3
TOTAL AKE	2716	2320,4	2.691	1828,1	3020	2011	3458	1943,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2018

Berdasarkan perbandingan antara tingkat konsumsi dan ketersediaan pangan dari kelompok pangan padi-padian selama tahun 2013-2017 pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa di tahun 2017 angka konsumsi padi-padian terhadap tingkat ketersediaanya mengalami penurunan yaitu mencapai angka 41.89%, dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 46.09% di tahun 2014, 48,70% di tahun 2015, dan 45,72% di tahun 2016.

Secara umum wilayah Kabupaten Temanggung tergolong aman dari ancaman kerawanan pangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2018

Gambar 2.4.

Peta Komposit Ketahanan Pangan Kab. Temanggung Tahun 2017

4) Produktivitas Ternak

Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Disamping itu, hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan.

Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak atau unitnya agaknya ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging-daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai komposisi daging atau persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh berat hidupnya. Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksi dagingnya.

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.72.
Produktivitas Ternak Tahun 2014-2017

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Sapi	165	167	169	173
2.	Kambing	13,13	13,50	13,50	13,53
3.	Domba	13,13	13,50	13,50	13,53

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Temanggung, 2018

Produktifitas ternak di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2017 terus meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada ternak sapi yang mencapai 173 kg/ekor pada Tahun 2017, sedangkan pada ternak kambing dan domba produktivitasnya relatif sama yakni sebesar 13,53 kg/ekor.

d. Pertanian

1) Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah lahan bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Jumlah Lahan Bersertifikat
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanah bersertifikat HGB (BPN)	4.189	6.923	6.029	6.193	6.917
2.	Tanah bersertifikat HGU (BPN)	11	17	11	11	11
3.	Tanah bersertifikat HM (BPN)	200.870	202.862	202.862	207.986	213.727
4.	Tanah bersertifikat Hak Pakai (BPN)	7.098	1.899	1.095	1.197	1.246
5.	Tanah bersertifikat Wakaf (BPPKAD)	271	n.a	n.a	429	n.a
6.	Total tanah sesuai SPPT (BPPKAD)	547.985	n.a.	558.031	526.569	n.a
7.	Tanah yang bersertifikat (BPN)	212.168	211.701	209.997	215.387	221.901
8.	Tanah milik Pemda (BPPKAD)	1.288	n.a.	n.a	23.713	n.a
9.	Tanah milik Pemda yang bersertifikat (BPPKAD)	977	n.a.	n.a	1.381	n.a

Sumber: SIPD Tahun 2018, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tanah milik Pemda ada sejumlah 23.713 , yang bersertifikat ada 1.381 atau 5,82%, dan yang belum bersertifikat sejumlah 22.332 memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

e. Lingkungan Hidup

1) Timbunan sampah yang ditangani

Tabel 2.74.
Timbunan sampah yang ditangani
Di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume timbunan sampah yang tertangani (KK)	10	11	12	15	15

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Persentase sampah yang berkurang melalui 3 R (bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll)

Yaitu jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R, dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Tabel 2.75.
Sampah yang tertangani melalui TPS 3R dan Bank Sampah
Di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sampah yang tertangani TPS 3R (%)	n.a	45,36	44,73	41,20	41,47
2	Sampah yang tertangani Bank Sampah (%)	n.a	8,72	10,53	11,76	13,26

Sumber : SIPD Tahun 2017 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2017

3) Persentase cakupan area pelayanan

Cakupan area pelayanan di Kabupaten Temanggung selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat.

Tabel 2.76.
Cakupan area pelayanan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas area pelayanan sampah (km ²)	435,125	478,64	522,15	652,69	652,69
2	Luas area Kabupaten Temanggung (km ²)	870,25				
3	Persentase	50	55	60	75	75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2017

4) Persentase jumlah sampah yang tertangani

Tabel 2.77.
Jumlah sampah yang tertangani
Di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	n.a	n.a	n.a	n.a	16.198,7
2	Total jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung (ton)	n.a	n.a	n.a	n.a	142.087,2
3	Persentase (%)	-	-	-	-	11,40

Sumber DLH Kabupaten Temanggung, SIPD Tahun 2018

5) Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Pengurangan sampah yang terangkut di TPA Kabupaten Temanggung selama tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 2.78.
Sampah Terangkut dan Timbulan Sampah
di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sampah terangkut	n.a	320,89	384,95	398,87	416,26
2	Timbulan sampah	n.a	1.478	1.490,9	1.536,59	1.544,6
3	Persentase	n.a	21,71	25,82	25,96	26,95

Sumber: SIPD Tahun 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Tidak semua penduduk Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 2013-2017, yang telah berusia lebih dari 17 tahun atau telah menikah sudah memiliki KTP, hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79.
Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP (jiwa)	554.890	567.046	576.722	585.997	592.650
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (jiwa)	563.578	577.583	590.213	602.266	611.847
3	Persentase (%)	98,46	98,18	97,72	97,30	96,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Temanggung, 2018

2) Persentase bayi berakte kelahiran

Banyaknya bayi di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013-2017, belum semuanya memiliki akte kelahiran, hal ini dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.80.
Persentase Bayi Berakte Kelahiran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah bayi berakte kelahiran (jiwa)	96.403	84.988	73.272	61.326	64.030
2	Jumlah bayi (jiwa)	101.178	89.378	77.290	64.886	68.045
3	Persentase (%)	95,28	95,09	94,80	94,52	94,10

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Persentase pasangan berakte nikah

Di Kabupaten Temanggung pada rentang tahun 2013-2017, tidak semua pasangan nikah mendaftarkan diri sebagai pasangan nikah dan memperoleh akta nikah di Dindikcapil, seperti tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.81.
Persentase Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah (jiwa)	186	281.125	288.073	308.718	303.534
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah (jiwa)	499.589	431.419	437.846	442.318	428.988
3	Persentase (%)	0,038	65,16	65,79	69,79	70,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Sejak tahun 2013-2017, penerbitan KTP ber-NIK di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, hal ini tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82.

Penerbitan KTP Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (jiwa)	616.766	562.220	578.640	585.184	526.032
2	Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa)	626.413	572.701	590.483	601.160	583.213
3	Persentase (%)	98,46	98,17	97,99	97,34	90,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.83.

Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penerbitan akta kelahiran(%)	95,28	95,08	94,8	94,51	94,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung 2018

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di pembangunan.

LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Temanggung 266 dan LPMK 23 buah.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait maupun program lainnya.

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga.

Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten. Jumlah kelompok binaan PKK berdasarkan data SIPD Tahun 2016 yaitu 1251 buah dengan jumlah yang aktif hanya 310 kelompok.

Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat.

3) Persentase LSM aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah LSM aktif	25	28	28	22	22
2	Jumlah LSM	25	42	42	45	45
3	Persentase	100	66,67	66,67	48,89	48,89

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Persentase LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di pembangunan. Adapun jumlah LPM berprestasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.85

LPM Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah LPM berprestasi	0	0	22	0	3
2	Jumlah LPM	289	24	289	289	20
3	Persentase (%)			7,61		15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung 2017

5) Persentase PKK aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya. Persentase PKK aktif dengan jumlah PKK yang ada di Kabupaten Temanggung tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.86.
PKK Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PKK Aktif	289	24	22	9.233	1.807
2	Jumlah PKK	289	144	289	12.317	1.807
3	Persentase (%)	100	16,67	7,61	74,96	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, SIPD Tahun 2018

6) Jumlah Posyandu

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Persentase posyandu aktif dengan jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.87.
Jumlah Posyandu Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	1.497	1.505	1.506	1.505	1.507

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88.
Angkat TFR Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate	n.a	n.a	n.a	2,1	2,1

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.89.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Akseptor KB	16.158	22.541	12.866	11.705	4.008
2	Jumlah Pasangan Usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
3	Rasio Akseptor KB (%)	11,21	15,24	9,26	8,12	2,79

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Tabel 2.90.
Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Peserta KB Aktif	113.432	111.498	115.282	119.019	118.402
2	Jumlah Pasangan Usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
3	Persentase	78,69	75,37	83,00	82,53	82,43

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (*unmet need*)

Tabel 2.91.
PUS yang istrinya dibawah 20 tahun dan yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (*unmet need*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasangan usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
2	Persentase PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>)	n.a	57,11	17,89	7,12	6,75

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

i. Perhubungan

1) Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal

Tabel. 2.92.
Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Penumpang Melalui Terminal Type B	n.a	16.646
2	Jumlah Penumpang Melalui Terminal Type C	n.a	16.646

Sumber: SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

j. Komunikasi dan Informatika

1) Desa Terhubung Internet

Jaringan internet desa merupakan fasilitas untuk mempermudah layanan informasi dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan adanya jaringan ini akan mempermudah dan memperlancar layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Infrastruktur jaringan sebagian didanai dana desa, sedangkan akses *bandwidth* nya didukung oleh pembiayaan dari APBD Kabupaten Temanggung. Desa terhubung internet di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.93.

Desa Terhubung Internet Tahun 2015-2017

Tahun	Desa terhubung internet			%
	jumlah desa	desa terhubung internet	total desa terhubung internet sampai tahun n	
2015	266	14	14	5,26
2016	266	34	48	18,05
2017	266	68	116	43,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2018

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.94.

Jumlah BPR/LKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah BPR	21	21	21	23	23
2	Jumlah BMT dan KJKS	9	9	9	16	16
3	LKM					
	a. Komisi Ekonomi Kecamatan	20	20	-	-	-
	b. UKM	12	12	12	38	38
	c. KUBE	101	101	101	286	286
	d. PUAP	281	281	281	281	281

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan BI data bulan November 2016

1. Penanaman Modal

1) Laju Investasi

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital

per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Laju investasi menunjukkan perkembangan investasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Laju Investasi 2014-2017

Tahun	Nilai Investasi (Rp. milyar.)	Laju Investasi (%)
2014	85,001	25,00
2015	124,679	47,00
2016	147,182	18,05
2017	164,650	11,87

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel 2.95, laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014 sampai 2017 cukup fluktuatif. Laju paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 47 %, kemudian melambat menjadi 18,05 % dan 11,87 % pada dua tahun terakhir.

2) Penyelesaian izin lokasi

Permohonan izin lokasi di Kabupaten Temanggung, dalam rentang waktu tahun 2013-2017, hanya terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak

1 (satu) permohonan, dan dapat diselesaikan oleh dinas terkait. Secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.96.
Penyelesaian izin lokasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ijin lokasi	1	0	0	0	0
2	Jumlah permohonan ijin lokasi	1	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	0	0	0	0

Sumber: SIPD Tahun 2017 DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

m. Kepemudaan dan Olahraga

1) Besaran Prestasi Olahraga

Besaran prestasi olahraga dapat dilihat berdasarkan jumlah perolehan medali pada tabel berikut.

Tabel 2.97.
Jumlah Perolehan Medali Ajang Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah medali yang diperoleh	117	245	208	157

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

2) Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan

Tabel 2.98.
Jumlah Prestasi Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah medali yang diperoleh	4	5	1	1
Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti	4	5	1	1

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

n. Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung oleh adanya data statistik sektoral yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data statistik kabupaten tertuang dalam daerah dalam angka, statistik ekonomi, statistik sosial dan lain sebagainya.

o. Persandian

Persandian merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam kondisi tertentu atau khusus. Data persandian hanya boleh diakses oleh petugas yang diberikan perintah khusus untuk menangani urusan persandian karena menyangkut rahasia negara maupun keadaan darurat.

p. Kebudayaan

1) Cakupan Fasilitas Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Cakupan fasilitas cagar budaya di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.
Cakupan Fasilitas Cagar Budaya
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah cagar budaya di Kab. Temanggung	47	47	47	47
Jumlah cagar budaya yang difasilitasi	1	1	1	1
Cakupan promosi cagar budaya (%)	2,13	2,13	2,13	2,13

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Cakupan Promosi Cagar Budaya

Tabel 2.100.
Cakupan Fasilitas Cagar Budaya
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah cagar budaya di Kab. Temanggung	47	47	47	47
Jumlah cagar budaya yang dipromosikan	10	10	20	20
Cakupan promosi cagar budaya (%)	21,28	21,28	42,55	42,55

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

q. Perpustakaan

1) Jumlah pengunjung dan jumlah peminjam buku perpustakaan

Jumlah pengunjung dan peminjam buku perpustakaan di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Jumlah Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah peminjam buku perpustakaan	289.085	298.409	418.116	458.500
Jumlah pengunjung perpustakaan	321.206	400.279	468.987	550.000

Sumber: Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018

r. Kearsipan

1) Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku

Jumlah perangkat daerah Kabupaten Temanggung yang mengelola arsip secara baku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102.
Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah SKPD yang melaksanakan arsip secara baku	57	57	54	55
Jumlah SKPD	57	57	57	55
Persentase	100	100	98,96	100

Sumber: Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3. Layanan Umum Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Perkembangan sektor perikanan dapat dilihat dari perkembangan empat hal, yaitu kolam air tenang, sawah/mina padi, perairan umum, dan unit pembenihan rakyat yang dapat dilihat di tabel 2.103.

Tabel 2.103.
Perkembangan Sektor Perikanan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kolam air tenang					
	- Luas areal (ha)	119,29	120,25	120,29	121,85	124,69
	- Produksi ikan nila (ton)	414,71	519,59	619,06	837,35	1.486,90
	- Produksi ikan lele (ton)	1.513,49	1.946,59	2.182,97	2.826,45	3.170,31
2.	- Produksi ikan gurami (ton)	3,93	3,94	3,25	54,14	n.a
	- Produksi ikan mas (ton)	342,26	364,15	n.a	n.a	813,620
	- Produksi ikan patin (ton)	4,16	n.a.	n.a	n.a	n.a

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Produksi ikan lainnya (ton)	23,59	25,65	29,33	32,99	140,28
	- Nilai produksi (juta)	54.037,84	45.691,21	63.957,99	66.212,688	125.634,10
3.	Sawah/mina padi					
	- Luas areal (ha)	3.127,80	3.190,39	1.351,2	3.251,2	3.402,54
	- Produksi ikan mas (ton)	1.152,26	1.323,42	1.182,99	1.777,698	1.184,18
	- Produksi ikan nila (ton)	270,96	445,09	788,65	1.185,124	2.199,20
	- Nilai produksi (juta)	28.532,80	42.451,77	46.925,05	51.509,016	97.145,74
4.	Perairan Umum					
	- Luas areal (ha)	21.456	21.506	21.506	21.506	21,51
	- Produksi (ton)	181,92	239,01	299.534	427.278	477,39
	- Nilai produksi (juta)	3.755,70	5.482,15	10.255,87	14.313,09	17.207,82
5.	Unit Pembenihan Rakyat					
	- Jumlah (unit)	275	275	267	267	310
	- Produksi usaha (juta ekor)	68,90	78.038,998	84.019,82	89.853,32	104.840,50
	- Nilai produksi (juta)	12.890,50	16.830,69	12.602,97	23.092,30	26.944,01
	Produksi ikan hias (ekor)	702.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Pariwisata

1) Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, antara lain Pikatan water park dan Posong. Tempat wisata yang baru berkembang dan mampu menarik wisatawan berkunjung adalah tempat wisata berbasis alam, antara lain Sedengkeng, Sedhadap, Watu Layah, Watu Angkrik, beraneka Curug, dan beraneka Embung. Salah satu cagar budaya yang menarik wisatawan adalah Situs Liyangan.

Perkembangan jumlah dan lama kunjungan wisatawan tahun 2013-2017 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.104.

Perkembangan Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	wisatawan manca negara (jiwa)	155	435	364	107
2.	wisatawan domestik (jiwa)	338.781	395.717	428.381	491.037
3.	Lama kunjungan wisatawan	1	1	1	1

Sumber: Dinbudpar Kab.Temanggung, 2018

c. Pertanian

1) Produktifitas Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan Kabupaten Temanggung terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanaman yaitu tanaman padi sawah, tanaman padi ladang, tanaman jagung, tanaman kacang kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, dan tanaman ubi jalar.

Tabel 2.105.
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanaman Padi Sawah					
	- Luas tanam (ha)	26.618	25.375	21.689	30.667,2	31.779,0
	- Luas panen (ha)	25.678	26.175	25.403	30.667,0	31.553,0
	- Produktivitas (Kw/ha)	60	60,43	64,31	69,41	60,59
2.	Tanaman Padi Ladang					
	- Luas tanam (ha)	1.465	25	0	0	14970
	- Luas panen (ha)	852	891	0	0	2177
	- Produktivitas (Kw/ha)	37,15	38,80	0	0	55
3.	Tanaman Jagung					
	- Luas tanam (ha)	23.839	21.450	15.355	17.390,8	24.291,6
	- Luas panen (ha)	22.331	22.865	19.190	20.803,4	20.825,3
	- Produktivitas (Kw/ha)	49,82	45,72	42,81	49,70	44,54
4.	Tanaman Kacang Kedelai					
	- Luas tanam (ha)	4	n.a.	8	2,8	0
	- Luas panen (ha)	2	1	8	7,8	0
	- Produktivitas (Kw/ha)	21	22,92	22,67	20,51	0
5.	Tanaman Kacang Tanah					
	- Luas tanam (ha)	388	269	294	347	73
	- Luas panen (ha)	440	210	341	300,8	83
	- Produktivitas (Kw/ha)	15,35	13,38	15,23	17,02	6
6.	Tanaman Ubi Kayu					
	- Luas tanam (ha)	1.712	2.288	921	765,6	185
	- Luas panen (ha)	2.461	1.739	1.970	1.352,6	484
	- Produktivitas (Kw/ha)	257,35	302,69	242,58	321,6	346
7.	Tanaman Ubi Jalar					
	- Luas tanam (ha)	251	199	197	283,1	50,8
	- Luas panen (ha)	280	251	219	129,5	10,7
	- Produktivitas (Kw/ha)	143,9	172,26	200,85	248,58	220

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2018

2) Produktifitas Tanaman Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan dapat dilihat dari beberapa komoditas diantaranya: tanaman teh, tanaman kopi robusta, tanaman kopi robusta, dan tanaman tembakau.

Tabel 2.106.
Produktifitas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cengkeh					
	- Luas panen (ha)	1.308,06	1.391,31	1.347,04	1.740,42	869,96
	- Jumlah produksi (ton)	163,11	224,6	185,53	333,6	145,91
	- Produktivitas (ton/ha)	0,12	0,16	0,14	0,19	0,17
2.	Tanaman Kopi Robusta					
	- Luas tanam menghasilkan (ha)	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.218,25
	- Luas tanaman (ha)	9.304,47	9.304,47	9.561,55	9.304,47	9.337,41
	- Jumlah produksi (ton)	7.388,79	10.254,33	7.536,49	10.254,33	3912,48
	- Produktivitas (ton/ha)	0,90	1,25	0,924	1,26	0,48
3.	Tanaman Kopi Arabika					
	- Luas tanam menghasilkan (ha)	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.378,57	1.381,82
	- Luas Tanaman (ha)	1.463,93	1.743,93	1.840,30	1.463,93	2.133,64
	- Jumlah Produksi (ton)	1.027,11	1.405,96	1.109,42	1.305,96	731,81
	- Produktivitas (ton/ha)	0,74	0,94	0,805	0,95	0,52
4.	Tanaman Tembakau					
	- Luas panen (ha)	14.517,00	12.587,00	18.248	16.821	16.058
	- Luas tanam (ha)	14.948,00	15.730,00	19.209	17.021	16.093
	- Jumlah produksi (ton)	7.146,12	6.922,92	10.581,3	6.041,25	99048,73
	- Produktivitas (ton/ha)	0,49	0,55	0,58	0,53	0,62

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2018

3) Populasi dan Produksi Ternak

Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Disamping itu, hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak atau unitnya agaknya ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging-daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai komposisi daging atau persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh berat hidupnya. Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksi dagingnya.

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107.
Produktivitas Ternak Tahun 2013-2017

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi	165	165	167	169	173
2.	Kambing	13	13,13	13,50	13,50	13,53
3.	Domba	13,30	13,13	13,50	13,50	13,53

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Temanggung, 2018

Produktifitas ternak di Kabupaten Temanggung tahu 2013-2017 terus meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada ternak sapi yang mencapai 173 kg/ekor pada Tahun 2017, sedangkan pada ternak kambing dan domba produktivitasnya relatif sama yakni sebesar 13,53 kg/ekor.

Populasi ternak unggas di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada masing-masing jenis unggas.

Tabel. 2.108.
Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	Ayam Buras (ekor)	Ayam Petelur (ekor)	Itik (ekor)	Entok (ekor)	Burung Puyuh (ekor)	Angsa (ekor)
2013	1.659.835	680.025	101.942	24.900	51.255	18.652
2014	1.862.390	681.506	102.147	24.950	51.357	18.743
2015	1.881.012	682.689	102.190	24.981	51.501	18.743
2016	1.884.774	684.233	102.404	25.033	51.603	18.781
2017	1.891.843	686.801	102.789	n.a	51.798	18.852

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2018

Produksi Daging ternak besar dan kecil di tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya namun produksi daging unggas mengalami peningkatan 59% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena permintaan daging unggas yang semakin besar sebagai substitusi/pengganti daging ternak besar dan ternak kecil yang harganya dirasa lebih mahal. Produksi telur meningkat dari tahun sebelumnya baik telur ayam ras, telur ayam kampung, telur itik maupun telur puyuh mengikuti pertambahan permintaan masyarakat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produksi susu sapi juga mengalami peningkatan meski hanya 1,5%.

Tabel 2.109.
Jumlah Produksi Daging, Telur, dan Susu Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Daging (Kg)			Telur (butir)				Susu (liter)
	Ternak Besar	Ternak Kecil	Unggas	Ayam ras	Ayam kampung	Itik	Puyuh	
2013	648.650	314.705	8.500.000	75.482.775	23.237.690	8.563.129	6.458.130	737.688
2014	651.504	314.106	9.027.975	76.165.312	26.073.460	8.573.124	6.470.982	231.000
2015	589.176	298.359	5.748.110	76.966.165	24.829.374	8.584.171	7.947.942	234.156
2016	633.934	351.228	4.418.160	124.578.666	24.879.030	8.601.311	7.695.544	223.200
2017	615.498	280.598	7.028.828	125.201.528	25.003.425	8.644.310	7.724.325	226.575

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

d. Kehutanan

Kabupaten Temanggung memiliki hutan negara/rakyat seluas 8.399 Ha. Hutan negara/rakyat merupakan hutan produksi yang menghasilkan

kayu. Selain sebagai hutan produksi juga sebagai kawasan konservasi, yang berfungsi untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2016, Urusan Pemerintah Kehutanan beralih kewenangan dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah pertambangan, namun ada beberapa lokasi yang sebagian masyarakat melakukan penambangan pasir tanpa ijin. Beberapa lokasi sudah ditutup oleh pemerintah daerah dan tanahnya dibeli pemda untuk dilaksanakan reklamasi. Lokasi bekas penambangan pasir di Desa Kledung saat ini menjadi lokasi Rest Area. Ada salah satu lokasi penambangan pasir tanpa ijin yang juga sudah dibeli pemda dan dinyatakan sebagai lokasi cagar budaya yaitu Situs Liyangan di Desa Purbasari Kecamatan Ngadirejo.

1) Jumlah SPBU dan SPBE

Jumlah SPBU dan SPBE di Kabupaten Temanggung secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.110.
Nama dan Alamat SPBU – SPBE
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Uraian
1	Nomor dan Alamat SPBU
1.1	Nomor : 44.562.01, di Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo
1.2	Nomor : 44.562.02, di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat
1.3	Nomor : 44.562.03, di Desa Candimulyo Kecamatan Kedu
1.4	Nomor : 44.562.04, di Jalan Suwandi Suwardi Kecamatan Temanggung
1.5	Nomor : 44.562.05, di Jalan Raya Kedu Parakan Kecamatan Kedu
1.6	Nomor : 44.562.06, di Desa Bengkal Kecamatan Kranggan
1.7	Nomor : 44.562.07, di Desa Caturanom Kecamatan Parakan
1.8	Nomor : 44.562.08, di Desa Danupayan Kecamatan Bulu
1.9	Nomor : 44.562.09, di Desa Candiroto Kecamatan Candiroto
1.10	Nomor : 44.562.10, di Desa Manden Kecamatan Parakan
1.11	Nomor : 44.562.11, di Desa Kledung Kecamatan Kledung
1.12	Nomor : 44.562.12, di Jalan Tembus Kranggan Pringsurat Desa Nguwet Kecamatan Kranggan
1.13	Nomor : 44.562.13, di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Manding
1.14	Nomor : 44.562.14, di Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo
2	Nama dan Alamat SPBE
2.1	PT. Usaha Dua Sahabat, di Jalan Raya Kranggan-Pringsurat
2.2	PT. Mitra Manunggal Perkasa, di Jalan Raya Kedu-Parakan (Mojotengah Kedu)

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung, 2018

f. Perdagangan

1) Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Temanggung didukung dengan sarana prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.130.

Tabel 2.111.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Kecamatan	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	
1	Parakan	2	1	0	0	0	0	0	1	4
2	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bulu	0	1	0	0	0	0	0	1	2
5	Temanggung	1	1	1	0	0	0	0	0	3
6	Tlogomulyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Tembarak	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Selopampang	0	1	0	1	0	0	0	0	2
9	Kranggan	1	1	0	1	0	0	0	0	3
10	Pringsurat	1	1	1	2	1	1	0	0	6
11	Kaloran	0	4	0	1	0	0	0	0	5
12	Kandangan	0	4	0	1	0	0	0	0	5
13	Kedu	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Ngadirejo	1	0	1	0	0	0	0	0	2
15	Jumo	0	1	0	1	0	0	0	0	2
16	Gemawang	0	2	0	1	0	0	0	0	3
17	Candiroto	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Bejen	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	Tretep	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Wonobojo	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Jumlah	7	24	3	8	0	1	0	2	45

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Temanggung, 2018

g. Perindustrian

1) Kondisi Industri Mikro/Kecil, Menengah dan Besar

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.112.
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Kriteria	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Mikro dan Kecil					
- Unit kerja (unit)	15.731	15.725	15.848	15.848	15.848
- Tenaga Kerja (orang)	64.940	56.480	58.230	58.230	58.230
- Nilai produksi(juta rupiah)	862.585	862.965	880.224	880.235	880.235

Kriteria	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Menengah					
- Unit kerja (unit)	47	50	53	54	54
- Tenaga Kerja (orang)	1.995	4.415	4.675	4.774	4.774
- Nilai Produksi (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Industri Besar					
- Unit kerja (unit)	30	38	38	38	38
- Tenaga Kerja (orang)	12.993	23.902	24.405	24.405	24.405
- Nilai produksi (juta rupiah)	2.815.257	2.138.079	2.180.841	2.180.855	2.180.855

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
	INDUSTRI PANGAN				
1	Pemotongan hewan (ayam)	26	137	191,10	4.458,09
2	Pengolahan buah (dalam botol)	32	102	50,23	969,15
3	Pisang aroma	17	163	744,74	3.217,58
4	Jahe instan	4	16	21,84	334,50
5	Susu segar	1	24	2.928,45	1.827,54
6	Susu kedelai	5	16	764,40	55,38
7	Pembersihan kopi	992	3.172	1.260	6.922,50
8	Tepung jagung	5	21	256,62	886,08
9	Tepung tapioca	17	79	309,04	830,70
10	Ransum pakan ternak	4	37	1.504,78	3.655,08
11	Roti dan sejenisnya	74	337	589,68	6.534,84
12	Gula aren	1.273	2.599	709,80	8.583,90
13	Glukosa	1	14	147,42	387,66
14	Sirup	1	16	23.041,20	199,37
15	Mie	1	8	294,84	703,33
16	Pembungkus teh	12	12	0,00	33,23
17	Kopi bubuk	151	345	65,52	4.984,20
18	Es	24	58	76,44	332,28
19	Kecap	7	38	521,98	1.329,12
20	Tempe	511	937	4.641,00	17.500,08
21	Tahu	114	482	5.219,76	14.620,32
22	Kedele goreng	4	17	26,21	127,37
23	Kacang telur	13	33	38,22	276,90
24	Kerupuk dan sejenisnya	1.942	6.237	10.319,29	34.986,87
25	Tape ketela	42	54	69,45	82,18

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
26	Kue basah	497	1.967	1.099,64	10.331,69
27	Makanan lain (jamur dan madu)	8	25	40,51	763,14
28	Air minum dalam kemasan	6	166	868.140	7.713,55
29	Rokok cerutu	1	50	6,37	1.995,90
30	Cengkeh rajangan	3	12	9,26	146,76
31	Pengeringan dan pengolahan tembakau	3.530	25.947	15.047,76	3.152,34
	INDUSTRI SANDANG				
1	Rajutan	182	254	17.474,10	293,51
2	Kasur dan bantal	20	45	926,02	91,58
3	Pakaian jadi	145	393	6.713,62	1.702,38
4	Batik	8	23	2.372,92	666,86
5	Pakaian kesenian	5	18	13.890,24	821,84
6	Training pack	11	38	13.890,24	334,61
7	Masker, kain pel, dan lain-lain	8	23	38.198,16	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	694,51	93,92
9	Barang dari kulit	2	7	717,66	88,05
10	Alas kaki/sepatu	2	7	779,10	23,48
	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN				
1	Ubi kayu	1	3.016	73.968,84	584.622,56
2	Panel kayu/Balken/papan	29	7.113	98.033,68	745.525,56
3	Moulding dan bahan bangunan	445	2.945	722.044,44	21.133,01
4	Percetakan	19	92	587.028,00	2.465,52
5	Foto copy	21	50	3.522,17	352,22
6	Cetak film	8	17	176,11	704,43
7	Pupuk alam	13	491	270,03	76.313,64
8	Sabun	3	10	39,92	8,22
9	Vulkanisir ban	6	17	938,81	110,55
10	Minyak atsiri	3	10	5,52	105,02
11	Kemasan plastik	1	63	773.136,00	950,75
12	Tas plastik	47	136	37.552,32	93,97
13	Daur ulang plastik	3	39	254,03	276,38
14	Batu bata	340	1.232	19.880.640	4.698,46
15	Genteng	593	1.911	16.567.200	8.015,02
16	Gips	9	42	7.179,12	232,16
17	Barang dari semen	9	35	29.820,96	773,86
18	Furnitur kayu	139	361	55.224	6.412,02
19	Furnitur cat duco	15	103	5.522,40	6.190,91
20	Furnitur bambu	4	17	132,54	99,50

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA					
1	Teralis besi	32	49	974,69	1.128,69
2	Las	79	130	260,29	464,76
3	Pande besi	2	15	1384,50	42,05
4	Mesin perajang tembakau	17	74	830,70	2.257,38
5	Alat perajang tembakau	19	51	863,93	55,33
6	Penetas telur	3	27	310,13	420,49
7	Furnitur logam	2	6	609,18	16,60
8	Daur ulang timah bekas aki	2	8	642,41	221,31
9	Pemeliharaan dan reparasi mobil	42	256	3.212,04	3.485,66
10	Pemeliharaan dan reparasi spd motor	48	76	97.468,80	3.430,34
11	Reparasi elektronika	16	30	11.629,80	88,52
12	Perakitan antenna	1	2	99,68	165,36
KERAJINAN					
1	Bordir	14	13	8.528,52	90,57
2	Anyaman bambu/ keranjang tembakau	3.703	10.777	2.066.227,80	16.567,20
3	Kerajinan bamboo	6	10	8.307,00	231,94
4	Kuda lumping	6	27	2.436,72	237,46
5	Anyaman lidi	158	481	10.079,16	353,43
6	Anyaman pelepah pisang	268	568	7.531,68	314,78
7	Anyaman mendong	6	27	13.955,76	71,79
8	Kerajinan kayu/ patung	19	31	62.911,68	143,58
9	Alat dapur dari bambu	373	1.066	1.728.742,08	684,78
10	Bedug	2	11	99,68	419,70
11	Tangkai cangkul	6	16	3.322,80	33,13
12	Terompah kayu	39	103	18.105,00	86,15
13	Alat jemur bambu	16	43	10.909,86	110,45
14	Gerabah tanah	173	323	67.342,08	121,49
15	Relief tembaga	7	104	8.528,52	5.522,40
16	Gamelan tradisional	1	2	0,00	-
17	Alat musik	2	15	24.367,20	77,31
18	Alat olahraga	1	2	7.587,06	61,85
19	Mainan anak	5	40	33.781,80	2.153,74
20	Radio kayu dan alat fungsional	1	37	6.419,82	3.279,46
21	Sapu ijuk	288	672	51.038,21	828,36
INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN					
1	Laminating, bare core, veneer, dll	32	15.326	903.699,32	4.022.593,95

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

h. Transmigrasi

1) Jumlah Transmigran

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang melaksanakan transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.
Jumlah Transmigran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah transmigran (KK)	12	4	5	15	4

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2017

Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut lebih disebabkan oleh kuota KK Transmigrasi untuk Kabupaten Temanggung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun.

2) Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan terhadap Animo Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang melaksanakan transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115.
Jumlah Transmigran dan Animo Transmigrasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Kuota Transmigran (KK)	Pemberangkatan Transmigran (KK)	Animo (KK)	% Transmigran yang diberangkatkan terhadap animo transmigrasi
1	2017	5	5	36	13,88
2	2016	15	15	46	32,60
3	2015	0	0	29	0
4	2014	4	4	20	20,00
5	2013	12	12	12	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2018

Persentase pemberangkatan transmigran terhadap animo transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama 5(lima) tahun cenderung meningkat. Namun, jumlah kuota transmigrasi yang bisa diberangkatkan cenderung menurun, faktor ini disebabkan karena

jumlah kuota transmigrasi ditentukan oleh Kementerian Transmigrasi dan kuota KK Transmigrasi untuk Kabupaten Temanggung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun.













B. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar



















a. Pendidikan




















Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pendidikan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 78 (tujuh puluh delapan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.







Tabel 2.116.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pendidikan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	100	86,92	86,92	
		Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	%	50	40,05	80,11	
2	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik yang disiplin	%	100	99,62	99,62	
3	Program manajemen pelayanan Pendidikan	Persentase angka kenakalan siswa	%	5,83	8,37	100	
4	Program pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	69,13	73,85	100	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32,56	38,21	100	
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	%	48,76	49,04	100	
		Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	%	49,17	49,02	99,70	
		Rasio siswa per kelas TK	Rasio	21	21,06	100	
5	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase APK SD Sederajat	%	103,70	112	100	
		Persentase APM SD Sederajat	%	95,57	98	100	
		Persentase APK SMP Sederajat	%	96,15	96,15	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase APM SMP Sederajat	%	83,81	87	100	
		Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	100,00	97	97,49	
		Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar	%	48,69	48	99,02	
		Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Angka	21,16	21	98,31	
		Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Angka	32,00	31	96,17	
		Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	74,42	61	81,55	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	99,52	100	100	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	99,40	100	100	
6	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	99,17	98,48	99,30	
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	6,54	90,96	
		Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah	%	100	100	100	
7	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase TK/RA Terakreditasi A	%	5,83	8,37	100	
		Persentase TK/RA Terakreditasi B	%	42,71	43,19	100	
		Persentase TK/RA Terakreditasi C	%	42,29	37,16	100	
8	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase SD/MI Terakreditasi A	%	4,67	10,40	100	
		Persentase SD/MI Terakreditasi B	%	61,01	81,80	100	
		Persentase SD/MI Terakreditasi C	%	33,22	6,07	100	
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	%	31,40	46,73	100	
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi B	%	40,00	42,99	100	
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi C	%	27,62	6,54	100	
		Persentase Angka Lulusan SD/MI	%	100,00	100	100	
		Persentase Angka Lulusan SMP/MTs	%	100,00	100	100	
		Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata	%	73,39	79,11	100	




No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Ujian Nasional \geq 7,00					
		Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional \geq 7,00	%	21,28	23,05	100	
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA	%	94,87	98	100	
Angka Putus Sekolah SD/MI		%	0,13	0	100		
Angka Putus Sekolah SMP/MTs		%	0,34	0	100		
10	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100	100	
		Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan.	%	75,30	69,01	91,65	
11	Program pendidikan nonformal	Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92,56	92,87	100	
12	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	Rasio	1:14	1:13,89	100	
		Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	Rasio	1:14	1:14,30	100	
		Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	Rasio	1:15	1:15,16	100	
13	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	45,22	63,65	100	
		Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	71,66	87,98	100	
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83,59	90,14	100	
		Cakupan ketersediaan guru SD/MI.	%	95,00	90,12	94,86	
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per Satuan mata pelajaran.	%	84,50	68,22	80,73	
		Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	89,00	84,92	95,42	
		Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs.	%	82,50	81,31	98,56	
14	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga	Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,	%	74,50	68,22	91,58	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	kependidikan	Bahasa Inggris dan PKn.					
		Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.	%	89,00	89,25	100	
		Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs	%	98,00	93,46	95,37	
		Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.	%	95,92	97,96	100	
15	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik	%	3,73	32,49	100	
		Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	%	31,40	37,72	100	
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	%	50,69	60,05	100	
16	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	181	100	
		Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	20	15	75	
		Rasio Pengawas Sekolah	Rasio	1:17	1:15,96	100	
		Besaran Pamong Belajar	Orang	6	1	16,67	
17	Program Pendidikan anak usia dini	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	88,79	89,05	100	
		Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	87,47	87,16	99,65	
		Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	29,22	30,74	100	
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	88,75	87,16	98,21	
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	87,47	87,16	99,65	
18	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	%	93,48	87	93,12	
		Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik	%	93,23	89	95,31	
		Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	70,49	69	98,10	
		Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	80,94	80	99,30	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	100	100	
		Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	88,45	89	100	
19	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	81,42	82	100	
20	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Cakupan Ketersediaan Ruang Guru	%	100,00	100	100	
21	Program pendidikan nonformal	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	82,60	80,12	97	
		Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	85,45	83,04	97,18	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pendidikan sampai Tahun 2017 adalah:

- a. 49 (empat puluh sembilan) indikator telah tercapai, yaitu:
 1. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun);
 2. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun);
 3. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun);
 4. Rasio siswa per kelas TK;
 5. Persentase APK SD Sederajat;
 6. Persentase APM SD Sederajat;
 7. Persentase APK SMP Sederajat;
 8. Persentase APM SMP Sederajat;
 9. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun

10. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun
11. Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Persentase TK/RA Terakreditasi A
13. Persentase TK/RA Terakreditasi B
14. Persentase TK/RA Terakreditasi C
15. Persentase SD/MI Terakreditasi A
16. Persentase SD/MI Terakreditasi B
17. Persentase SD/MI Terakreditasi C
18. Persentase SMP/MTs Terakreditasi A
19. Persentase SMP/MTs Terakreditasi B
20. Persentase SMP/MTs Terakreditasi C
21. Persentase Angka Lulusan SD/MI
22. Persentase Angka Lulusan SMP/MTs
23. Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq 7,00$
24. Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional $\geq 7,00$
25. Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA
26. Angka Putus Sekolah SD/MI
27. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
28. Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
29. Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan
30. Rasio Siswa per Pendidik TK/RA
31. Rasio Siswa per Pendidik SD/MI
32. Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs
33. Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik
34. Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik
35. Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik
36. Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.
37. Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.
38. Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik
39. Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik
40. Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik
41. Besaran Pegawai Administrasi Sekolah
42. Rasio Pengawas Sekolah
43. Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang

kondisinya baik

44. Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putuswe
 45. Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI 3 km dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
 46. Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)
 47. Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs
 48. Cakupan Ketersediaan Ruang Guru
- b. 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
1. Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa;
 2. Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan
 3. Persentase pendidik yang disiplin;
 4. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun);
 5. Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat;
 6. Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar;
 7. Rasio Siswa per Kelas SD/MI;
 8. Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs;
 9. Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar;
 10. Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun;
 11. Rata-rata Lama Sekolah;
 12. Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan;
 13. Cakupan ketersediaan guru SD/MI;
 14. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per Satuan mata pelajaran;
 15. Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 16. Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs;
 17. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
 18. Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs;
 19. Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran;
 20. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang;
 21. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar






ruang;

22. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik;
 23. Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik;
 24. Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana;
 25. Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana;
 26. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya;
 27. Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar.
- c. 2 (dua) indikator dengan Status capaian perlu upaya keras yaitu :
1. Persentase angka kenakalan siswa;
 2. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal;
 3. Besaran Pamong Belajar.

b. Pemuda dan Olahraga




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan pemuda dan olahraga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 5 (lima) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemuda dan Olahraga sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Pembinaan kepemudaan	Besaran kegiatan kepemudaan	Kegiatan	13	10	76,92	
		Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Prestasi	8	1	12,50	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	%	20,46	9,97	48,74	
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kegiatan olah raga	Kali	85	157	100	
		Besaran Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	90	157	100	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras









Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pemuda dan olah raga sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.


















- a. 2 (dua) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 1. kegiatan olah raga.
 2. besaran prestasi olahraga.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status capaian perlu upaya keras, yaitu:
 1. besaran kegiatan kepemudaan;
 2. besaran prestasi kegiatan kepemudaan;
 3. cakupan bantuan prasarana olah raga bagi klub olah raga.














c. Kesehatan













Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 59 (lima puluh sembilan) indikator kinerja daerah, pada Dinas Kesehatan mengimplementasikan 50 (lima puluh) indikator dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kesehatan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	92,78	98	
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95	100	100	
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	90	100	100	
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	97,76	100	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	perkilo mil	100	93,17	100	
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	99	97,6	99	
		Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	100	100	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	99,87	100	




No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	%	65	100	100	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Permil	0,992	0,99	99	
		Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	Permil	6,8	7,27	94	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Permil	11	12,67	87	
		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Permil	13,8	14,26	97	
		Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB	%	80	86,06	100	
2	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	100	100	
3	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87	>84	96	
		Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70	31,5	45	
		Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS	%	<0,05	<0,004	100	
		Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	70	65	93	
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70	66,22	95	
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90	90,7	100	
		CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)		< 1	0,1	100	
		Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk		<1	0,004	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20	103,5	100	
		CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1	0,49	100	
		Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100	100	100	
		Cakupan Desa atau Kelurahan <i>Universal Child Immunisation</i> (UCI)	%	100	99,65	100	
		Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95	97	100	
		<i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Kasus	≥2 (4 kasus)	5	100	
		Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	
		Cakupan Penderita diare Yang ditangani	%	100	100	100	
5	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15,5	14,7	95	
		Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	0,3	100	
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100	77,47	77	
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	
6	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90	99,6	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
8	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	70	95	100	
		Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90	90	100	
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/31.000	1/31.000	100	
10	Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	75	78,5	100	
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	75	72,33	96	
		Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80	75,57	94	
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	%	75	80,73	100	
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	60	71,38	100	
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100	100	100	
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	
		Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%	50	89,26	100	
		Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	80	79,42	99	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras










Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan kesehatan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 35 (tiga puluh lima) indikator telah tercapai, yaitu:
 1. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan;
 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani;
 3. Cakupan Pelayanan Nifas;
 4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;
 5. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1);
 6. Cakupan Pelayanan Anak Balita;
 7. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani;
 8. Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB;
 9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin;
 10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD;
 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin;
 12. Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS;
 13. Cakupan Penemuan Penderita Diare;
 14. CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk);
 15. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk;
 16. Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk;
 17. CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue);
 18. Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani;
 19. Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI);
 20. Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak;
 21. Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun;
 22. Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam;
 23. Cakupan Penderita diare Yang ditangani;
 24. Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan);
 25. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan;
 26. Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan;
 27. Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar;
 28. Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi;

29. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas;
 30. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan;
 31. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan;
 32. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan;
 33. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar;
 34. Cakupan Desa Siaga Aktif;
 35. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri.
- b. 13 (tigabelas) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;
 2. Cakupan Kunjungan Bayi;
 3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi;
 4. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup;
 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;
 6. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup;
 7. Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate);
 8. Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS;
 9. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita;
 10. Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan);
 11. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan;
 12. Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban;
 13. Cakupan Rumah Tangga Sehat.
- c. 2 (dua) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
1. Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate);
 2. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin.




Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kesehatanyang diimplementasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah adalah 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah kesehatan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	%	100	100	100	
2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100	4397	100	
3	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Cakupan Pelayanan RSUD:					
		BOR	%	70	74,92	100	
		LOS	Hari	6	3,75	62,49	
		TOI	Hari	2	1,12	56	
		GDR	%	36	33	91,67	
		NDR	%	18	18,8	100	
		Kinerja Pelayanan BLUD	Strata	Sehat	Sehat	Sehat	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	Lulus	Lulus	Lulus	

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan kesehatan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.








- a. 6 (enam) indikator telah tercapai, yaitu:
 1. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten;




2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
 3. BOR;
 4. NDR;
 5. Kinerja Pelayanan BLUD;
 6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD.
- b. 1 (satu) indikator akan tercapai, yaitu GDR.
 - c. 2 (tiga) indikator perlu upaya keras, yaitu:
 1. LOS;
 2. TOI.

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan 16 (enam belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.120.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan yang menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan selamat	%	82	82,42	100	
		Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	%	82	82,42	100	
		Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana	%	90	90,00	100	
		Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkaran Kota Parakan	Hektar (Ha)	19	0	0	
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan yang Kondisi Baik	%	82	82,42	100	
		Persentase Jembatan kabupaten dalam Kondisi Baik	%	90	90	100	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinatangan	Persentase Tersedianya Alat Berat dalam Kondisi Baik	%	85	77,78	94,12	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	%	82	92,86	100	
		Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	6,19	14,38	100	
5	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40,7	40,6	99,02	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	%	100	100	100	
7	Program Perencanaan Tata Ruang	tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	2	66,67	
		terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci	%	100	100	100	
8	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17,6	16,74	95,11	
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	100	100	
		Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Penataan Ruang	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. 11 (Sebelas) indikator telah tercapai, yaitu:



1. Persentase Jalan yang menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan selamat;





2. Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
 3. Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana;
 4. Persentase Jalan yang Kondisi Baik;
 5. Persentase Jembatan kabupaten dalam Kondisi Baik;
 6. Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada;
 7. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif;
 8. Persentase kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai;
 9. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci;
 10. Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya;
 11. Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Penataan Ruang.
- b. 3 (tiga) indikator akan tercapai, yaitu:
1. Persentase Tersedianya Alat Berat dalam Kondisi Baik;
 2. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan;
 3. Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian.
- c. 2 (dua) indikator perlu upaya keras yaitu:
1. Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan;
 2. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya.

e. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 6 (enam) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:




Tabel 2.121.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	96,2	97,01	100	
		<i>berkurangnya Luasan Permukiman</i>	<i>Hektar (Ha)</i>	<i>19,91</i>	19,91	<i>100</i>	

No	PROGRA M	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGE T 2018	REALISA SI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Kumuh di kawasan perkotaan</i>					
		Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	91,3	89,78	98,34	
		Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	78,9	80,24	100	
		Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8,2	47,51	100	
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	76	70	92,11	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras



Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 4 (empat) indikator telah tercapai, yaitu:
 1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
 2. Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan;
 3. Cakupan sanitasi pemukiman yang layak;
 4. Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota.
- b. 2 (dua) indikator akan tercapai, yaitu:
 1. Cakupan Layanan Air Minum yang layak;
 2. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum.

f. Pertanian




Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pertanian diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 2 (dua) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pertanahan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PERTANAHAN							
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	100	96,13	96,13	
2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	20	17,5	87,50	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras










Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pertanahan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- 1 (satu) indikator akan tercapai yaitu Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat;
- 1 (satu) indikator perlu upaya keras yaitu Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten.

g. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.




Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.123.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	
		Angka Kriminalitas	angka	4,6	2,35	100	
		Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	100	100	
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	3	2,4	80	
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,62	1,48	91,36	
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	80	60,64	75,80	
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	80	60,56	75,70	
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	95	35,19	37	
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	76,92	80,97	

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan daerah ketentraman dan ketertibanumumserta perlindungan masyarakatsampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.









- a. 3 (tiga) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 1. Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Angka Kriminalitas;
 3. Cakupan Penanganan demonstrasi.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu:





1. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 2. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 3. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas).
- c. 3 (tiga) Indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran;
 2. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate);
 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi.

h. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial dengan 12 (dua belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.124.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Sosial sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	33,91	100	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	3,18	1,61	100	
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	2,91	100	
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	24,34	22,2	100	
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	100	100	
7	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	1,61	100	
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	5,06	4,87	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	3	0,46	84,15	
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	100	100	
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	100	100	
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	25,95	25,61	99,98	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan sosial sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.










- a. 10 (sepuluh) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial;
 3. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial;
 4. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
 5. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 6. Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran;
 7. Persentase anak terlantar yang tertangani;
 8. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial;
 9. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS;
 10. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS.

- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu:
1. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis;
 2. Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

i. Ketenagakerjaan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan ketenaga kerjaan diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Ketenagakerjaan sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,75	98,5	100	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,25	1,5	100	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	82	75,5	92	
		Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	%	75	56,43	75,24	
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis	%	100	86	86,00	
		Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80	59,3	74	
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	95	90	100	
		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	%	80	100	100	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras


Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan ketenagakerjaan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 5 (lima) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Tingkat Kesempatan Kerja;
 2. Tingkat Pengangguran Terbuka;
 3. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
 4. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan;
 5. Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama.
- b. 2 (dua) indikator mempunyai status capaian akan tercapai yaitu:
 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
 2. Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis.
- c. 2 (dua) indikator mempunyai status perlu upaya keras yaitu:
 1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja;
 2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

j. Transmigrasi




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan transmigrasi diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan 1 (satu) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Transmigrasi sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigran	%	80	25	31	

Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:






Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras











Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan transmigrasi sampai Tahun 2017 dengan status upaya keras adalah Persentase Penempatan Transmigran.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 15 (lima belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.127.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	90	100	100	
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	80	100	100	
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan	%	25	100	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
		Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan					
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	%	98	100	100	
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	100	100	
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	50	100	100	
		Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	1 : 260	1 : 1450	100	
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	%	70	68,3	97,51	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Hak Sipil dan Kebebasan	%	95	80	84,21	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	%	80	75	93,75	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Kesehatan Dasar	%	80	68,1	85,17	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	%	85	64,9	76,31	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	%	70	60	85,71	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. 9 (sembilan) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:















1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu;

2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;
 3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu;
 4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu;
 5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan;
 6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum;
 7. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 9. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga.
- b. 5 (lima) indikator dengan status akan tercapai, yaitu:
1. Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender;
 2. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 3. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 4. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar;
 5. Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus.
- c. 1 (satu) indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera




Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan keluarga berencana diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 14 (empat belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.128.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga:					
		a. Keluarga Sejahtera III	%	45,22	45,7	100	
		b. Keluarga Sejahtera III plus	%	4,14	4	96,62	
2	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100	100	
3	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	%	2,6	1,57	60,38	
4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	84	83,6	99,52	
5	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	5,05	7,18	100	
6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	82	100	
7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	86	82,52	95,95	
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	Rasio	1 : 2	1 : 6	33,33	
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	Rasio	1 : 1	1 : 1	100	
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	2,69	75,77	
		Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,6	0,86	100	
		Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	pus	14,06	11234	100	
8	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3	0	0	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras











Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 7 (tujuh) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga keluarga Sejahtera III;
 2. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun;
 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need);
 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB;
 5. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan;
 6. Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk;
 7. Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu:
 1. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Keluarga Sejahtera III plus;
 2. cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif;
 3. cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB.
- c. 4 (empat) indikator dengan status capaian perlu upaya keras, yaitu:
 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun;
 2. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan.
 3. Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria;
 4. Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

m. Pangan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan pangan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pangan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program peningkatan ketahanan pangan	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hr	2980	3.458	100	
		Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	gr/kap/hr	75,99	115,34	100	
		Peningkatan cadangan pangan masyarakat	unit	75	65	86,67	
		Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	10	10	100	
		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	85	100	100	
		Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	%	91	85,8	94	
		Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	100	100	
		Besaran Desa Mandiri Pangan	Desa	10	9	90	
		Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	lokasi	5	7	100	
		Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pangansampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.







- a. 7 (tujuh) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. cakupan ketersediaan energi per kapita;
 2. cakupan ketersediaan protein per kapita;

3. persentase penguatan cadangan pangan pemerintah;
 4. cakupan penanganan kerawanan pangan;
 5. cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 6. besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 7. persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
1. peningkatan cadangan pangan masyarakat;
 2. persentase meningkatnya skor pola pangan harapan;
 3. besaran desa mandiri pangan.

n. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan pertanian diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pertanian
sampai Tahun 2017




No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
Pertanian							
1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1.300	1118	86	
		Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	Ha	1.300	6131	100	
		Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan	Unit	1.272	2002	100	
		Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	75	100	
2	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/p erkebunan	Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	12	116	100	
3	Program peningkatan produksi pertanian/p erkebunan	Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	85	95	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
Pertanian							
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/P erkebunan/ peternakan	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/Ha	6,99	6,06	87	
		Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/Ha	6,88	4,46	65	
		Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/Ha	27,61	38,53	100	
		Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/Ha	6,70	6,50	100	
		Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/Ha	27,05	21,40	79	
		Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/Ha	0,79	0,62	78	
		Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/Ha	1,10	0,48	44	
		Peningkatan produktifitas Kopi Arabika	Ton/Ha	0,90	0,52	58	
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/P erkebunan/ peternakan	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100	100	100	
		Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun	Unit	469	489	100	
		Besaran jumlah jalan usaha tani	Unit	410	492	100	
6	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	100	100	
Penyuluhan							
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan	kali/tahun	10	10	100	
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3	47	100	
8	Program Pemberdayaan Petani	Rasio jumlah kelompok tani maju	%	8,05	8,01	99	
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	12.400	10.060	81	
		Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	87,89	73,40	84	
		Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	70	56	80	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2017 (data diolah)

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
--------	------------------------

	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pertanian sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.












- a. 12 (dua belas) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Besaran penerapan pertanian dan perkebunan mengarah organik untuk komoditas utama;
 2. Besaran peningkatan jumlah alat mesin pertanian dan perkebunan;
 3. Persentase peningkatan penggunaan bibit dan benih unggul;
 4. Besaran peningkatan pemasaran hasil pertanian;
 5. Persentase penanganan serangan hama penyakit;
 6. Peningkatan produktifitas ubi kayu;
 7. Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung;
 8. Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun.
 9. Besaran jumlah jalan usaha tani;
 10. Persentase perkembangan kawasan agropolitan;
 11. Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan;
 12. Jumlah peningkatan kapasitas sdm penyuluh;
- b. 7 (tujuh) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
 1. Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang;
 2. Peningkatan produktifitas padi;
 3. Jumlah peningkatan kapasitas SDM petani,
 4. Cakupan pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 5. Peningkatan produktifitas cabai;
 6. Rasio jumlah kelompok tani maju;
 7. Besaran pertumbuhan dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani.
- c. 5 (lima) indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu
 1. Peningkatan produktifitas jagung;
 2. Peningkatan produktifitas kobis;
 3. Peningkatan produktifitas tembakau;
 4. Peningkatan produktifitas kopi robusta;
 5. Peningkatan produktifitas kopi arabika.

o. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan Lingkungan hidup diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 11 (sebelas)




indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota	%	31,25	34,89	100	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPS 3R)	%	14,5	15,29	100	
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung	%	15	14	93,33	
		Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)	%	87	86,66	99,61	
		Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)	%	65	57,54	88,52	
		Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	Unit	1	0	0	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	100	70	70,00	
		Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	100	70	90	
		Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa	%	100	90	100	
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	
		Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras






Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan lingkungan hidup sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 5 (lima) indikator status telah tercapai yaitu:
 1. Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota;
 2. Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPS 3R);
 3. Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa
 4. Persentase; Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti;
 5. Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL.
- b. 4 (empat) indikator status capaian akan tercapai adalah:
 1. Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung;
 2. Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung);
 3. Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung);
 4. Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara.
- c. 2 (dua) indikator status capaian perlu upaya keras adalah:
 1. Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara;
 2. Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air.

p. Kependudukan dan Catatan Sipil




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan kependudukan dan catatan sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 5 (lima) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	100	96,27	96,27	
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	37,63	95,96	100	
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	67,01	64,21	95,83	
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	100	100	100	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan kependudukan dan catatan sipil sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.









- a. 3 (tiga) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian;
 3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
 1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 2. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

q. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desadiimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 8 (delapan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.133.

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	30	25,56	83,33	
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	100	100	
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)	%	80	72	90	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	%	11	11,60	94,83	
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	37	55	100	
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	%	1,35	22,47	100	
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	%	20	20	100	
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.








- a. 5 (lima) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 1. Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;

2. Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna;
 3. Cakupan bantuan rumah layak huni bagi rumah tangga sasaran;
 4. Persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 5. Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status akan tercapai yaitu:
1. Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa;
 2. Cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (bumdes, pasar desa, ued-sp, lumbung pangan);
 3. Persentase menurunnya rumah tangga sasaran (angka kemiskinan).

r. Perhubungan



Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.


Tabel 2.134.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Perhubungan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Kendaraan yang Diuji	%	95	99,81	100	
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase keselamatan angkutan umum	%	95	100	100	
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b)	Unit	1	1	100	
		Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	8	66,67	
4	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	90	78	86,67	
		Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	69	108,1	100	
		Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan :

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai

	Perlu upaya keras
---	-------------------






Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan perhubungan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.



- a. 5 (lima) indikator dengan status capaian telah tercapai adalah:
 1. Persentase Kendaraan yang Diuji
 2. Persentase keselamatan angkutan umum
 3. Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b)
 4. Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan
 5. Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek
- b. 1 (satu) indikator dengan status capaian akan tercapai adalah Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan
- c. 1 (satu) indikator dengan status capaian perlu upaya keras adalah Tersedianya sub terminal (tipe c).

s. Komunikasi dan informatika

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan komunikasi dan informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan 7 (tujuh) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Komunikasi Dan Informatika
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	program pengembangan informasi dan komunikasi	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	Rasio	100	45	45	
2	program pengembangan informasi dan komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	55	55	100	
3	program pengembangan informasi dan komunikasi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	%	100	100	100	
4	program pengembangan informasi dan komunikasi	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	100	100	100	
5	program pengembangan informasi dan komunikasi	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital	%	100	100	100	

6	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	100	100	100	
7	program pengembangan informasi dan komunikasi						
8	program pengembangan SDM informasi dan komunikasi						
9	program pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan komunikasi dan informatika sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.


- a. 5 (lima) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan;
 2. Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun;
 3. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog;
 4. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital;
 5. Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu :
 1. Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi;
 2. Rasio Akses Internet di Ruang Publik.

t. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan 1(satu)




indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.136.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Statistik
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik	dokumen	9	8	88,89	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:





Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras



Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan Pemerintahan Statistik sampai Tahun 2017 dengan status capaian akan tercapai yaitu indikator besaran ketersediaan data statistik.

u. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, dan menengah diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 6 (enam) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.137.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Koperasi dan UKM sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	prosentase jumlah koperasi aktif	%	90,70	88	97,06	
		Besaran jumlah anggota koperasi	Org	179.500	216,05	100	
		persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53,72	39,69	73,88	
2	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	50	90	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
	kompetitif UKM						
		Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	451	369	82	
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	232	270	100	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras










Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, dan menengah sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 3 (tiga) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Besaran jumlah anggota koperasi;
 2. Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM.
- b. 2 (dua) indikator mempunyai status capaian akan tercapai yaitu:
 1. Prosentase jumlah koperasi aktif;
 2. Besaran jumlah UKM yang dibina.
- c. 1 (satu) indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi;

v. Perdagangan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.138.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Perdagangan sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	5	6	100	
2	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	100	100	
3	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$) milyar	175	98,48	56	
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	5	100	
4	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	406	67,67	
5	Perlindungan Konsumen	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	240	100	
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	2	100	
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19.050	201	1,06	
		Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	85	0	17,65	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan perdagangan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.


- a. 5 (lima) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan;
 2. Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
 3. Cakupan promosi produk unggulan daerah;
 4. Cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya;
 5. Cakupan meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar.
- b. 4 (Empat) indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu:
 1. Cakupan nilai ekspor produk daerah;

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal;
3. Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
4. Persentase penyelesaian sengketa konsumen.

w. Perindustrian




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 2 (dua) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Perindustrian sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,60	70,00	100	
		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,75	99,9	100	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator urusan pemerintahan perindustrian sampai Tahun 2017 sudah tercapai, sebagai berikut.











1. Cakupan meningkatnya prosentase agroindustri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
2. Persentase meningkatnya struktur industri berbahan baku lokal yang tangguh.


x. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan penanaman modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 11 (sebelas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.140.




Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Penanaman Modal sampai
Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	100	100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	95	54,65	57,53	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	Hari	6	6	100	
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Investasi	%	14	57	100	
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	170.000.000.000	1164,65	96,85	
4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Besaran jumlah Investor	investor	1734	381	21,97	 
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kali/tahun	33	24	72,73	
		Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di penanaman modal	unit	32	38	100	
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik	%	100	100	100	
9	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
10	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras













Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan penanaman modal sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 7 (tujuh) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Cakupan jenis perizinan yang memiliki standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur;
 2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat;
 3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
 4. Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha;
 5. Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di penanaman modal;
 6. Besaran implementasi sistem pelayanan informasi dan perizinan informasi secara elektronik;
 7. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang.
- b. 1 (satu) indikator mempunyai status capaian akan tercapai yaitu nilai investasi.
- c. 3 (tiga) indikator mempunyai status capaian perlu upaya keras yaitu:
 1. persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu;
 2. laju investasi;
 3. besaran jumlah investor.

y. Kebudayaan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 12 (dua belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.141.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kebudayaan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya	%	0,28	0,18	64	
		Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi		6,38	6,38	100	
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Kajian Seni	%	33,3	33,3	100	
		Cakupan Fasilitas Seni	%	85,7	71,43	83,35	
		Cakupan Gelar Seni	%	100	75	75	
		Cakupan Misi Kesenian	%	95	100	100	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	87,5	75	85,71	
		Cakupan Tempat Kesenian	%	50	50	100	
		Cakupan Organisasi Kesenian	%	100	100	100	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Fasilitas Cagar Budaya	%	2,12	2,13	100	
		Cakupan Promosi Cagar Budaya	%	65	42,55	66,47	
		Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan	%	100	100	100	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras







Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan daerah kebudayaan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 7 (tujuh) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Cakupan pemeliharaan benda-benda bersejarah dan arkeologi;
 2. Cakupan kajian seni;
 3. Cakupan misi kesenian;
 4. Cakupan tempat kesenian;
 5. Cakupan organisasi kesenian;
 6. Cakupan fasilitas cagar budaya;
 7. Cakupan pengembangan sarana dan prasarana budaya dan kebudayaan.
- b. 2 (dua) indikator mempunyai status capaian akan tercapai yaitu:
 1. cakupan fasilitas seni;
 2. cakupan sumber daya manusia kesenian.
- c. 3 (tiga) indikator mempunyai status capaian perlu upaya keras yaitu:
 1. cakupan pemeliharaan nilai tradisi budaya;
 2. Cakupan Promosi Cagar Budaya;
 3. Cakupan gelar seni.

z. Pariwisata




Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 6 (enam) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.142.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pariwisata
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Destinasi Wisata	besaran Berkembangnya Kawasan wisata	Unit	11	13	100	
		Besaran lama tinggal wisatawan	Jam	12	10	83	
		Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	%	30	25	83	
2	Program Pengembangan Produk Wisata	Besaran meningkatnya Pengembangan Produk/event/atraksi Wisata	paket	9	8	89	
		Besaran Meningkatnya Pengelolaan Wisata	unit	7	7	100	
3	Program Pengembangan Kemitraan	Besaran Pengembangan Kemitraan Pariwisata	paket	11	9	81,82	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Status capaian indikator urusan pemerintahan pariwisata sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 2 (dua) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Besaran berkembangnya kawasan wisata;
 2. Besaran meningkatnya pengelolaan wisata.
- b. 4 (empat) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
 1. besaran lama tinggal wisatawan;
 2. persentase meningkatnya kunjungan wisatawan;
 3. besaran meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata;
 4. besaran pengembangan kemitraan pariwisata.

aa. Perpustakaan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan 2 (dua) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Perpustakaan sampai Tahun 2017

N O	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	84	83,1	98,93	
		Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	%	90	83	92,63	

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan perpustakaan sampai Tahun 2017 terdiri dari 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:

1. Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung;
2. Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

bb. Kearsipan




Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan 1 (satu) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kearsipan sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	98,68	98,68	
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah						
3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan						

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras












Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan kearsipan dengan status capaian akan tercapai yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku.

cc. Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan perikanan di implementasikan oleh Dinas Perikanan dan Perternakan dengan 11 (sebelas)




indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Perikanan
sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Penggunaan induk ikan unggul	%	60	56	93,33	
		Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	113.482.800	104.840.500	92,38	
		Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam)	Ekor	6.749,01	5.611,17	83,14	
		Peningkatan produksi mina padi	Ton	4.174,60	3.383,00	81,04	
		Produktivitas benih ikan	ekor/m2	130	120,15	92,42	
		Produktivitas ikan konsumsi	kg/m2	5,29	4,50	85	
		Produktivitas mina padi	kg/Ha/tahun	1188,51	994,37	83,67	
2	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	277	399,95	100	
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	16,87	19,73	100	
3	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Peningkatan luas lahan budidaya ikan	Ha	125,07	124,69	99,70	
4	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	Ton	801,92	664,30	82,85	

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan perikanan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.












- a. 2 (dua) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan;
 2. Tingkat konsumsi ikan;


- b. 9 (sembilan) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
1. Penggunaan induk ikan unggul;
 2. Peningkatan produksi benih ikan;
 3. Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam);
 4. Peningkatan produksi mina padi;
 5. Produktivitas benih ikan;
 6. Produktivitas ikan konsumsi;
 7. Produktivitas mina padi;
 8. Peningkatan luas lahan budidaya ikan;
 9. Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.

dd. Pertanian Sub Urusan Peternakan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pertanian sub urusan peternakandiimplementasikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pertanian Sub Urusan
Peternakan sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan	%	70	76	100	
		Angka Kematian Ternak unggas	%	2	0,020	100	
		Angka Kematian Ternak kecil	%	0,10	0,010	100	
		Angka Kematian Ternak besar	%	0,10	0,030	100	
2	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Peningkatan Produktivitas daging Sapi	Kg/Ekor	176,65	173,20	98,05	
		Peningkatan Produktivitas daging Kambing	Kg/Ekor	13,66	13,55	98,83	
		Peningkatan Produktivitas daging Domba	Kg/Ekor	13,66	13,60	99,19	
		Peningkatan produksi telur ayam ras petelur	Butir	79.255.574	124.967.968	100	
		Peningkatan populasi sapi	Ekor	29.750	37.025	100	
		Peningkatan populasi domba	Ekor	334.646	352.524	100	
		Peningkatan populasi kambing	Ekor	64.388	85.450	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
		Peningkatan populasi ayam buras	Ekor	1.675.736	1.894.199	100	

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras


Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator urusan pemerintahan pertanian sub urusan peternakan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.











- a. 9 (sembilan) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui inseminasi buatan;
 2. Angka kematian ternak unggas;
 3. Angka kematian ternak kecil;
 4. Angka kematian ternak besar;
 5. Peningkatan produksi telur ayam ras petelur;
 6. Peningkatan populasi sapi;
 7. Peningkatan populasi domba;
 8. Peningkatan populasi kambing;
 9. Peningkatan populasi ayam buras.
- b. 3 (tiga) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
 1. Peningkatan produktivitas daging sapi;
 2. Peningkatan produktivitas daging kambing;
 3. Peningkatan produktivitas daging domba.

ee. Perencanaan Pembangunan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan sampai Tahun 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
		Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio	0,2	0,25	100	
		Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0,019	0,0370	100	
		Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	Dokumen	14	28	100	
		Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPDP	%	100	100	100	
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	100	100	
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD	%	100	100	100	
		Persentase program PD di Luar RPJMD	%	0	0	100	
		Persentase Kegiatan PD di Luar Renstra PD	%	0	15,9	84,10	
		PDRB per kapita	Rp juta/orang/tahun	11,36	23,41	100	
		Indeks ketimpangan wilaamson/ indeks ketimpangan regional	Rasio	0,045	0,042	93,33	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi penunjang perencanaan pembangunan sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 8 (delapan) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu;
 2. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik;
 5. Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPDP;

6. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD;
 7. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD;
 8. Persentase program PD di Luar RPJMD;
 9. PDRB per-kapita.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
1. Persentase Kegiatan PD di Luar Renstra PD;
 2. Indeks ketimpangan wilaamson/ indeks ketimpangan regional.

ff. Penelitian dan Pengembangan




Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.148.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Besaran Penelitian dan Pengembangan	dokumen	4	1	100	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:






Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dengan status telah tercapai adalah Besaran Penelitian dan Pengembangan.

gg. Keuangan




Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang Keuangan urusan pemerintahan diimplementasikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dengan 5 (lima) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.149.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan PD terhadap Total Belanja Langsung PD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	22	88	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	0,87	0,99	100	
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	100	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	17,26	100	
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di PD	%	80	77	94,14	
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras







Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi penunjang keuangansampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.




- a. 4 (empat) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah;
 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah;
 4. Persentase Anggaran Penata usahaan PD terhadap Total Belanja Langsung PD dalam 1 (satu) Tahun.
- b. 1 (satu) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu: Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di PD.

hh. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.




Tabel 2.150.
Capaian Kinerja Fungsi PenunjangKepegawaian
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	1,9	1,18	100	
		Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa	%	3	4,21	100	
2	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	34	48,47	100	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	%	95	100	100	
		Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	%	90	88,89	100	
		persentase PNS Lulusan S1	%	58	49,85	90,64	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
		Persentase PNS Lulusan S2/ S3	%	5,1	4,70	97,91	
		Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	55	100	100	
4	Program Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	100	100	100	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras


Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi penunjang kepegawaian sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. 7 (tujuh) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional;
 2. Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa;
 3. Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan;
 4. Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS;
 5. Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong;
 6. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu;
 7. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
 1. persentase PNS Lulusan S1;
 2. Persentase PNS Lulusan S2/ S3.

ii. Fungsi Lainnya




Kinerja penyelenggaraan fungsi lainnya diimplementasikan oleh Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa. Inspektorat dengan 1 (satu) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.151.
Capaian Kinerja Fungsi lainnya Inspektorat
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	90	85	100	
2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:










Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras











Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi lainnya untuk Inspektorat sampai Tahun 2017 dengan status capaian telah tercapai yaitu Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan








Kinerja penyelenggaraan fungsi lainnya yang diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.152.
Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
Bagian Pemerintahan Umum							
1	Program Kerjasama Daerah	Besaran kerjasama daerah	Dokumen	1	1	100	
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Cakupan Pelaksanaan SPM	%	96,8	81,69	84,39	




NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	100	100	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan	%	100	95	95	
Bagian Pemerintahan Desa							
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	100	100	
		Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	100	95,86	95,86	
		Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	90,7	94	
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	100	100	100	
Bagian Hukum							
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	100	28	28	
Bagian Perekonomian							
		Persentase terkendalinya pemasaran komoditas unggulan daerah	%	100	100	100	
Bagian Pembangunan							
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	95,90	95,90	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
	Kebijakan Daerah						
9	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	98,84	98,84	
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	99,42	99,42	
Bagian Kesejahteraan Rakyat							
11	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	100	100	
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	100	100	
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	100	100	
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	100	100	
Bagian Umum							
12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	
Bagian Tatalakssana							
13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	100	86,00	86	
		Persentase PD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	100	90	90	
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kriteria	B	CC	86,20	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
		Pemerintah (SAKIP)					
		Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	95	100	100	
15	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	B	B	100	
Bagian Hubungan Masyarakat							
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional	kali	6	8	100	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal	kali	10	12	100	
16	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	31	12	100	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	10	10	100	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	10	11	100	

Sumber: Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi lainnya sekretariat Daerah sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. 17 (tujuh belas) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:

1. Besaran kerjasama daerah;
2. Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah;

3. Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kasus;
 4. Cakupan Pembinaan Administrasi Desa;
 5. Persentase terkendalinya pemasaran komoditas unggulan daerah;
 6. Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah;
 7. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren;
 8. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ;
 9. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah;
 10. Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN);
 12. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;
 13. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional;
 14. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal;
 15. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang;
 16. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa;
 17. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru.
- b. 10 (sepuluh) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu:
1. Cakupan Pelaksanaan SPM ;
 2. Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan;
 3. Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong;
 4. Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong;
 5. Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu;
 6. Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa ;
 7. Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu;
 8. Persentase PD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik;
 9. Persentase PD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP;
 10. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. 1 (satu) indikator dengan status perlu upaya keras yaitu Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun.




Kinerja penyelenggaran fungsi lainnya yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.153.
Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	100	100	100	
		Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	%	100	100	100	

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:





Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi lainnya sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sampai Tahun 2017 dengan status capaian telah tercapai yaitu:

1. Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda;
2. Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan.




Kinerja penyelenggaran fungsi lainnya yang diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.154.
Capaian Kinerja Fungsi Lainnya BPBD
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	program tanggap darurat dan logistik	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun	%	100	100	100	
		Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana	%	100	100	100	
2	program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	100	100	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai Tahun 2017 dengan status capaian telah tercapai yaitu:

1. Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun;
2. Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana;
3. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat;
4. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap;




Kinerja penyelenggaraan fungsi lainnya yang diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dengan 5 (lima) indikator kinerja daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.155.
Capaian Kinerja Fungsi Lainnya Kantor Kesatuan Bangsa
sampai Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET AKHIR PEMBANGUNAN 2018	REALISASI s.d 2017	CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat	%	100	100	100	
2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase Kasus Pekat yang Tertangani	%	100	100	100	
3	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	%	100	0	85	
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan Kasus SARA	%	100	100	100	
5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	%	100	100	100	

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017 data diolah

Keterangan:

Simbol	Status capaian kinerja
	Telah tercapai
	Akan tercapai
	Perlu upaya keras

Dari tabel di atas, diketahui bahwa status capaian indikator fungsi lainnya Kantor Kesatuan Bangsa sampai Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu:
 1. Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat;
 2. Persentase Kasus Pekat yang Tertangani;
 3. Penurunan Kasus SARA;
 4. Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika.
- b. 1 (satu) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu persentase partisipasi pemilih.

F. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma sebagai berikut: mendukung agenda prioritas pembangunan; mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan keberlanjutan; memiliki nilai ekonomi dan berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah; terintegrasi sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas, namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi, dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator yang perlu upaya keras. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dalam proses pelaksanaan indikator tersebut identifikasi dibedakan menjadi 3 hal, yaitu kebijakan, program dan kegiatan.

Identifikasi masalah dapat dikategorikan 4 kelompok, yaitu kelompok Pembangunan Manusia; Infrastruktur; Ekonomi; dan Pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan meliputi:

1. Kelompok Pembangunan Manusia

a. Pendidikan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.156.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan

No	Analisis		Permasalahan
1	Data makro	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase angka kenakalan siswa; - Besaran Penilik Pendidikan Nonformal; - Besaran Pamong Belajar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan rendah dengan indikator Indeks Pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah;
2	Pokok pikiran DPRD	<p>Mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal</p> <p>Perlunya penataan kembali tenaga pendidik dan kependidikan mengingat masih kurangnya tenaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih rendah sebesar 6,52 %. - Belum terpenuhinya sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;

No	Analisis		Permasalahan
		<p>pendidik dan kependidikan yang cukup merata, dimana jumlah guru dan tenaga kependidikan makin terbatas dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada, terutama untuk guru SD dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI)</p> <p>Tidak meratanya jumlah peserta didik di masing-masing sekolah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas sekolah dengan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini; - Kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum sesuai standart; - Sarana Prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standart; - Penguatan pendidikan karakter untuk membekali para siswa agar berakhlak mulia, peka terhadap lingkungan, berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan, berdisiplin, ulet, empati, etos kerja dan kerjasama yang baik;
3	Isu Musrenbang	<p>Penambahan/perbaikan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, toilet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan juga harus menekankan kepada pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah. - Masih rendahnya akses pendidikan berhubungan dengan jarak antara pemukiman penduduk dan lokasi lembaga pendidikan yang relatif jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. - Adanya fasilitas pendidikan yang daya tampungnya tidak dimanfaatkan secara optimal, sedangkan di wilayah lain terdapat lembaga pendidikan

No	Analisis		Permasalahan
			<p>yang kekurangan daya tampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kualitas pendidikan relatif masih rendah, dan terdapat kesenjangan kualitas pendidikan baik antar wilayah, antar status satuan pendidikan, maupun antar mata pelajaran. – Sarana dan prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarpras pendidikan sebagian telah rusak, dan ketinggalan jaman. – Banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. – Dari aspek kualitas di SD Negeri kekurangan guru PNS, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sedangkan di SMP kekurangan guru PNS pada mata pelajaran tertentu. – Kekosongan tenaga pendidik baik tenaga kependidikan tenaga administrasi sekolah maupun penjaga sekolah. – Kurangnya pemahaman guru terhadap kriteria keberhasilan proses pembelajaran, dan masih menerapkan metode dan model-model pembelajaran

No	Analisis		Permasalahan
			<p>yang konvensional, dan monoton.</p> <p>– Perlunya peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.</p>

b. Kesehatan

Permasalahan pembangunan pada urusan kesehatan sebagai berikut.

Tabel 2.157.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	<p>Kurangnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, Prevalensi Balita Gizi Buruk (0-60 Bulan);</p> <p>Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (<i>CDR/Case Detection Rate</i>);</p> <p>Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin.</p>	<p>– Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi realisasi angka kematian ibu (AKI) sebesar 93,17 %, walaupun masih dibawah target Jawa Tengah sebesar 116,34/100.000 KH dan dibawah target nasional sebesar 226/100.000 KH. Sedangkan realisasi angka kematian bayi (AKB) sebesar 0,99 %.</p> <p>– Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita;</p>
2.	Pokok Pikiran DPRD	<p>Terkait dengan sumber bagi pemenuhan kesehatan langsung di setiap rumah tangga, maka pentingnya peningkatan program air bersih dan program jamban keluarga, harus terus</p>	<p>– Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular;</p>

No	Analisis		Permasalahan
	<p>dioptimalkan, mengingat prosentasenya masih sangat minim.</p> <p>Perlu solusi real, bahwa jaminan kesehatan sosial masyarakat masih menjadi persoalan sepanjang tahun. Keluhan masyarakat yang tidak mendapat layanan kesehatan terus terjadi, khususnya kelompok masyarakat miskin. Adanya JKN belum mampu menjadi jawaban atas persoalan pelayanan kesehatan ini. Selain itu perlu peningkatan perbaikan infrastruktur puskesmas, perbaikan kualitas layanan, perbaikan kualitas SDM dan perbaikan kualitas obat.</p> <p>Melihat banyaknya tenaga kesehatan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan puskesmas baru, maka kami mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi tenaga bidan desa, dokter, perawat serta tenaga kesehatan lain di Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Masih dijumpai kawasan kumuh dan lingkungan yang tidak sehat akibat masyarakat belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat; - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu rutin memeriksakan diri ke Puskesmas atau membawa bayi ke Posyandu dan sebagainya. - Belum optimalnya dalam melakukan pelayanan kesehatan dilihat dari realisasi indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin mencapai 100 %, Cakupan Pelayanan Nifas mencapai 97,76 %, Cakupan Pelayanan Anak Balita 92 %; - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum; - Meningkatkan pengawasan peredaran obat dan makanan.
3.	Isu Musrenbang	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), penambahan tenaga kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi kerawanan pangan dan

No	Analisis	Permasalahan
		gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin.

c. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada urusan perpustakaan sebagai berikut.

Tabel 2.158.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perpustakaan

No	Analisis	Permasalahan
1.	Data makro Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung; Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.	– Belum optimalnya Kesadaran dan Minat Budaya Baca, terutama Pengunjung Perpustakaan; – Masih ada Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem arsip secara baku;
2.	Pokok Pikiran DPRD	
3.	Isu Musrenbang Pembangunan Perpustakaan desa	

d. Sosial

Permasalahan pembangunan pada urusan sosial sebagai berikut.

Tabel 2.159.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial

No	Analisis	Permasalahan
1.	Data makro – Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis; – Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	– Disabilitas yang jumlahnya relatif sedikit tersebar hampir di seluruh wilayah nampak belum mendapat perhatian yang cukup, utamanya yang berada jauh dari pusat kota Temanggung. – pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan agar program- program dan penanganan kemiskinan

No	Analisis		Permasalahan
		(WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan indikator capaian yang terukur; - Belum tercukupinya
2.	Pokok Pikiran DPRD		Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan indikator
3.	Isu Musrenbang	RTLH, pembangunan shelter, penanganan masalah-masalah kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni; - Masih perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin yang termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak; - Perlindungan Sosial rendah, antara lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan sosial dan Pemberdayaan Ekonomi; - Penanganan orang-orang miskin yang termasuk sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.160.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun;	

No	Analisis		Permasalahan
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan. Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria; Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	– Belum optimalnya Pemberdayaan Responsif Gender; – Kurang terpenuhinya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, terutama Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Kekerasan dalam rumah tangga.	

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut.

Tabel 2.161.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK); Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Kurang optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, dalam Penerbitan E-KTP, Pelayanan Akte Kelahiran tepat waktu.
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Percepatan pengurusan dokumen kependudukan	

2. Kelompok Ekonomi

a. Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada urusan tenaga kerja sebagai berikut.

Tabel 2.162.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Tenaga Kerja

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja; Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	– Kesempatan Kerja antara lain Perluasan Produktivitas Tenaga Kerja belum terpenuhi secara optimal.
2.	Pokok Pikiran DPRD	Dalam rangka mengurangi pengangguran di Kabupaten Temanggung, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global ke depan diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja serta meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan usaha serta fasilitasi pengembangan wirausaha baru salah satunya pengemangan industri kreatif yang merupakan program pemerintah pusat dan diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi ke depan.	– mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. – Mengurangi pengangguran yang menjadi sebab utama kemiskinan; – jumlah setengah penganggur yang diperkirakan angkanya lebih besar dibandingkan angka penganggur terbuka;
3.	Isu Musrenbang	Pelatihan keterampilan kerja, penyaluran tenaga kerja.	

b. Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan pada urusan koperasi dan UKM sebagai berikut.

Tabel 2.163.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Koperasi dan UKM

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi;	- Lemahnya Kualitas
2.	Pokok Pikiran DPRD	Permasalahan yang dihadapi UKM saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang masih rendah, peran system pendukung yang kurang optimal, serta kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada isu strategis yaitu pertumbuhan usaha dan daya saing. Perkembangan koperasi di Kabupaten Temanggung tidak begitu Nampak atau bahkan seolah mengalami stagnasi, apalagi dengan hadirnya perusahaan finansial tehnologi yang menjamur. Banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi, hal ini karena pemerintah kurang memperhatikan dengan serius dalam hal perkembangannya, dan juga kesadaran masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah. Maka perlu dilakukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui Pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi baik sebagai badan usaha	Kelembagaan Koperasi yang aktif; - Modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya; - SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan; - Solidaritas antar anggota yang kurang terjalin; - Banyaknya usaha lain yang semakin menambah berat persaingan koperasi. - Masih adanya keterbatasan modal; - Terbatasnya kemampuan

No	Analisis		Permasalahan
		maupun sebagai gerakan dalam satu kiprah usaha yang simultan. Dengan koperasi mereka dapat menghimpun kekuatan-kekuatan kecil yang ada padanya, sebagai gerakan ekonomi rakyat, untuk memperkuat posisi tawar (<i>bargaining position</i>) mereka.	manajerial sumberdaya manusia pengelolanya; – Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai skema bantuan permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Isu Musrenbang	Pembinaan UKM dan koperasi, bantuan sarana prasarana bagi UKM.	

c. Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada urusan perdagangan sebagai berikut.

Tabel 2.164.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	<ul style="list-style-type: none"> – Cakupan nilai ekspor produk daerah; – Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal; – Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang; – Persentase penyelesaian sengketa konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> – Belum mampu mengembangkan wilayah pemasaran; – Sarana promosi produk belum optimal; – Terbatasnya kemampuan akses usaha;
2.	Pokok Pikiran DPRD	Upaya penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen, baik yang berada di sekitar pasar-pasar milik daerah, di sepanjang trotoar jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, dengan tetap memberikan peluang kepada para pelaku PKL untuk menjalankan	

No	Analisis		Permasalahan
		kegiatan ekonominya di lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah atau di lokasi lain yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.	
3.	Isu Musrenbang	Pembangunan kios desa, BUMDES	

d. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan penanaman modal sebagai berikut.

Tabel 2.165.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanaman Modal

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu; laju investasi; besaran jumlah investor.	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Iklim Investasi; - Belum adanya kemampuan untuk inovasi dan kreativitas;
2.	Pokok Pikiran DPRD	<p>Dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah perlu peningkatan pelayanan perijinan bagi kegiatan investasi daerah, maka pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan akuntabel akan membantu menciptakan iklim investasi daerah yang ramah bagi para pelaku usaha.</p> <p>Pengembangan ekonomi agar dilakukan pembinaan yang serius dan perlu ditingkatkan kemitraan antara stake holder baik dalam dan luar negeri yang akan mempermudah pengembangan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi. Temanggung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan teknologi masih terbatas - Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada; - Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor; - Belum semua Standart Operasional

No	Analisis		Permasalahan
		secara geografis merupakan daerah agraris. Dalam upaya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Temanggung, Dinas PM&PTSP harus terus meningkatkan kegiatan promosi, maupun peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta baik di dalam dan luar negeri, dengan dukungan data dan akses informasi potensi investasi yang jelas sehingga memudahkan investor untuk melihat peluang investasi di Kabupaten Temanggung.	Prosedur Pelayanan diperbupkan; – Pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, dengan realisasi IKD 18,05 % – terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi
3.	Isu Musrenbang	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Fasilitasi Ijin SIUP	

e. Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2.166.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pariwisata

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	cakupan pemeliharaan nilai tradisi budaya; Cakupan Promosi Cagar Budaya; Cakupan gelar seni. besaran lama tinggal wisatawan; persentase meningkatnya kunjungan wisatawan; besaran meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata; besaran pengembangan kemitraan pariwisata.	Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan.
2.	Pokok Pikiran DPRD		

No	Analisis		Permasalahan
3.	Isu Musrenbang	Perbaiki Jalan akses menuju lokasi destinasi pariwisata; Desa wisata.	

f. Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanian sebagai berikut.

Tabel 2.167.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	peningkatan cadangan pangan masyarakat; persentase meningkatnya skor pola pangan harapan; besaran desa mandiri pangan; Peningkatan produktifitas jagung; Peningkatan produktifitas kobis; Peningkatan produktifitas tembakau; Peningkatan produktifitas kopi robusta; Peningkatan produktifitas kopi arabika.	Ketahanan Pangan antara lain Pola Pangan Harapan, Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita dan Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita belum tercukupi; Rendahnya Produktivitas Pertanian, khususnya padi; Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat masih berlangsungnya konversi lahan; Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan; Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas sayuran, seperti: cabe, tomat, dan bawang merah; Pola konsumsi pangan masyarakat kurang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA); Beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, anti gumpal), dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah; Produk pangan segar hasil pertanian belum terbebas dari cemaran zat kimia (pestisida).
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Jalan Usaha Tani; Pelatihan pertanian; Bantuan alat-alat pertanian, bantuan benih, bantuan mempertahankan harga dalam pertembakauan; bantuan pelatihan pertanian khusus misalnya kopi, tembakau, tanaman buah.	

g. Pertanian-Peternakan

Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanian dan peternakan sebagai berikut.

Tabel 2.168.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian dan Peternakan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Peningkatan produktivitas daging sapi; Peningkatan produktivitas daging kambing; Peningkatan produktivitas daging domba.	Rendahnya Produktivitas Peternakan terutama Ternak Besar dan Ternak Kecil
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Bantuan ternak besar (sapi, kambing dan domba); Pelatihan peternakan unggas; Pelatihan pengolahan hasil peternakan.	

h. Perikanan

Permasalahan pembangunan pada urusan perikanan sebagai berikut.

Tabel 2.169.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perikanan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Penggunaan induk ikan unggul; Peningkatan produksi benih ikan; Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam); Peningkatan produksi mina padi; Produktivitas benih ikan; Produktivitas ikan konsumsi; Produktivitas mina padi; Peningkatan luas lahan budidaya ikan; Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum.	Tingkat Konsumsi Ikan rendah
2.	Pokok Pikiran DPRD		

No	Analisis		Permasalahan
3.	Isu Musrenbang	Pelatihan pengolahan hasil perikanan, pelatihan untuk meningkatkan produktifitas perikanan.	

3. Kelompok Infrastruktur

a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut.

Tabel 2.170.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya.	– Kualitas infrastruktur jalan, jembatan, Tata Ruang, dan Sanitasi Pemukiman belum sesuai standar dan aturan yang ada;
2.	Pokok Pikiran DPRD	Mengingat kondisi eksisting jalan kabupaten banyak yang rusak dan tidak layak lagi, serta beberapa ruas jalan yang lebarnya kurang memenuhi syarat, apalagi dengan penambahan jumlah kendaraan yang sangat cepat, maka sangat mendesak untuk dilakukan perencanaan ulang pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.	– Perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada. – Diperlukan pula penambahan jaringan jalan baru; – Kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya juga harus menjadi perhatian, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku; – Diperlukan aturan hukum yang kuat untuk membatasi konversi lahan pertanian yang subur.
3.	Isu Musrenbang	Pelebaran Jalan, pembangunan talud, gorong-gorong, senderan, drainase dan saluran irigasi.	

b. Perumahan dan Pemukiman

Permasalahan pembangunan pada urusan Perumahan dan Pemukiman sebagai berikut.

Tabel 2.171.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perumahan dan Pemukiman

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Air Minum yang layak; - Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya program perbaikan kampung karena diperkirakan masih banyak permasalahan perumahan dan permukiman; - Perlunya meningkatkan peranserta masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Layanan air minum; Layanan PDAM.	

c. Pertanahan

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanahan sebagai berikut.

Tabel 2.172.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	<ul style="list-style-type: none"> - Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat; - Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten. 	Masih banyak tanah bengkok yang dipakai untuk fasilitas umum belum diganti.
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Pensertifikatan tanah, tanah bengkok.	

d. Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada urusan Perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.173.
 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan
 Perhubungan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Tersedianya sub terminal (tipe c)	Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan belum tercukupi sesuai standart
2.	Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat menjadikan kerawanan dalam berlalu lintas. Menyikapi hal tersebut perlu ditingkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada sehingga akan tercipta keamanan dan keselamatan dalam berkendara bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.	
3.	Isu Musrenbang	Pembangunan terminal	

e. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Tabel 2.174.
 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Komunikasi dan
 Informatika

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi; Rasio Akses Internet di Ruang Publik.	Lemahnya Kualitas Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Teknologi Informasi Terintegrasi.
2.	Pokok Pikiran DPRD	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi merupakan kebutuhan pokok bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat sehingga proses pengembangannya perlu dipercepat dalam rangka peningkatan efisiensi komunikasi dan peningkatan akses informasi antar OPD dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.	
3.	Isu Musrenbang	Pembangunan tower untuk memperbaiki akses komunikasi (sinyal) di daerah.	

f. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut.

Tabel 2.175.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Lingkungan Hidup

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	TPA Temanggung wilayah Utara; Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air.	Rendahnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, tutupan Vegetasi/Lahan, dan Sampah Perkotaan.
2.	Pokok Pikiran DPRD		
3.	Isu Musrenbang	Bank sampah, pelatihan pengolahan sampah agar menjadi berkah.	

g. Sosial Kebencanaan

Permasalahan pembangunan pada urusan sosial kebencanaan sebagai berikut.

Tabel 2.176.

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial Kebencanaan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pelayanan bencana kebakaran; - Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>); - Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi. - PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis; - Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana masih rendah. - harus diantisipasi terjadinya bencana banjir yang lebih parah di masa mendatang. Karenanya, infrastruktur seperti prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim penghujan, sangat diperlukan.
2.	Pokok Pikiran DPRD		

4. Kelompok Pemerintahan

Permasalahan pembangunan pada kelompok pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 2.177.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Kelompok Pemerintahan

No	Analisis		Permasalahan
1.	Data makro	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa; Cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (bumdes, pasar desa, UED-SP, lumbung pangan); Persentase menurunnya rumah tangga sasaran (angka kemiskinan). Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di PD.	– Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah, dalam hal Tingkat Konsistensi Program Penguatan Daerah, Hasil Penelitian dan Pengkajian yang ditindaklanjuti dalam Kebijakan Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Nilai EKPPD, Opini Pemeriksaan BPK, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Persentase Temuan yang ditindaklanjuti, dan Persentase RAPERDA yang disahkan
2.	Pokok Pikiran DPRD	– kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi consensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah kabupaten Temanggung dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola dengan konsep <i>good governance</i> . Prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan konsep <i>good governance</i> tersebut. – Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola anggaran APBN dalam bentuk Dana Desa (DD) dan APBD kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Disamping itu masih dimungkinkan adanya bantuan keuangan ke desa, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi yang dalam pelaksanaan	

No	Analisis	Permasalahan
	<p>pengelolaannya belum didukung oleh kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian masih sangat diperlukan upaya-upaya bagi peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan desa melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pendampingan dan pengawasan secara intensif. Secara simultan jug diperlukan peningkatan kapasitas Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok-kelompok partisipatif masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa, dengan tujuan untuk menjamin agar pengelolaan Dana Desa dan ADD tepat sasaran sehingga desamenjadi semakin maju, sejahtera, mandiri dan demokratis.</p> <p>– Pengelolaan kepegawaian daerah harus ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang professional, berintegritas dan berdedikasi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima menuju <i>clean and good governance</i>. Strategi ini harus dibarengi dengan pengelolaan kepegawaian yang berdasarkan <i>merit system</i> (meritokrasi), sehingga memberikan peluang dan menjamin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kariernya secara maksimal. Sesuai dengan potensi dan kompetensinya serta sesuai</p>	<p>menjadi PERDA tepat waktu sesuai Prolegda;</p> <p>– Belum terwujudnya ASN sesuai Kompetensi, dalam Penempatan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan;</p> <p>– Lemahnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa;</p> <p>– Angka Kriminallitas, dengan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Cakupan Penegakan Perda dan Perbup.</p> <p>– perubahan mind-set dan <i>culture</i>.</p> <p>– Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat serta</p>

No	Analisis		Permasalahan
		<p>dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu penguatan baik secara kelembagaan maupun dari sisi sumberdaya manusianya, dari sisi kualitas maupun penambahan personil terhadap Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar semakin banyak menjangkau obyek pemeriksaan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penambahan jumlah tenaga auditor dirasakan mendesak mengingat tugas-tugas inspektorat sebagai APIP yang semakin berat karena menerima pelimpahan tugas dari BPK RI, BPKP dan bahkan dari KPK yang semakin meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. - menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), - pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan bebas KKN.
3.	Isu Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi potensi desa untuk dikembangkan menjadi desa mandiri. - Pengembangan desa baik dari aspek kelembagaan, SDM dan Inovasi - Penguatan desa dari desa rintisan sampai menjadi desa mandiri yang memiliki inovasi. 	

b. Isu Strategis

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka

secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis. Berdasarkan data dan informasi dalam permasalahan pembangunan, dapat diketahui adanya isu strategis di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah 68,48 dengan kategori sedang.
2. Jika dilihat dari komponen pembangun IPM di atas, Angka Harapan Hidup adalah sebesar 75,39 tahun (kategori baik), sedangkan Angka rata-rata lama sekolah adalah 6,55 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 11,89 tahun (kategori sangat rendah) dan Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan adalah Rp. 8,593 juta/tahun (kategori rendah).
3. Jumlah kasus kematian bayi pada Tahun 2017 di Kabupaten Temanggung adalah 137 kasus, sedangkan kematian ibu adalah 7 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya upaya pembangunan di kesehatan, baik lewat cara promotif, preventif maupun kuratif. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 adalah sebesar 13,20/1.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 adalah 67,45/100.000 KH. AKB Kabupaten Temanggung belum memenuhi angka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, sebanyak 12/1.000 KH. Sedangkan AKI Kabupaten Temanggung telah memenuhi target SDG's sebanyak 70/100.000 KH untuk AKI.
4. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2012 sampai 2016 turun dari 12,32% menjadi 11,60%, dengan kata lain penduduk miskin berkurang sebanyak 7.100 jiwa. Sampai Tahun 2018 ini, masih terdapat 87,09 ribu jiwa penduduk Kabupaten Temanggung yang hidup di bawah garis kemiskinan.
5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Temanggung berkurang 4.128 unit selama tiga tahun (Tahun 2015 sampai 2017), dan saat ini masih terdapat 32.725 unit RTLH yang harus ditangani.
6. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah 5,00 %, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,28 % dan Nasional sebesar 5,02 %. Jika dilihat selama 4(empat) tahun terakhir, ekonomi Temanggung tumbuh dengan kecenderungan pertumbuhan yang melambat dari 5,2 % pada Tahun 2013 menjadi 5,0 % pada Tahun 2017.
7. Pendapatan perkapita penduduk dengan pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung meningkat dari Rp. 16,34 juta/tahun pada Tahun 2012 menjadi Rp. 23,29 juta/tahun adalah Rp.23,29 juta/tahun pada

Tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pendapatan perkapita ini lebih rendah dibanding keduanya. Tahun 2017, pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 32,10 juta/tahun, sedangkan nasional adalah sebesar Rp. 47,96 juta/tahun.

8. Masih fluktuatifnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura serta produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung mengindikasikan masih terjadinya kegagalan panen, adanya konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan lainnya, serta belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budi daya pertanian dan perikanan di Kabupaten Temanggung.
9. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 baru mencapai 1 hari, artinya wisatawan yang datang ke Kabupaten Temanggung pulang ke daerahnya atau langsung menuju ke daerah lain pada hari yang sama, artinya sedikit wisatawan menginap di Kabupaten Temanggung. Dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten Temanggung, lama tinggal ini mestinya dapat ditingkatkan didukung dengan peningkatan sarana prasarana di objek wisata dan disertai keberadaan moda transportasi yang nyaman serta fasilitas akomodasi yang memadai.
10. Dari total 739,127 km jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 82,16 % jalan dalam kondisi baik (mantap) sampai Tahun 2017, masih terdapat 17,84% atau setara dengan 131,877 km jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
11. Dari total 335 unit jembatan kabupaten, terdapat 90,15% jembatan kabupaten berkondisi baik sampai Tahun 2017, masih ada 9,85 % atau 33 unit jembatan kabupaten dalam kondisi rusak.
12. Dari total 577 Daerah Irigasi (DI) kabupaten, masih terdapat 16,12% atau 93 DI yang belum berfungsi baik dan perlu penanganan.
13. Diantara 149 desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung, telah dibentuk 20,81% atau 31 desa/kampung siaga/tangguh bencana sampai Tahun 2017, masih terdapat 118 desa rawan bencana yang perlu ditingkatkan pemahamannya tentang upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana.
14. Persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 adalah 82,67%, atau dengan kata lain masih ada 43.142 unit rumah yang belum memiliki akses air minum yang layak. Sedangkan persentase rumah tinggal dengan sanitasi layak adalah 80,06%, atau dengan kata lain masih terdapat 49.641 rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
15. Masih diperlukannya pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi, hal ini terlihat dari total 266 desa, sampai Tahun 2017 masih terdapat 150 desa yang belum terhubung internet pada jaringan Dinkominfo. Tidak hanya

infrastruktur jaringan, namun lebih jauh di Kabupaten Temanggung masih diperlukan pengembangan sistem informasi pendukung *e-governance*.

16. Masih perlunya upaya perbaikan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terlihat dari capaian Nilai SAKIP sampai Tahun 2017 bernilai CC (kategori memadai). Hal ini mengandung arti bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya agar ke depan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung dapat meningkat menjadi bernilai B (kategori baik), bernilai A (kategori sangat baik) bahkan bernilai AA (kategori memuaskan).
17. Pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Temanggung merupakan isu yang tidak kalah penting dalam rangka meningkatkan kemampuan, kinerja, serta pelayanan pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel (*clean governance*).

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah misalnya kebijakan sektor moneter maupun *administered price*. Selain itu dipengaruhi juga oleh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sesuai dengan RKP 2019 yang mengusung visi pembangunan, Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat dengan dimensi sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Indikator Pembangunan Tahun 2019

Indikator Pembangunan	Skenario 2019
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,6
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,2
Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,5
Rasio gini (indeks)	0,38 - 0,39
Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

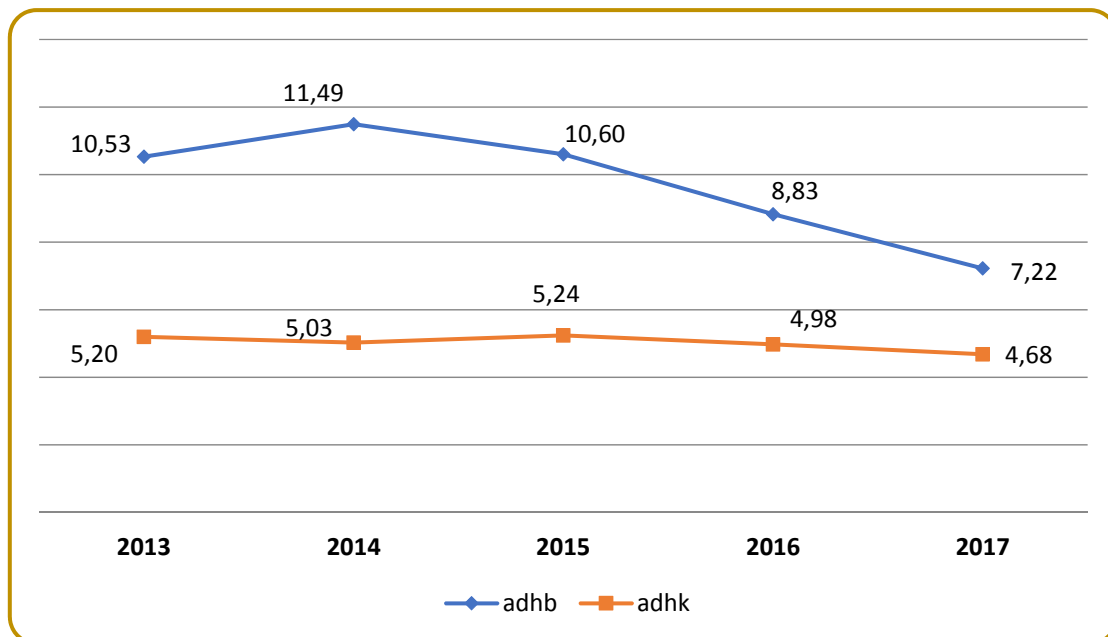
Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, dan sektor lain yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja. Kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, perkiraan Tahun 2018 dan 2019 dijabarkan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017



Sumber: Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari grafik di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi trennya mengalami penurunan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat. Prediksi dan target Laju pertumbuhan ekonomi Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Prediksi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	4,68	5,27	5,07
2018	5,02*	5,35*	5,50**
2019	5,05*	5,40*	5,2 – 5,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Keterangan: * Target RKPD Kabupaten Temanggung, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2019 **data Statistik Triwulan I 2018

Prediksi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 hingga 2019 diperkirakan akan meningkat terus namun masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar 23,29Trilyun Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 17,42Trilyun Rupiah. Tiga lapangan usaha utama yaitu kategori Industri Pengolahan (26,83 persen), kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,27 persen) dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,35 persen) menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017 (persen)

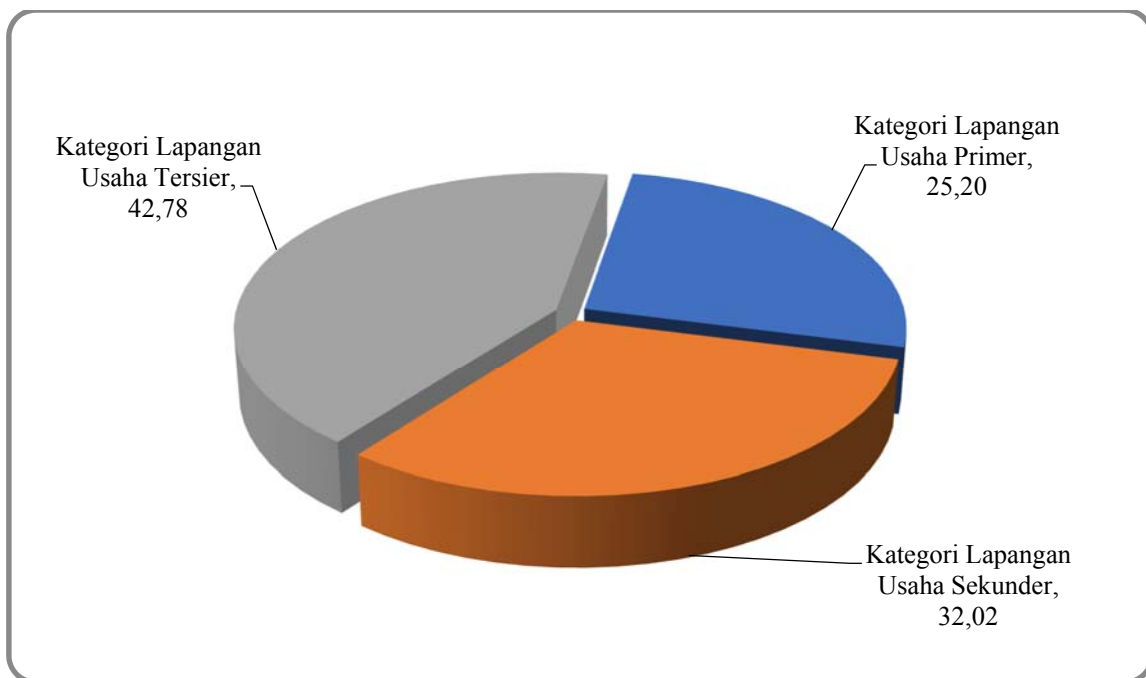
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,57	25,59	25,97	25,47	24,30
B Pertambangan & Penggalian	0,78	0,83	0,87	0,89	0,90
C Industri Pengolahan	25,50	26,47	26,47	26,77	27,05
D Pengadaan Listrik & Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F Konstruksi	4,37	4,48	4,62	4,61	4,82
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil &	20,99	20,72	20,27	20,31	20,43
H Transportasi & Pergudangan	4,18	4,17	4,25	4,26	4,42
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,51	1,46	1,53	1,57	1,63
J Informasi & Komunikasi	1,39	1,38	1,25	1,22	1,31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	3,14	3,17	3,24	3,30
L Real Estat	0,75	0,75	0,75	0,74	0,76
M,N Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,04	2,93	2,90	2,88	2,83
P Jasa Pendidikan	4,53	4,63	4,54	4,58	4,66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,08	1,08	1,13
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,82	1,90	1,85	1,91	1,95
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 sampai 2017 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

Kontribusi kelompok kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2017 yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 25,20 persen. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 32,02 Persen. Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,78 persen. Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan.

Grafik 3.2.
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB perkapita. Dengan penduduk pertengahan tahun 2017 sebanyak 759.093 jiwa di Kabupaten Temanggung maka didapatkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar Rp.24.810.094,42. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya
Tahun 2013 – 2017

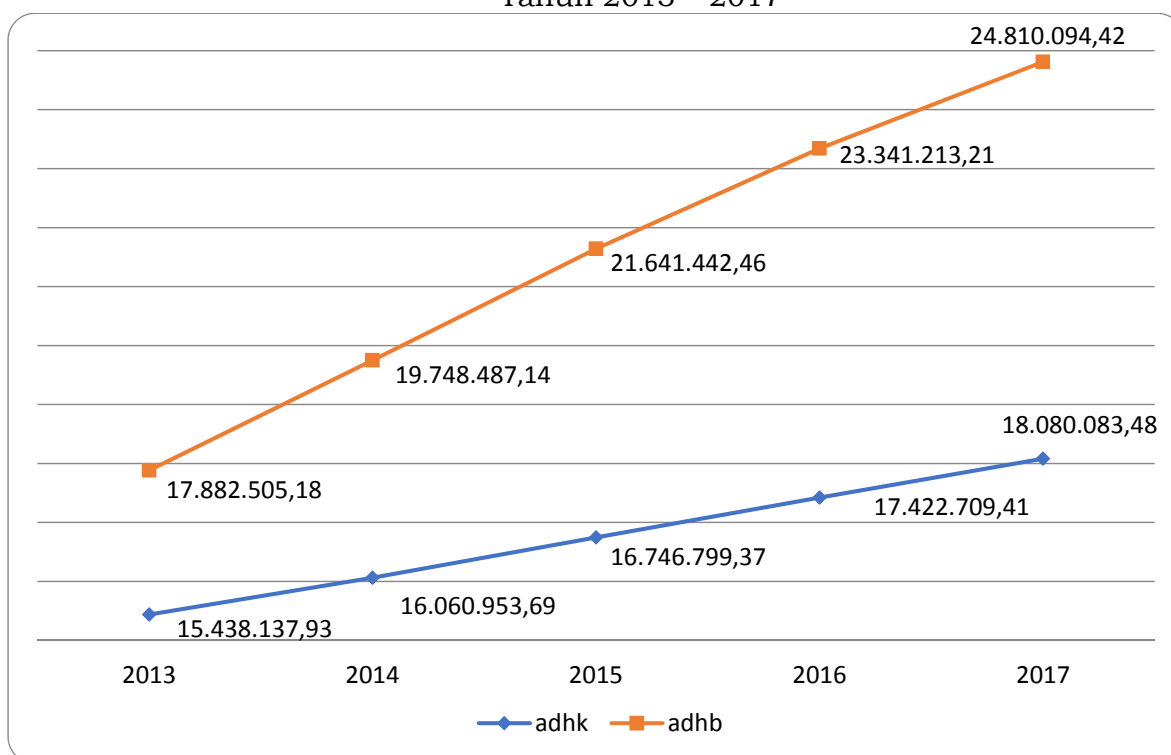
Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Grafik di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 3.3.
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

4. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Temanggung selama tahun 2016 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2016 secara tahunan (*year on year*) angka inflasi Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,42persen, lebih kecil jika dibandingkandengan inflasi tahun 2015 yang mengalami inflasi sebesar 2,74 persen. Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2016 ini hampir samajika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yaitu sebesar 2,36 persen dan lebih kecil dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 3,02 persen.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Perkiraan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional,
Tahun 2018-2019

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2018	4,00	3,32	3,74
2019	4,00	3,00	3,42

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2018

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2018 – 2019 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja.

Inflasi tahun 2016 terjaga karena kondisi perekonomian cukup stabil dan tidak ada kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan gejolak kenaikan harga. Di tahun 2017 inflasi masih terjaga di kisaran 3 persen. Hingga tahun 2018 dan 2019 diperkirakan tingkat inflasi masih rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Temanggung di tahun 2019 maka kebijakan keuangan daerah yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain melalui:

- a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, belum bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

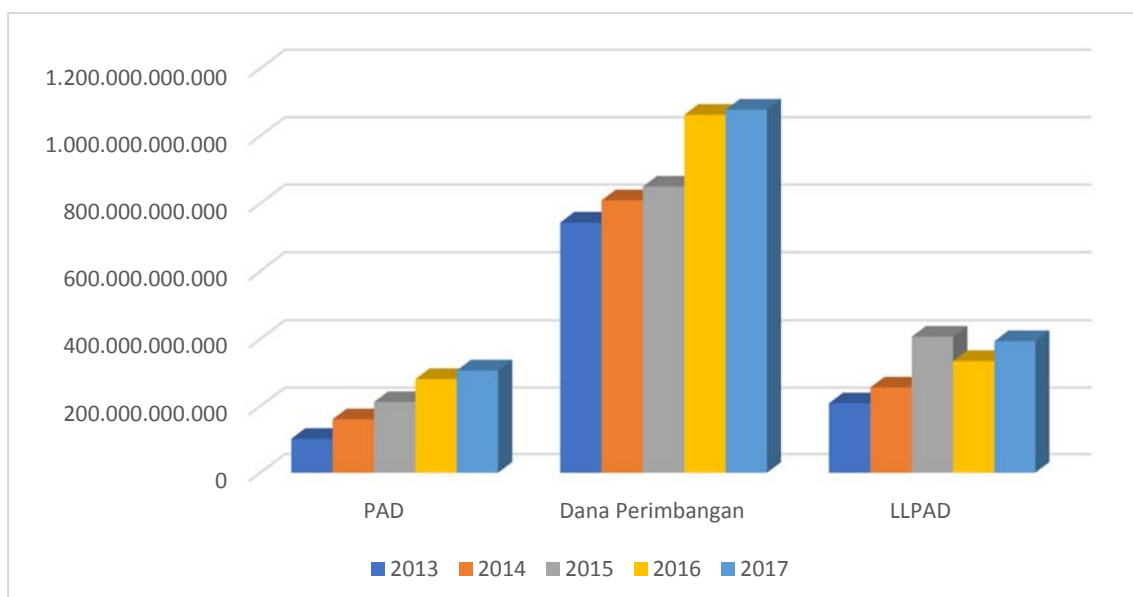
Tabel 3.6.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017
1.1	Pendapatan Asli Daerah	102.080.197.094	160.726.943.432	212.498.139.929	281.328.148.970	306.787.002.252
1.1.1	Pajak Daerah	25.583.570.757	29.622.602.704	31.523.819.462	32.480.985.449	38.293.545.332
1.1.2	Retribusi Daerah	15.480.551.151	20.299.495.547	13.410.490.650	63.764.882.916	16.478.395.156
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.287.250.631	11.246.688.910	13.060.829.257	13.013.670.038	13.758.155.041
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.728.824.555	99.558.156.271	154.503.000.560	172.068.610.567	238.256.906.723
1.2	Dana perimbangan	743.027.752.791	808.979.527.761	849.969.443.934	1.062.555.838.091	1.077.438.506.791
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	50.228.458.791	43.511.964.761	45.507.112.934	55.551.255.813	56.039.630.697
1.2.2	Dana alokasi umum	651.171.674.000	708.764.753.000	731.733.741.000	807.995.010.000	793.801.136.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	41.627.620.000	56.702.810.000	72.728.590.000	199.009.572.278	227.597.740.094
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	208.737.621.875	256.433.096.853	407.015.374.242	334.804.092.109	393.657.435.020
1.3.1	Hibah	428.077.240	725.668.600	9.296.687.923	2.060.684.299	1.207.262.020
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah	43.787.719.599	58.804.804.253	83.195.805.819	79.853.949.810	92.719.259.000

	lainnya					
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	136.253.400.000	163.166.074.000	183.164.016.500	40.789.358.000	50.197.943.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	28.268.425.036	33.736.550.000	58.935.212.000	49.604.500.000	42.081.248.000
1.3.6	Dana Desa	-	-	72.423.652.000	162.495.600.000	207.451.723.000
Jumlah pendapatan daerah		1.053.845.571.760	1.226.139.568.046	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.777.882.944.063

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Grafik 3.4.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Kinerja keuangan daerah selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

- a. Sumber-sumber pendapatan daerah belum semuanya memiliki buku potensi;
- b. Manajemen pendapatan asli daerah belum optimal;
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Pemberdayaan aset daerah belum optimal;
- e. Koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah belum optimal.

Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi besarnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
 Persentase Pendapatan Asli Daerah
 terhadap Total Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2013	102.080.197.094	1.003.617.112.969	10,17
2014	160.726.943.432	1.182.627.603.285	13,59
2015	212.498.139.929	1.423.975.845.171	14,92
2016	281.328.148.970	1.623.136.823.357	17,33
2017	306.787.002.252	1.777.882.944.063	17,26

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018.

Proporsi PAD Kabupaten Temanggung terhadap total pendapatan daerah mencapai rata-rata 14,65 persen. Komponen pembentuk PAD terbesar bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 62,57 persen, dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 37,42 persen.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- d. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan.

3. Realisasi Belanja Daerah

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Besarnya belanja tidak langsung tidak menggambarkan belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukkan bagi

masyarakat maupun desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 secara lengkap terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017
2.1	Belanja tidak langsung	713.737.922.696	743.761.033.296	896.584.646.674	1.018.552.299.313	1.047.864.415.285
2.1.1	Belanja pegawai	573.983.834.062	609.072.551.329	672.248.809.793	693.357.561.140	642.555.680.035
2.1.2	Belanja bunga	1.352.611.525	1.006.766.714	4.424.201.466	4.955.946.912	3.441.215.299
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	58.141.919.542	70.509.291.100	48.055.711.613	27.922.492.123	50.920.625.000
2.1.5	Belanja bantuan social	29.564.076.045	17.601.444.713	16.220.719.040	20.041.633.799	10.522.953.625
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa/kel	4.316.725.502	4.507.625.240	3.981.017.942	4.568.849.675	4.566.985.731
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	46.156.911.020	40.646.938.200	151.539.286.820	266.742.530.989	335.856.955.595
2.1.8	Belanja tidak terduga	221.845.000	416.416.000	114.900.000	963.284.675	0
2.2	Belanja langsung	287.103.302.499	427.119.269.576	608.419.098.381	720.989.689.476	717.085.950.740
2.2.1	Belanja pegawai	36.481.807.690	40.060.522.279	39.338.729.402	42.514.652.935	68.399.627.273
2.2.2	Belanja barang dan jasa	146.815.985.535	188.606.981.218	248.741.874.870	279.987.740.632	336.153.037.107
2.2.3	Belanja modal	103.805.509.274	198.451.766.079	320.338.494.109	398.487.295.909	312.533.286.360
Total Jumlah Belanja		1.000.841.225.195	1.170.880.302.872	1.505.003.745.055	1.739.541.988.789	1.764.950.366.025

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018.

4. Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah

Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9.
Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2013	287.103.302.499	1.000.841.225.195	28,69
2014	427.119.269.576	1.170.880.302.872	36,48
2015	608.419.098.381	1.505.003.745.055	40,43
2016	720.989.689.476	1.739.541.988.789	41,45
2017	717.085.950.740	1.764.950.366.025	40,63

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Proporsi Belanja Langsung Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 37,53 persen. Persentase Belanja Langsung pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 41,45 persen sedangkan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,69 persen.

5. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah

Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.10.
Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2013	713.737.922.696	1.000.841.225.195	71,31
2014	743.761.033.296	1.170.880.302.872	63,52
2015	896.584.646.674	1.505.003.745.055	59,57
2016	1.018.552.299.313	1.739.541.988.789	58,55
2017	1.047.864.415.285	1.764.950.366.025	59,37

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 62,47 persen. Persentase Belanja Tidak Langsung selama 5 (lima) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 71,31 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 58,55 persen.

6. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11.
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Daerah	Persentase
2013	103.805.509.274	1.000.841.225.195	10,37
2014	198.451.766.079	1.170.880.302.872	16,95
2015	320.338.494.109	1.505.003.745.055	21,28
2016	398.487.295.909	1.739.541.988.789	22,91
2017	312.533.286.360	1.764.950.366.025	17,71

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Proporsi Belanja Modal Kabupaten Temanggung terhadap total Belanja Daerah mencapai rata-rata 17,84 persen. Persentase Modal Langsung selama 5 (lima) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,91 persen dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,37 persen.

7. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada

tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran 2017 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah
Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- 3) Penerimaan pembiayaan yang lain
Dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah akan disesuaikan sesuai dengan roadmap penyertaan modal daerah.
- 2) Pembayaran pokok hutang
Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
- 3) Pengeluaran pembiayaan yang lain
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 secara jelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.12.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017
3.1	Penerimaan pembiayaan	59.438.956.293	146.196.105.574	252.760.379.283	231.549.706.413	117.346.469.488
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	41.776.547.255	102.999.147.464	192.382.144.363	188.309.853.466	111.281.501.116
3.1.2	Pencairan dana cadangan	12.867.002.883	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	37.579.771.350	51.378.500.450	28.207.575.074	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	243.081.070	110.592.998	120.001.232	263.730.458	239.918.870
3.1.7	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	4.552.325.085	5.506.593.762	8.879.733.238	14.768.547.415	5.825.049.502
3.1.8	Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran pembiayaan	9.444.155.394	9.073.226.385	28.929.738.867	59.414.295.678	67.073.689.628
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	7.500.000.000	7.500.000.000
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.533.609.000	4.500.000.000	5.000.000.000	9.950.000.000	10.000.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	18.000.000.000	33.460.784.816	34.600.235.834
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3.2.7	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	4.910.546.394	4.573.226.385	5.929.738.867	8.503.510.862	14.973.453.794
Jumlah Pembiayaan Netto		49.994.800.899	137.122.879.189	223.830.640.416	172.135.410.735	50.272.779.860

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

8. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.13.
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Temanggung

Tahun	Opini BPK-RI
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD tahun 2018 seperti yang sebelumnya dipaparkan dalam Bab II, sebagai pijakan kondisi eksisting untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2019. Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019,
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019,
3. RPJP Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025,
4. Rekapitulasi prioritas pokok pikiran DPRD,
5. Hasil kebijakan *top down* maupun *bottom up* dan partisipatif dari hasil musrenbang tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1
Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu: (i) Tujuan dan Sasaran Pembangunan; (ii) Prioritas Pembangunan dan (iii) Arah Kebijakan Pembangunan. Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan diturunkan dari RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025 bagian ke-3 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 telah berakhir dan RPJMD periode Tahun 2018-2023 baru akan disusun dalam kurun waktu enam bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019, maka Bupati Temanggung yang saat ini dijabat oleh PjS Bupati Temanggung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan berpedoman pada Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah

Tahun 2019 dengan mendasarkan pada dokumen RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan isu strategis maupun permasalahan pembangunan pada saat ini, sebelum RPJMD 2018 – 2023 tersusun. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang merupakan dokumen transisi dalam periode perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Bupati terpilih hasil Pemilukada 2018, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2019.

RKPD Tahun 2019 ini memuat sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja pembangunan daerah dan indikasi rencana program pembangunan daerah Tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2013 – 2018 maupun permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru. Dokumen RKPD tahun 2019 merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2000 – 2025.

Berdasarkan pada kondisi Kabupaten Temanggung, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025 adalah:

“TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Temanggung. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat, kemajuan, kemandirian, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Temanggung diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju diartikan bergerak dan meningkat serta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai dari aspek ekonomi yang berpusat pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran, dari aspek sosial yang berpusat pada peningkatan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia, dan dari aspek kependudukan yang berpusat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Muara dari suatu kemajuan adalah daerah dan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemampuan keuangan daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Mandiri diartikan dalam berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek *networking*. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi PAD dan jumlah atau nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Aman diartikan sebagai keadaan yang bebas dari ketakutan akan bahaya atau hal-hal yang membahayakan. Keamanan suatu daerah berarti suasana daerah yang tidak terancam baik bagi penduduknya maupun bagi wilayahnya, masyarakat dapat beraktifitas tanpa merasakan kecemasan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur faktor keamanan adalah angka kriminalitas dan jumlah konflik vertikal dan horisontal.

Adil diartikan sebagai tiadanya kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Kondisi keadilan juga ditekankan pada adanya kesamaan perlakuan terhadap setiap anggota masyarakat atau penduduk di segala sektor kehidupan termasuk keadilan dalam memperoleh kepastian dan penegakkan hukum, serta hak asasi manusia. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan adalah angka kesenjangan antar penduduk dan angka kesenjangan antar wilayah serta nilai jaminan sosial masyarakat.

Sejahtera diartikan sebagai kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil/lahir) maupun sosial (spirituil/batin) secara adil dan merata. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM), dan persentase kepala keluarga (KK) miskin.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

1. **Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat** adalah makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah, semakin optimalnya aplikasi prinsip-prinsip *good governance*, makin baiknya kondisi kapasitas daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, aparatur dan kemampuan keuangan daerah, makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok usaha dan masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, makin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan pemerintah.
2. **Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin** adalah suasana kehidupan perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, tumbuhnya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menjadi masyarakat yang berkualitas secara lahir/jasmani dan bathin/rohani, manusia yang cerdas dan sehat, menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
3. **Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah** adalah mantap dan kuatnya kondisi perekonomian daerah yang tumbuh dengan signifikan ditopang struktur ekonomi berbasis sektor unggulan yang kuat, semakin mantapnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada sinergitas antara pelaku ekonomi kuat dan lemah, semakin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model linkage, tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat ekonomi baru pada tingkat pedesaan berbasis cluster usaha yang terintegrasi.
4. **Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah** adalah semakin kuatnya kemampuan daerah yang mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, makin

mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, yang berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan antar wilayah.

5. **Mewujudkan suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM dalam praktek penyelenggaraan pembangunan menuju kondisi daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram** adalah makin mantapnya kebijakan dan regulasi diberbagai bidang, khususnya politik dan hukum, makin matangnya kondisi kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, makin tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, makin berkurangnya tingkat kriminalitas dan konflik menuju daerah yang aman, tertib dan tenteram.
6. **Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang** adalah makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk menegakkan hukum atas pelanggaran aspek sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005–2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Temanggung yang maju, mandiri, aman, adil dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil dan sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

- A. Terwujudnya pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ditandai oleh hal-hal berikut.
1. Makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam era otonomi daerah yang bersendikan pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip *good governance* secara optimal.
 2. Makin mantapnya kemampuan, kemandirian dan kapasitas daerah (pemerintah) dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan dan aset daerah, data informasi berbasis *e-government*, dan pengawasan.
 3. Makin kuat dan berkembangnya kerjasama dan jejaring (*networking*) antara pemerintah daerah dengan berbagai kelompok usaha dan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
 4. Makin optimalnya kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dan aparatur pemerintah berbasis pada standar pelayanan minimum sehingga makin meningkatkan kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan pemerintah.
- B. Terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Makin mantap dan kondusifnya suasana perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Makin tumbuhnya masyarakat yang berkarakter unggul, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berbudi luhur, bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
 3. Makin mantapnya kualitas masyarakat, baik secara lahir (jasmani) maupun bathin (rohani), yang antara lain ditunjukkan dengan sumber daya manusia manusia yang cerdas dan sehat yang merupakan bagian dari masyarakat yang sejahtera.

C. Terwujudnya perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Makin mantapnya kondisi perekonomian daerah yang tumbuh dengan signifikan ditopang oleh kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor atau lapangan usaha unggulan daerah.
2. Makin mantapnya prioritas pengembangan ekonomi daerah yang menekankan pada peran strategis pelaku ekonomi kerakyatan (usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi) dan makin berkembangnya sinergitas antara pelaku ekonomi kuat dan lemah.
3. Makin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model linkage sebagai suatu keunggulan kompetitif yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
4. Makin berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada tingkat pedesaan yang berbasis cluster usaha secara terintegrasi dari hilir ke hulu.

D. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Makin mantapnya kuantitas dan kualitas penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Makin kuatnya kemampuan daerah didukung dengan makin besarnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana publik.
3. Makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan antar wilayah.

- E. Mewujudkan suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM dalam praktek penyelenggaraan pembangunan menuju kondisi daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, yang ditandai oleh hal-hal berikut.
1. Makin mantap dan konsistennya kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam ikut serta menjaga kondusifitas dan kestabilan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, khususnya politik dan hukum.
 2. Makin matangnya kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
 3. Makin mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menuju pada tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.
 4. Makin berkurangnya angka kriminalitas dan konflik menuju daerah yang aman, tertib dan tenteram.
 5. Makin mantapnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- F. Mewujudkan pembangunan daerah secara keberlanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, yang ditandai oleh hal-hal berikut.
1. Makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
 2. Makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten dalam penegakkan hukumnya.
 3. Makin meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2019 ini mendasarkan pada isu strategis dan permasalahan yang dianalisis dari data kondisi eksisting pada tahun 2017 serta mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kelompok Pembangunan Manusia; 2) Kelompok Ekonomi; dan 3) Kelompok Pemerintahan.

1. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pembangunan Manusia

Tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan pada kelompok Pembangunan Manusia adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, yang mempunyai 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Pendidikan;
- b. terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kesehatan;
- c. meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- d. meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
- e. meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- f. meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- g. meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; dan
- i. meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Tujuan dan Sasaran Kelompok Ekonomi

Tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan kelompok Ekonomi adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, yang mempunyai 6 (enam) sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. meningkatnya pariwisata daerah;
- d. meningkatnya investasi sektor riil;
- e. meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah; dan
- f. meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pemerintahan

Tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan kelompok Pemerintahan adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan, pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”, yang mempunyai 5 (lima) sasaran yaitu:

- a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- d. meningkatnya ketentraman, dan ketertiban; dan
- e. meningkatnya kapasitas kelembagaan.

4.2. Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Kelompok Pembangunan Manusia

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pembangunan Manusia mempunyai 15 (lima belas) program prioritas yaitu:

- a. program peningkatan akses pendidikan SD;
- b. program peningkatan akses pendidikan SMP;
- c. program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. program peningkatan keselamatan ibu;
- e. program peningkatan pelayanan kesehatan anak;
- f. program perbaikan gizi masyarakat;
- g. program pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
- h. program pembinaan kepemudaan;
- i. program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
- j. program pengelolaan kebudayaan;
- k. program pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. program penanganan fakir miskin;
- m. program perlindungan dan jaminan sosial;
- n. program pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- o. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

2. Kelompok Ekonomi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Ekonomi mempunyai 19 (sembilan belas) program prioritas yaitu:

- a. program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan;
- b. program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak;
- c. program peningkatan ketahanan pangan;
- d. program pengembangan perikanan;
- e. program pengembangan kepariwisataan;
- f. program pengembangan industri;
- g. program Pengembangan Perdagangan;
- h. program pengembangan koperasi dan UMKM;
- i. program perluasan kesempatan kerja;
- j. program Peningkatan Iklim Investasi;
- k. program penyelenggaraan jalan;
- l. program penyelenggaraan jembatan;
- m. program pengembangan dan pengelolaan jaringan- irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
- n. program pengembangan perumahan dan permukiman;
- o. program penyelenggaraan tata ruang;
- p. program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran;
- q. program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup; dan
- r. program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

3. Kelompok Pemerintahan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pemerintahan mempunyai 15 (lima belas) yaitu:

- a. program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;
- c. program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
- d. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- e. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi.
- h. program pengembangan komunikasi dan informasi publik;
- i. program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi;

- j. program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- k. program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
- l. program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa;
- m. program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- n. program pengembangan wawasan kebangsaan; dan
- o. program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5 - 9,5 persen; rasio gini 0,38 - 0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8 - 5,2 persen. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek ("satuan 3") dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk kebijakan 5 Prioritas Nasional terdiri dari 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. 3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4) Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air. 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Gambar 4.2.
Prioritas Nasional RKP 2019

Keterkaitan antara sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dengan PN RKP 2019 dapat diketahui sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan Prioritas Nasional RKP 2019

Kelompok Pembangunan Manusia				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya Indikator Tujuan: 1. Indek Pembangunan Manusia 2. Angka Kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	- Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	- Program peningkatan akses pendidikan SD;	PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
		- Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	- Program peningkatan akses pendidikan SMP;	
	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	- Angka Harapan Hidup (AHH)	- Program Kesehatan Masyarakat;	
		- Angka Kematian Ibu (AKI)	- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;	
		- Angka Kematian Bayi (AKB)		
		- Prevalensi balita gizi buruk		
		- Persentase rumah tangga yang memiliki jamban		
		- Indeks RSUD		
	3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	- Persentase peminjam perpustakaan	- Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;	
	4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	- Indeks Kepemudaan	- Program pembinaan kepemudaan; - Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;	
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	- Persentase pelestarian cagar budaya	- Program pengelolaan kebudayaan;		
	- Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	- Program pengembangan rumah sehat;		
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	- Indeks Gotong Royong - Indeks Toleransi	- Program pengembangan wawasan kebangsaan;	PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	
7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan	- Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Persentase rehabilitasi sosial dasar	- Program penanganan fakir miskin; - Program perlindungan dan jaminan sosial;	PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	

Kelompok Pembangunan Manusia				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
	Jamian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial		
	8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	– Laju pertumbuhan penduduk	– Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;	
	9. Meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	– Indeks pembangunan gender (IPG)	– Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;	
		– Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)		

Kelompok Ekonomi				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikator Tujuan: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Pendapatan per Kapita 4. Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	– Nilai Tukar Petani (NTP)	– Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan; – Program peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak;	PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
	2. Meningkatnya kedaulatan pangan	– Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	– Program peningkatan ketahanan pangan;	PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
		– Tingkat Konsumsi Ikan	– Program pengembangan budidaya perikanan;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
	3. Meningkatnya pariwisata daerah	– Pertumbuhan jumlah wisatawan – Lama tinggal wisatawan	– Program pengembangan kepariwisataan;	PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan

Kelompok Ekonomi				PN RKP 2019	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		
	4. Meningkatnya investasi sektor riil	- Kontribusi sektor perindustrian	- Program pengembangan industri;	penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya	
		- Kontribusi sektor perdagangan	- Program Pengembangan Perdagangan;		
		- Laju investasi daerah	- Program pengembangan koperasi dan UMKM;		
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	- Program peningkatan produktifitas tenaga kerja;		
		- Persentase Koperasi aktif	- Program Peningkatan Iklim Investasi;		
		- Persentase UKM aktif			
	5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	- Indeks Infrastruktur Wilayah	- Program penyelenggaraan jalan;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	
			- Program penyelenggaraan jembatan;		
			- Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang		PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air
			- Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan		PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
- Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	- Program penyelenggaraan tata ruang;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman			
	- Program pengelolaan lalu lintas dan parkir;				
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	- Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;	PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air		
		- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;			

Kelompok Ekonomi				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
	7. Meningkatnya kesejahteraan petani	- Nilai Tukar Petani (NTP)	- Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan; - Program peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak;	PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
	8. Meningkatnya kedaulatan pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	- Program peningkatan ketahanan pangan;	
		- Tingkat Konsumsi Ikan	- Program pengembangan budidaya perikanan;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
	9. Meningkatnya pariwisata daerah	- Pertumbuhan jumlah wisatawan	- Program pengembangan pariwisata;	PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya
		- Lama tinggal wisatawan	- Program pengelolaan kebudayaan;	
	10. Meningkatnya investasi sektor riil	- Kontribusi sektor perindustrian	- Program pengembangan industri;	
		- Kontribusi sektor perdagangan	- Program Pengembangan Perdagangan;	
		- Laju investasi daerah	- Program pengembangan koperasi dan UKM;	
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	- Program peningkatan produktivitas tenaga kerja;	
		- Persentase Koperasi aktif	- Program Peningkatan Iklim Investasi;	
	11. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	- Indeks Infrastruktur Wilayah	- Program penyelenggaraan jalan; - Program penyelenggaraan jembatan;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang		- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan- irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;	PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air	

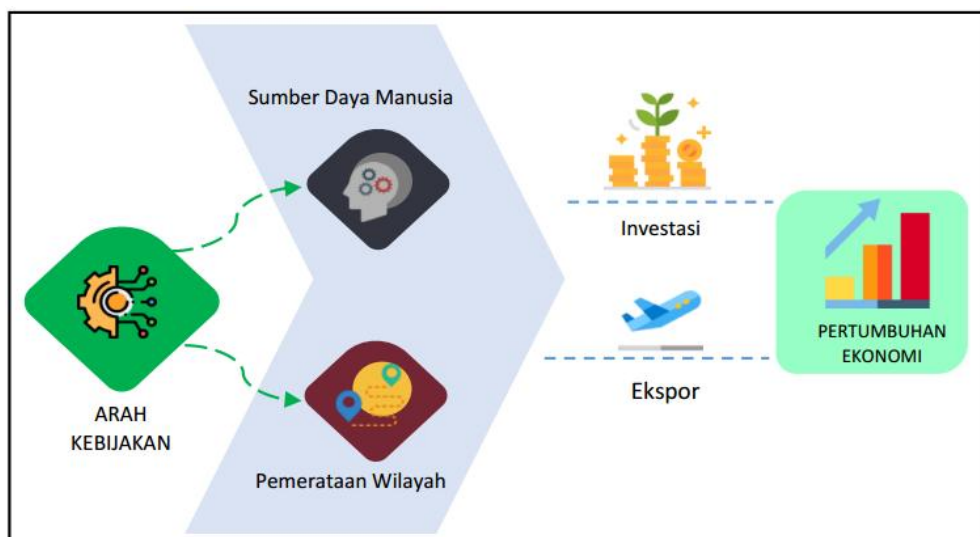
Kelompok Ekonomi				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
			- Program penyelenggaraan tata ruang;	
		- Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	- Program pengembangan rumah sehat;	PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
		- Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	- Program pengelolaan lalu lintas dan parkir;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
	12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	- Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup; - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;	PN 4: Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air

Kelompok Pemerintahan				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi Indikator Tujuan : 1. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	- Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	- Program pengembangan Lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan Kawasan perdesaan;	PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
		- Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Program pengelolaan keuangan daerah;	
		- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	- Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;	
		- Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;	
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;	

Kelompok Pemerintahan				PN RKP 2019
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
2. Indek Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM)		- Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	- Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;	PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
		- Indeks Persepsi Korupsi		
		- Indeks Profesionalisme ASN	- Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;	
		- Indeks Manajemen Kearsipan		
		- Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu		
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Program pengembangan komunikasi dan informasi publik;	PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
		- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	- Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi;	
		- Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik	- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;	PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
	3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	- Indeks Desa Membangun	- Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga; - Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan;	
		- Persentase desa yang berpredikat mandiri		
4. Meningkatnya ketentraman, dan ketertiban	- Indek rasa aman	- Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; - Program pengembangan wawasan kebangsaan;	PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan	- Cakupan Desa Tangguh Bencana	- Program penanganan tanggap darurat bencana; - Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.		

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Arah kebijakan Nasional digambarkan sebagai berikut.



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Gambar 4.3.
Arah Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung searah dengan arah kebijakan nasional yaitu menuju upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, sehingga diharapkan perekonomian akan lebih berkembang serta mendukung ketercapaian sasaran dan program prioritas nasional dengan upaya untuk meningkatkan investasi dan ekspor.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan menyingkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi prioritas program/kegiatan untuk pengendalian, monitoring serta evaluasi. Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, indikator program yang menggambarkan ketercapaian program, kondisi capaian program Tahun 2017, prediksi capaian program Tahun 2018, dan penetapan target kinerja program Tahun 2019. Selain itu juga ditambahkan rumus dan formulasi penghitungan realisasi kinerja program serta penjelasan indikator kinerja program.

RKPD mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tabel 5.1.
Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
1.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	70,00	80,00	88,11	Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	40,00	42,00	43,38	Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%	-	
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	35,00	39,00	43,38	Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik TK dikali 100%	-	
2.	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD sederajat	%	112,13	109,60	109,40	Jumlah siswa SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase APM SD sederajat	%	96,59	96,64	96,70	Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12 tahun di bagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	-	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,49	97,60	97,70	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP sederajat dibagi jumlah lulusan pada jenjang SD sederajat tahun ajaran sebelumnya dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	64,32	65,53	66,74	Jumlah ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SD negeri dikali 100%	Kondisi baik = sesuai standar sarana prasarana	
3.	Program peningkatan mutu pendidikan SD	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	93,40	94,39	95,37	Jumlah SD negeri/swasta terakreditasi A dan B dibagi jumlah SD dikali 100%	-	Dindikpora
		Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100	Jumlah lulusan SD/MI dibagi jumlah dibagi jumlah peserta ujian dikali 100%	-	
		Angka Putus Sekolah SD sederajat	%		0,09	0,07	Jumlah capaian kinerja APtS SD sederajat dibagi jumlah seluruh APtS SD sederajat dikali 100%	-	
4.	Program peningkatan akses pendidikan SMP	Persentase APK SMP sederajat	%	95,40	97,00	98,20	Jumlah siswa SMP-sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase APM SMP sederajat	%	81,79	83,50	84,50	Jumlah siswa SMP-sederajat usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	-	
		Angka melanjutkan SMP sederajat ke SMA sederajat	%	80,52	81,00	81,52	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA sederajat dibagi jumlah lulusan pada jenjang SMP sederajat tahun ajaran sebelumnya dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	70	90,47	92,03	Jumlah ruang kelas SMP negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SMP negeri dikali 100%	-	
5.	Program peningkatan mutu pendidikan SMP	Prosentase SMP terakreditasi minimal B	%	84,50	85,50	90,54	Jumlah SMP negeri/ swasta terakreditasi A dan B dibagi jumlah SMP dikali 100%	-	Dindikpora
		Angka kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	Jumlah lulusan SMP/ MTs dibagi jumlah peserta ujian dikali 100%	-	
		Angka Putus Sekolah SMP sederajat	%		0,3	0,28	Jumlah capaian kinerja APtS SMP sederajat dibagi jumlah seluruh APtS SMP sederajat dikali 100%	-	
6.	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	73,85	75,53	77,20	Jumlah peserta didik PAUD formal dan nonformal usia 4-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	38,21	38,36	38,50	Jumlah peserta didik PAUD formal dan nonformal usia 0-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
7.	Program peningkatan mutu PAUD	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	45,15	46,50	47,85	Jumlah TK negeri/ swasta terakreditasi A dan B dibagi jumlah TK dikali 100%	-	Dindikpora
8.	Program peningkatan mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	%	98,48	98,99	99,50	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	%	92,87	93,09	93,31	Jumlah lulusan pendidikan kesetaraan dibagi jumlah peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dikali 100%	-	
9.	Program pembinaan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	69,23	61,5	65,3	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%	Definisi aktif = ada pengurus, ada kegiatan rutin yang menyentuh masyarakat	Dindikpora
10.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	68,30	26	27	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan A, B, dan C dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%	-	Dindikpora
		Persentase prestasi olahraga	%	40	27	30	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh dibagi jumlah nomor kejuaraan yang diikuti dikali 100%	Minimal event tingkat provinsi, minimal juara III	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase atlet berprestasi	%	3,50	16	17	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat di atas kabupaten dibagi jumlah atlet dikali 100%	-	
11.	Program pengembangan sumber daya kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	90,1	90,1	90,23	Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah tenaga kesehatan dikali 100%	-	Dinkes
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,2	97,25	97,30	Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah kebutuhan obat dikali 100%	-	
		Persentase gedung Puskesmas yang sesuai standar	%	76	80,1	84,62	Jumlah gedung puskesmas yang sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	Sesuai standar permenkes yang berlaku	
12.	Program kesehatan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna	%	82,7	83	84	Jumlah PHBS -RT strata utama dan paripurna dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%	-	Dinkes
		Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	Jumlah kecamatan bebas rawan gizi dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	-	
		Persentase rumah sehat	%	75,74	77,5	80	Jumlah rumah sehat dibagi jumlah rumah dikali 100%	-	
13.	Program pencegahan dan	Penemuan penderita Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk	orang	553	680	750	Jumlah penderita TB dibagi jumlah penduduk dikali 100.000 perkilomil	-	Dinkes

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	pengendalian penyakit	Penemuan penderita HIV	%	0,05	0,05	0,05	Jumlah penderita HIV dibagi jumlah penduduk dikali 100%	-	
		Penemuan penderita Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	-	25,12	20	20	Jumlah penderita positif DBD dibagi jumlah penduduk dikali 100.000	-	
		Penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk	-	0,0009	0,001	0,9	Jumlah penderita positif malaria dibagi jumlah penduduk dikali 1.000	-	
		Penemuan penderita hipertensi	%	3,02	15	22,06	Jumlah penderita hipertensi dibagi Jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun dikali 100%	-	
		Penemuan penderita Diabetes Melitus (DM)	orang	0,68	3,5	6,9	Jumlah penderita DM dibagi Jumlah penduduk dikali 100%	-	
		Persentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan	%	99,7	100	100	Jumlah desa dan/atau kelurahan yang UCI dibagi jumlah desa dan/ kelurahan dikali 100%	-	
		Persentase desa dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	Jumlah desa dan/atau kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dibagi jumlah desa dan/atau kelurahan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
14.	Program pelayanan kesehatan	Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar	%	45	45	46	Jumlah kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar dibagi jumlah seluruh kunjungan di pelayanan kesehatan dasar dikali 100%	-	Dinkes
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama	%	8	8	23.08	Jumlah FKTP milik Pemerintah yang terakreditasi utama dibagi jumlah FKTP milik Pemerintah yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	-	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	0,987	0,987	0.992	Jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah bayi yang lahir dikali 100%	-	
15.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	100	100	Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani JKT (lama dan baru) di RSUD dibagi jumlah seluruh pasien JKT yang berobat di RSUD dikali 100%	-	RSUD
16.	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	42,53	44,00	46,00	Jumlah sarana dan pra sarana yang ada dibagi jumlah sarana dan prasarana yang seharusnya ada dikali 100%	Prioritas sarpras sesuai PMK No. 56 Th 2014 tentang klasifikasi perizinan RS	RSUD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
17.	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indeks Kinerja RSUD	%	87,36	87,50	87,50	Total skor aspek penilaian kinerja keuangan ditambah kinerja non keuangan lebih dari 65	-	RSUD
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	86,8	86,8	80	Lima belas bab dalam 4 kelompok standar akreditasi, nilai minimum setiap bab sama dengan 80%	Tahun 2019 menggunakan standar penilaian baru	
18.	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	82,42	82,42	83,00	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan kabupaten dikali 100%	-	DPUPKP
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	100	100	100	Panjang jalan penghubung pusat kegiatan dalam kondisi baik dibagi jalan penghubung dikali 100%	-	
19.	Program penyelenggaraan jembatan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	87	90	91	Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi jumlah jembatan dikali 100%	-	DPUPKP
20.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	60,0	61,5	63,0	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi jumlah jaringan irigasi dikali 100%	-	DPUPKP

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	dan jaringan - pengairan lainnya								
21.	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Persentase pelayanan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40,60	45,00	50,00	Jumlah penduduk terlayani drainase dibagi jumlah penduduk kota dikali 100%	-	DPUPKP
22.	Program pengembangan dan penataan kota	Cakupan RTH publik terhadap IKK	%	0,05	0,05	0,05	Luas RTH dibagi luas IKK dikali 100%	-	DPUPKP
		Persentase penerangan jalan umum	%	6,72	7,50	10,00	Panjang jalan kabupaten dengan PJU dibagi panjang jalan kabupaten dikali 100%	-	
23.	Program pembinaan jasa konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	60	65	70	Tersedianya layanan jasa konstruksi melalui web kabupaten temanggung	-	DPUPKP
24.	Program penyelenggaraan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	87,65	86,7	86,71	Luasan yang sesuai Rencana Tata Ruang dibagi luas Kabupaten Temanggung dikali 100%	-	DPUPKP
25.	Program pengembangan perumahan dan permukiman	Persentase KK terlayani air bersih layak	%	82,67	82,87	83,07	Jumlah KK terlayani air bersih layak dibagi jumlah KK dikali 100%	-	DPUPKP
		Persentase pelayanan air limbah/ sanitasi	%		84,96	85	Jumlah KK terlayani air limbah layak dibagi jumlah KK dikali 100%	-	
		Persentase rumah layak huni	%	88,45	84,57	85,15	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%		19,76	19,5	Luas kawasan kumuh dibagi luas perkotaan dikali 100%	Sesuai SK Bupati tentang Kawasan Kumuh	
26.	Program administrasi pertanahan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	Jumlah fasilitasi pertanahan yang terselesaikan dibagi jumlah fasilitasi pertanahan dikali 100%	-	DPUPKP
27.	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan bupati yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan bupati yang dilaporkan dan atau dipantau dikali 100%	-	Satpol PP dan Damkar
		Rasio Petugas Satpol PP	-	1,18	1,18	1,18	Jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	-	
		Rasio PPNS	-	8,25	8,25	8,25	Jumlah PPNS dibagi jumlah PNS dikali 10.000	-	
28.	Program peningkatan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	-	1,48	1,62	1,48	Jumlah anggota Linmas dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten	-	Satpol PP dan Damkar

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
29.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kabupaten dikali 100%	-	Satpol PP dan Damkar
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	60,56	62,5	65	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	-	
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	35,19	37,5	40	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dibagi jumlah aparatur pemadam kebakaran dikali 100%	-	
30.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam masa tanggap darurat bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100%	Kebutuhan dasar = sandang, pangan dan papan	Dinsos
		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar (LUT) non potensial dan penyandang disabilitas berat yang mendapatkan bantuan jaminan hidup	%		100	100	Jumlah Anak Terlantar dan LUT non potensial dan penyandang disabilitas berat yang mendapatkan bantuan jaminan hidup dibagi jumlah Anak Terlantar dan LUT non potensial dan penyandang disabilitas berat dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
31.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos dibagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar dikali 100%	-	Dinsos
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui panti/barehsos dikali 100%	Penyandang disabilitas yang memerlukan layanan adalah yang diusulkan kades/lurah untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui dinas sosial	
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100	100	100	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dibagi tuna sosial yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dikali 100%	Tuna sosial yang memerlukan layanan adalah yang diusulkan kades/lurah atau hasil penjangkauan satpol PP/kepolisian untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui RPS dinas sosial	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
32.	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%	PSKS yang dimaksud terdiri dari 7 Jenis PSKS : TKSK, TAGANA, WPKS, Keluarga Pioner, Pekerja sosial Profesional, penyuluh sosial dan PSM	Dinsos
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	Jumlah PSKS Masyarakat dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%	Terdiri 5 Jenis PSKS : KT, LK3, LKS, WKSMB dan Dunia Usaha	
33.	Program penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,35	0,78	0,11	Jumlah KK miskin yang dapat bantuan ekonomi produktif dibagi DT PPFM dikali 100%	-	Dinsos
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%		48	48	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah DT PPFM skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
34.	Program perluasan kesempatan kerja	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	n.a	40	60	Jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru dibagi jumlah peserta pelatihan dikali 100%	-	Dinaker
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	%	49	50	70	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar dikali 100%	-	
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	15	65	70	Jumlah pencari kerja terdaftar ditempatkan di bagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	-	
35.	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan	Persentase perusahaan yang membayar upah tenaga kerja sesuai UMK			80	80	Jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dibagi jml perusahaan dikali 100%	-	Dinaker
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	n.a	20	30	Jumlah perusahaan dengan sarana HI dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	-	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	Jumlah perselisihan HI terselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan HI dikali 100%	-	
36.	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	n.a	20	25	Jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha berkembang dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%	-	Dinaker

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase LPKS yang terakreditasi	%	n.a	10	12	Jumlah LPKS terakreditasi dibagi jumlah LPKS dikali 100%	-	
37.	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	Laporan bulanan kecamatan dibagi jumlah kecamatan	-	DPPKBPPPA
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	7,19	7,15	7,10	PUS unmeet need (IAT + TIAL) dibagi jumlah PUS dikali 100%	-	
38.	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB	Persentase kepesertaan KB aktif	%	83,42	83,45	83,48	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah PUS dikali 100%	-	DPPKBPPPA
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,05	49	50	Jumlah peserta KB aktif MKJP dibagi total jumlah peserta KB dikali 100%	-	
39.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,040	0,038	0,037	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100%	-	DPPKBPPPA
		Cakupan terbentuknya kecamatan layak anak	%	0	5	10	Jumlah kecamatan layak anak dibagi total kecamatan dikali 100%	-	
40.	Program peningkatan	Persentase keluarga sejahtera III	%	45,6	45,6	45,6	Laporan hasil pendataan keluarga	-	DPPKBPPPA

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga sejahtera III plus	%	3,6	3,6	3,6	Laporan hasil pendataan keluarga	-	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	20	20	20	Jumlah kampung KB IDM dibagi jumlah kampung KB	-	
41.	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan	Produktivitas padi	kw/ha	60,6	62,15	62,85	Total produksi padi dibagi luas panen	-	Dintan Pangan
		Produktivitas jagung	kw/ha	4,659	4,685	4,695	Total produksi jagung dibagi luas panen	-	
		Produktivitas Ubi Kayu	kw/ha	38,52	35,99	36,53	Total produksi ubi kayu dibagi luas panen	-	
42.	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis hortikultura	Produktivitas bawang putih	ton/ha	7,2	7,8	7,9	Total produksi bawang putih dibagi luas panen	-	Dintan Pangan
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	8,1	8,2	8,25	Total produksi bawang merah dibagi luas panen	-	
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	4,1	4,2	4,25	Total produksi cabai rawit dibagi luas panen	-	
		Produktivitas cabai besar	ton/ha	6,7	6,8	6,85	Total produksi cabai besar dibagi luas panen	-	
		Produktivitas kentang	ton/ha	22,82	23,10	23,20	Total produksi kentang dibagi luas panen	-	
		Produktivitas durian	ton/ha	0,080	0,080	0,081	Total produksi durian dibagi luas panen	-	
		Produktivitas jambu biji	ton/ha	0,090	0,090	0,092	Total produksi jambu biji dibagi luas panen	-	
43.	Program peningkatan	Produktivitas tembakau	ton/ha	0,62	0,65	0,66	Jumlah produksi tembakau dibagi luas panen	-	Dintan Pangan

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis perkebunan	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,48	0,65	0,67	Jumlah produksi kopi robusta dibagi luas panen	-	
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,54	0,68	0,69	Jumlah produksi kopi arabika dibagi luas panen	-	
		Produktifitas Cengkeh	ton/ha	0,168	0,20	0,21	Total produksi durian dibagi luas panen	-	
		Produktivitas Aren	ton/ha	1,761	1,85	1,95	Total produksi durian dibagi luas panen	-	
44.	Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	%	n.a	n.a	5,19	Jumlah posluhdes yang meningkat dibagi jumlah posluhdes sekab (289) dikali 100%	Total posluhdes = 289	Dintan Pangan
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	6,07	6,22	6,08	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tani dikali 100%	berdasarkan SKT = 2041 poktan	
		Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani	%	5,5	6,2	6,9	Jumlah lembaga ekonomi petani yang berkembang dibagi jumlah lembaga ekonomi petni dikali 100%	Total lembaga ekonomi petani = 145 LEP	
45.	Program peningkatan ketahanan pangan	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	-	3.453	3.460	3.465	Jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan perkapita penduduk	-	Dintan Pangan
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	-	115	95	95	Jumlah protein yang tersedia untuk konsumsi pangan perkapita penduduk	-	
46.	Program perlindungan	Indeks kualitas tutupan lahan	%	78,06	74,33	74,33	ITV = 100- (84.3- (TVX100)) X 50/54.3	-	DLH

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	dan konservasi lingkungan hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		52,33	54,4	Jumlah dokumen ijin lingkungan yang keluar dibagi jumlah pemohon dikali 100%	-	
47.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti / jumlah aduan yang diterima	-	DLH
		Indeks Kualitas Air	Mg/l	30.00	55.00	56.00	IKA = Status Mutu Air x Koefisien	-	
		Indeks Kualitas Udara	$\mu\text{h}/\text{m}^3$	54.46	83,5	84	IKU = $100 - (50/0.9 \times (\text{leu} - 0.12))$	-	
48.	Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	20,14	10	10	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata dibagi jumlah sekolah se-Kabupaten Temanggung dikali 100%	-	DLH
49.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%		30,44	31,9	Jumlah sampah yang ditangani di sumber ditambah yang tertangani di TPA perkotaan yang dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%	-	DLH
		Cakupan pelayanan persampahan	%		65	67		-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
50.	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,3	97	98	Jumlah kepemilikan KK dibagi jumlah Wajib KK dikali 100%	-	Dindukcapil
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	%	94,01	97,00	97,40	Jumlah kepemilikan KTP el dibagi jumlah Wajib KTP dikali 100%	-	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	35,58	55	70	Jumlah kepemilikan KIA dibagi jumlah Wajib KIA dikali 100%	-	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N dikali 100%	-	
51.	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	63,40	66	69	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%	-	Dindukcapil
		Persentase penerbitan akta kematian	%	100	100	100	Jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon dikali 100%	-	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah perkawinan dan perceraian dikali 100 %	-	
52.	Program pengelolaan informasi	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	70	75	85	Jumlah sarana prasarana ADMINDUK dalam	-	Dindukcapil

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
	administrasi kependudukan dan pemanfaatan data						kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana ADMINDUK yang tersedia dikali 100%		
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	12,5	50	60	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah PD/lembaga pengguna data kependudukan Tk Kab. dikali 100%	-	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	45	100	100	Jumlah seksi yang berinovasi dalam pelayanan dibagi jumlah seksi dikali 100%	-	
53.	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	18	20	23	Jumlah desa yang berklasifikasi swasembada dibagi jumlah desa dikali 100%	-	Dinpermades
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%				Jumlah desa dan kelurahan dengan status cepat berkembang dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100%	-	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	11	12	14	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang ada dikali 100%	LPMD, RW, RT, PKK, Linmas, (kriteria : Ketersediaan anggaran, Ada kegiatan	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
54.	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	15	20	25,19	Jumlah desa yang telah menyusun RKPDes sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Tepat waktu dalam arti selesai s.d tanggal 30 sep	Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	15	20	25,19	Jumlah desa dan kelurahan yang telah menetapkan APBDes sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Tepat waktu dalam arti selesai s.d tanggal 31 des	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	15	20	25,19	Jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%	Input RKPDes dan APBDes, Input Penatausahaan s.d pertanggung jawaban	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%			25,19	Jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	Tepat waktu dalam arti selesai s.d tanggal 31 des	
55.	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	20	20	Jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%	-	Dinpermades
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa dikali 100%	BUMDes, BUMDes Bersama, UEDSP, UP2K, Pasar Desa, Posyantekdes, Lumbung Pangan MD, SPP	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	-	100	100	Jumlah pemberdayaan kawasan perdesaan di bagi jumlah kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dikali 100%	-	
56.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengelolaan aset desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa			80	80	Jumlah pelanggaran disiplin kepala desa di bagi jumlah kepala desa dikali 100%	-	Dinpermades
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu			60	75	Jumlah laporan administrasi desa yang tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	-	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset			70	75	Jumlah desa yang tertib pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%	-	
57.	Program pengelolaan lalu lintas dan perpajakan	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	76,39	78,13	79,86	Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai dibagi jumlah ruas jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%	- Rambu lalu lintas - Marka jalan	Dinhub
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94,38	91,82	96,88	Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
58.	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	-	100	100	Jumlah kendaraan bermotor layak jalan dibagi jumlah kendaraan ber motor wajib uji dikali 100%	-	Dinhub
		Persentase bengkel umum yang memenuhi standar	%	62,07	100	100	Jumlah bengkel umum yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum dikali 100%	-	
59.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jaringan jalan yang dilewati angkutan umum	%	50,35	50,35	50,69	Jumlah jaringan jalan yang dilewati angkutan umum dibagi jumlah jaringan jalan kabupaten	-	Dinhub
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	85,71	87,50	Jumlah terminal tipe C yang aktif dibagi jumlah tipe terminal tipe C dikali 100%	ada aktifitas naik turun penumpang	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57,14	71,43	75	Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik dibagi jumlah tipe terminal tipe C dikali 100%	-	
60.	Program pengembangan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	3,5	5	10	Jumlah PPID badan publik yang aktif dibagi jumlah badan publik dikali 100%	-	Dinkominfo
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	5	20	30	Jumlah KIM yang aktif dibagi jumlah KIM yang ada dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	Jumlah LPP yang patuh terhadap norma siaran dibagi jumlah LPP dikali 100%	-	
61.	Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	75	90	100	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	-	Dinkominfo
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	5	10	20	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegritas dibagi jumlah sistem informasi dikali 100%	-	
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	7	15	20	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	-	
62.	Program pengembangan data Statistik	Cakupan ketersediaan dokumen statistik daerah	%	90	100	100	Jumlah dokumen statistik yang publikasi yang tepat waktu dibagi dokumen statistik yang disusun dikali 100%	PDRB, IHK, ASPM, Inkesra, NTP, NTPeternak	
63.	Program pengembangan persandian dan keamanan informasi	Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	100	100	100	Jumlah berita sandi yang terdistribusi tepat waktu dan terlindungi keamanannya dibagi jumlah berita yang masuk melalui peralatan dan jaringan persandian dikali 100%	-	Dinkominfo

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
64.	Program Pengembangan Industri	Persentase IKM agro industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	12	15	30	Jumlah agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah komoditas unggulan daerah dikali 100%	-	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase IKM aneka industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	12	15	30	Jumlah aneka industri berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah komoditas unggulan daerah dikali 100%	-	
65.	Program pengembangan perdagangan	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	80	84	87	Jumlah informasi harga pada tahun n dikali 100%	-	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	10	15	25	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati ruang dibagi jumlah pedagang kaki lima keseluruhan dikali 100%	-	
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	?	300	5000	Jumlah UTTP yang ditera ulang dibagi jumlah UTTP dikali 100%	-	
66.	Program pengelolaan pasar	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	30	40	30	Bertambahnya pasar yang direvitalisasi	-	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	30	30	30	Jumlah pedagang yang sudah sesuai dengan zonasi dikali jumlah pedagang keseluruhan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	37,35	50	60	Jumlah realisasi pendapatan pasar dibagi target pendapatan pasar dikali 100 %	-	
67.	Program pengembangan koperasi dan UKM	Persentase koperasi sehat	%	7	12	20	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100%	-	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	30	33	34	Nilai aset dan omset koperasi tahun berjalan dikurangi nilai aset dan omset koperasi tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset koperasi tahun sebelumnya dikali 100%	-	
		Persentase usaha mikro yang berkembang	%	29	35	40	Usaha mikro yang berkembang dibagi usaha mikro yang ada	-	
68.	Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	0	5	10	Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi' dikali 100%	-	DPMPTSP
		Persentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	%	100	100	100	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah SDM dikali 100%	-	
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
69.	Program peningkatan iklim investasi	Persentase peningkatan penerbitan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)	%	n.a	10	15	Jumlah penerbitan IPPM tahun berjalan dikurangi jumlah penerbitan IPPM tahun sebelumnya dibagi jumlah IPPM tahun sebelumnya dikali 100%	-	DPMPTSP
		Persentase peningkatan Ijin Usaha Penanaman Modal (IUPM)	%	n.a	10	15	Jumlah penerbitan IUPM tahun berjalan dikurangi jumlah penerbitan IUPM tahun sebelumnya dibagi jumlah IUPM tahun sebelumnya dikali 100%	-	
		Persentase peningkatan nilai realisasi investasi tipe 1 dan tipe 2	%	40	10	15	Nilai investasi tipe 1 dan tipe 2 tahun berjalan dikurangi nilai investasi tipe 1 dan tipe 2 tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tipe 1 dan tipe 2 tahun sebelumnya dikali 100%	-	
70.	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	n.a	90	100	Jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk dikali 100 %	-	DPMPTSP
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	100	100	100	Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%	57,53	95	100	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin dikali 100%	-	
71.	Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	n.a	n.a	100	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan izin yang diterbitkan dikali 100 %	-	DPMPTSP
		Persentase pengaduan dan advokasi perijinan yang terselesaikan	%	n.a	n.a	100	Jumlah pengaduan dibagi dengan terselesaikannya jumlah aduan dikali 100%	-	
72.	Program pengelolaan kebudayaan	Persentase pelestarian cagar budaya	%	25	40	50	Jumlah pelestarian sejarah lokal yang didoku mentasikan (20 dengan asumsi 1 kecamatan 1) dibagi jumlah seluruh sejarah lokal dikali 100% Th. 2016 = 3 Th. 2017 = 5 Th. 2018 = 8 Th 2019=10	Sejarah lokal yang di doku mentasi kan adalah sejarah lokal yang terinventarisir, didokumentasi kan dan dikaji	Dinbudpar
		Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	%	100	100	100	Jumlah kelompok pelestarian dan pecinta bahasa /sastra yang aktif dibagi kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang ada dikali 100%	Kelompok pelestari dan pecinta bahasa /sastra adalah lembaga/ kelompok yang aktif melestari-kan bidang seni, bahasa dan sastra	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	32,34	35,68	39,03	Jumlah Kelompok seni yang aktif dibagi kelompok seni dikali 100% kes. Aktif 954+12 Kel seni yang ada (asumsi) 2987	Kelompok seni yang aktif adalah organisasi kesenian dan sanggar yang aktif melaksanakan/mengikuti event2 secara mandiri maupun terfasilitasi pihak lain dan teradministrasi	
73.	Program pengembangan pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	56,52	65,21	73,91	Jumlah objek wisata yang berkembang dibagi jumlah DTW/ destinasi wisata yang ada dikali 100%	Berkembang = Jumlah kunjungan, sarpras yang ada, pengelolaan dan SDM data awal Th 2017 13 OW dan 23 DTW	Dinbudpar
		Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	12,72	0,14	0,16	Jumlah wisatawan tahun berjalan dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dikali 100%	Jumlah kunjungan yang terdata pada obyek wisata	
		Persentase desa wisata unggulan	%	3,75	4,51	5,26	Jumlah desa wisata dibagi jumlah desa dikali 100%	Desa wisata adalah pedesaan yang memiliki kekhasan dan	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
								dayatarik sbagai tujuan wisata yang terkelola	
74.	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	15,12	17,73	20,35	Jumlah unit kerja yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah unit kerja dikali 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja meliputi : perangkat daerah, kec, kelurahan dan desa. • Pengelolaan arsip secara baku meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif dengan beberapa indikator; pencatatan, pendistribusi an dan penyimpanan di filling kabinet 	Dinarpus
		Persentase arsip konvensional yang dialihmediakan	%	0	20	20	Jumlah arsip konvensional (vital) yang di alihmediakan dibagi jumlah arsip vital dikali 100%	Jumlah arsip vital konvensional yang dimaksud meliputi sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
75.	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	63	65	70	Jumlah total pengunjung perpustakaan tahun ke n dikurangi jumlah total pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah total pengunjung tahun n-1 dikali 100%	Perpustakaan sekolah yang dihitung meliputi SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta	Dinarpus
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	5	6	10	Jumlah perpustakaan yang aktif dibagi jumlah perpustakaan dikali 100 %	Perpustakaan aktif adalah perpustakaan yang menyelenggarakan layanan peminjaman buku secara berkesinambungan, mempunyai tempat/ruang pelayanan, pengelola dan buku koleksi perpustakaan	
76.	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor		169	170	Jumlah produksi daging sapi dibagi populasi sapi	-	Dinakan
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor		13,5	13,51	Jumlah produksi daging domba dibagi populasi domba	-	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor		13,5	13,51	Jumlah produksi daging kambing dibagi populasi kambing		

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor		0,75	0,75	Jumlah produksi daging ayam pedaging dibagi populasi ayam pedaging	-	
		Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor		10,88	10,88	Jumlah produksi telur dibagi populasi ayam petelur	-	
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor		0,7	0,705	Jumlah produksi daging ayam buras dibagi populasi ayam buras	-	
77.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Prevalensi penyakit sapi	%		5	4,8	Jumlah kasus sapi yang sakit dibagi jumlah hewan yang terancam sakit dikali 100%	-	Dinakan
		Prevalensi penyakit kambing	%		4	3,75	Jumlah kasus kambing yang sakit dibagi jumlah hewan yang terancam sakit dikali 100%	-	
		Prevalensi penyakit domba	%		2	1,8	Jumlah kasus domba yang sakit dibagi jumlah hewan yang terancam sakit dikali 100%	-	
		Prevalensi penyakit unggas	%		0,1	0,09	Jumlah kasus unggas yang sakit dibagi jumlah hewan yang terancam sakit dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
78.	Program pemenuhan pangan asal hewan	Persentase unit usaha produk hewan, bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	5,00	60	65	Jumlah unit usaha produk hewan, bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat dibagi jumlah unit usaha produk hewan, bahan asal hewan dan bahan penunjang dikali 100%	Bahan penunjang meliputi : obat-obatan dan vaksin	Dinakan
79.	Program pengembangan perikanan	Produktivitas Ikan Nila	%		2,5	2,7	Jumlah produksi ikan nila dibagi luas kolam	Kolam : air tenang, mina padi dan lainnya	Dinakan
		Produktivitas Ikan Lele	%		9,8	10,7	Jumlah produksi ikan nila dibagi luas kolam	Kolam : air tenang, mina padi dan lainnya	
		Produktivitas Ikan Mas	%		5,2	5,7	Jumlah produksi ikan nila dibagi luas kolam	Kolam : air tenang, mina padi dan lainnya	
80.	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	60	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	-	Bappeda
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	65	70	75	Jumlah PD yang mengirim laporan evaluasi renja tepat waktu dibagi jumlah PD dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
81.	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang ekonomi	-	Bappeda
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang sumber daya alam	-	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang infrastruktur	-	
82.	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang kesejahteraan rakyat	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang kesejahteraan rakyat	-	Bappeda
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya manusia	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang sumber daya manusia	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	%	83,98	85,67	90	Jumlah kegiatan dalam renja yang sesuai renstra dibagi jumlah kegiatan direnstra dikali 100% pada lingkup sub bidang pemerintahan	-	
83.	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Raperda yang memiliki Naskah Akademik	%	65	0	50	Jumlah Raperda yang memiliki NA dibagi jumlah total Raperda yang diajukan	-	Bappeda
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	%	10	0	30	Jumlah hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan atau diterapkan dibagi jumlah hasil kreasi dan inovasi dikali 100%	-	
84.	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,45	1,45	0,93	Obyek pajak terdata dibagi potensi obyek pajak	-	BPPKAD
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	99	99	100	Terverifikasinya data tepat waktu dibagi berkas permohonan yang masuk	-	
85.	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Persentase pemutakhiran obyek pajak	%	2	2,5	2,9	Jumlah pemutskhiran OP PBB dibagi seluruh pemutakhiran OP PBB	-	BPPKAD
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah SKPD terbit tepat waktu dibagi jumlah SKPD yang terbit	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
86.	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,9	90	90	Realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%	-	BPPKAD
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	85	90	90	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mampu pendapatan dikali 100%	-	
87.	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	85	85	90	Jumlah kegiatan APBD yang sama dengan RKPD dibagi total jumlah kegiatan pada RKPD dikali 100%	-	BPPKAD
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	60	60	100	Jumlah total RKA/RKPA yang mengirimkan tepat waktu dibagi dengan jumlah SKPD	-	
		Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	94	96	98	Jumlah total SP2D yang dicairkan tepat dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan	-	
88.	Program pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	77,38	79,76	80.95	Jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100%	Kriteria tertib yang seperti apa?	BPPKAD
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	87,32	95,45	98.33	Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
89.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	80	85	90	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dibagi jumlah total laporan keuangan perangkat daerah dikali 100%	-	BPPKAD
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	85	90	90	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dibagi jumlah total laporan keuangan perangkat daerah dikali 100%	-	
90.	Program pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	60	60	60	Jumlah PD yang menyusun formasi pegawai dibagi jumlah PD dikali 100 %	-	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah SK pensiun yang diserahkan tepat waktu dibagi jumlah usulan pensiun	-	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah SKP yang diserahkan tepat waktu dibagi jumlah usulan kenaikan pangkat dikali 100 %	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
91.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mengikuti diklat kepemimpinan	%	48	51,4	6,4	Jumlah pejabat pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dibagi jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dikali 100%	-	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	%	1,56	3	3	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional dibagi Jumlah ASN dikali 100 %	-	
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	100	80	80	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang terisi dibagi Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dikali 100 %	-	
92.	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,1	0,1	0,3	Jumlah ASN melanggar disiplin dibagi jumlah ASN dikali 100 %	-	BKPSDM
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	100	100	90	Jumlah pelanggaran disiplin ASN yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran disiplin yang masuk dikali 100 %	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	0	80	80	Jumlah update data ASN terverifikasi dibagi jumlah ASN yang melakukan update data kepegawaian dikali 100 %	-	
93.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	0,125	0,04	0,04	Prosentase jumlah PD yang direview RKA nya dibagi jumlah OPD x 100 %	-	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	0,166	0,125	0,25	Prosentase jumlah PD yang direview SAKIP nya dibagi jumlah OPD x 100 %	-	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	0,625	0,04	0,04	Prosentase jumlah PD yang direview RKA nya dibagi jumlah PD dikali 100 %	-	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	0,83	0,125	0,25	Prosentase jumlah PD yang direview SAKIP nya dibagi jumlah PD dikali 100 %	-	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	0,625	0,04	0,04	Prosentase jumlah PD yang direview RKA nya dibagi jumlah PD dikali 100%	-	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	0,83	0,125	0,25	Prosentase jumlah PD yang direview SAKIP nya dibagi jumlah PD dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	%	0,625	0,04	0,04	Prosentase jumlah PD yang direview RKA nya dibagi jumlah PD dikali 100%	-	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	0,83	0,125	0,25	Prosentase jumlah PD yang direview SAKIP nya dibagi jumlah PD dikali 100%	-	
94.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi	%	70	75	75	Jumlah pemeriksa bersertifikasi profesi dibagi jumlah pemeriksa dikali 100%	-	Inspektorat
95.	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	25	50	75	Jumlah pilar batas yang sudah diinventarisasi dibagi jumlah pilar batas dikali 100%	-	Bagian Pemerintahan
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	54,00	60,00	66,67	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang menangani SPM dikali 100%	-	
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	50	60	65	Jumlah kecamatan yang tertib administrasi dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	Laporan bulanan camat, buku administrasi kecamatan, dan SOP kecamatan dan kelurahan	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
96.	Program penyusunan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	20	27	30	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup dibagi jumlah Perda dikali 100%	-	Bagian Hukum
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	90	100	20	Jumlah dokumentasi perundangan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan dikali 100%	-	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	80	83	24	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan yang masuk	Non litigasi adalah permasalahan yang diselesaikan diluar pengadilan	Bagian Hukum
97.	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	Jumlah jenis barang bersubsidi yang beredar di Kab. Temanggung dibagi jumlah jenis barang bersubsidi yang menjadi program nasional dikali 100%	-	Bagian Perekonomian
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang tertangani dibagi jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang masuk	-	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100	100	100	Jumlah BUMD dengan opini WTP dibagi jumlah BUMD dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
98.	Program pengendalian pelaksanaan - kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	99,42	100	100	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jml kegiatan dikali 100%	Tanggal 31 Desember	Bagian Pembangunan
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan (DRUP) tepat waktu	%	95,9	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana usulan pengadaan tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Perangkat daerah, unit kerja, kelurahan, puskesmas,	
99.	Program Layanan Pengadaan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	98,84	98,84	100	Jumlah pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu dibagi jumlah pengadaan barang/jasa dikali 100%	yang melalui proses pelelangan ULP	
100.	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	75	75	75	Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan dikali 100%	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase guru keagamaan yang mendapatkan honor di lembaga yang sudah terdaftar	%					-	
		Ratio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah	%					-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
101.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	%	100	100	100	Jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah dikali 100%	-	Bagian Umum
102.	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	%	n.a	50	53,2	Jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai B dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Penilaian hasil review SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	12,7	12,7	21,8	Jumlah perangkat daerah yang menjadi pilot project WBK/ WBBM dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Penilaian oleh kementerian PAN dan RB	
103.	Program penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindak lanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	-	Bagian Hubungan Masyarakat
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	25	25	25	Jumlah pengunjung website tahun n dikurangi pengunjung website tahun sebelumnya dibagi	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
							jumlah pengunjung website tahun sebelumnya dikali 100%		
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100	100	100	Jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi kegiatan pemkab dikali 100%	-	
104.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	22,22	16,67	13,33	Jumlah perda inisiatif dibagi jumlah raperda x 100 %	-	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	98	98	100	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	-	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	51,46	53	59.83	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100 %	-	
105.	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%	-	BPBD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%	-	
106.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	6,52	6,52	8,15	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%	-	BPBD
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	23,9	45,7	53,8	Jumlah desa/kelurahan mitigasi dalam satu tahun dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%	-	
107.	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	Jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah kerusakan pada masa pasca bencana dikali 100%	-	BPBD
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	Jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa pasca bencana dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
108.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	92	85	87	Jumlah pemilih yang datang dibagi jumlah pemilih kali 100	Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya	Kesbang
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	22	25	30	Jumlah pengurus partai perempuan jumlah seluruh pengurus partai kali 100	Keterwakilan perempuan di lembaga politik	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	28	35	30	Jumlah perempuan anggota DPRD bagi jumlah total anggota DPRD kali 100	Keterwakilan perempuan di DPRD	
109.	Program peningkatan kewaspadaan nasional	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	Jumlah konflik tertangani bagi jumlah konflik yang muncul kali 100	Terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan Daerah	Kesbang
110.	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	75	80	100	Jumlah kec yang aktif dalam kegiatan FKUB bagi jumlah kecamatan kali 100	Keaktifan kegiatan FKUB di kec	Kesbang
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	Jumlah konflik seni budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi yang tertangani bagi jumlah konflik seni budaya, agama, kemasyarakatan ekonomiyang muncul kali 100	terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
111.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	1,003	5	60	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan kewaspadaaan bagi jumlah kec se kab. Kali 100	pemahaman wawasan kebangsaan disekolah	Kesbang
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	1,003	5	10	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan kewaspadaaan bagi jumlah kec se kab. Kali 100	pemahaman wawasan kebangsaan di Desa / Kelurahan	
112.	Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	0,6	5	5	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jml kecamatan dikali 100	pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba di Desa/Kelurahan	Kesbang
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	0,3	5	30,30	Jumlah sekolah di wilayah kab yang mendapatkan pembinaan bagi jml sekolah se-kab kali 100%	pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba di sekolah	
113.	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	94,01	100	100	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%	-	Kecamatan
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	1	1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa/kelurahan dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	97	100	100	Jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah target penerimaan PBB dikali 100%	-	
114.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	-	Kecamatan
		Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	-	
115.	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan	Persentase pembagian voucer rastra tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah desa yang membagi voucer rastra tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	-	Kecamatan
		Persentase pelunasan beras miskin tepat waktu	%	100	100	100	Jumlah desa yang melunasi beras miskin tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	-	
116.	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,31	4,3	4,3	Jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	-	Kecamatan
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	Jumlah laporan kejadian yang ditangani dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	-	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
117.	Program peningkatan sarana prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan yang layak	%		100	100	Jumlah sarana dan prasarana lokal yang layak dibagi jumlah sarana dan prasarana lokal kelurahan dikali 100%	-	Kelurahan
118.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%		100	100	Jumlah kelembagaan kelurahan yang aktif dibagi jumlah kelembagaan kelurahan dikali 100%	-	Kecamatan
Fungsi Penunjang Urusan Perangkat Daerah									
119.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan	-	Semua Perangkat Daerah
120.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi perkantoran dikali 100%	-	Semua Perangkat Daerah

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGUNG JAWAB
121.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	Jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur dikali 100%	-	Semua Perangkat Daerah
122.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	100	Jumlah ASN yang patuh dalam penggunaan pakaian dan atributnya dibagi jumlah ASN dikali 100%	-	Semua Perangkat Daerah

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2019 ini ditempuh dengan menetapkan 5 prioritas nasional dalam RKP 2019 dan 24 program prioritas untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tema yang diusung dalam RKP 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Seiring dengan RKP 2019 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung menyelaraskan program prioritasnya sesuai dengan program prioritas dalam RKP 2019. Keterkaitan antara program prioritas RKPD Kabupaten Temanggung dengan program prioritas RKP 2019 dijabarkan dalam tabel 5.2 berikut. Dalam tabel juga dipaparkan pagu anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menjawab langkah nyata mengintegrasikan dan menyingkronkan perencanaan dan penganggaran melalui langkah pertama yaitu melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 5.2
Keterkaitan Program Prioritas dan Pagu Anggaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Program Prioritas Nasional RKP 2019

PN RKP 2019	Program Prioritas RKP 2019	Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung 2019	Pagu Anggaran
PN 1: Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Percepatan pengurangan kemiskinan	- Program penanganan fakir miskin	700.000.000
		- Program perlindungan dan jaminan sosial	815.000.000
		- Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	760.000.000
		- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.000.000.000
	Jumlah		12.275.000.000
	Pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	- Program Kesehatan Masyarakat	14.555.750.000
		- Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	435.000.000
Jumlah		15.090.750.000	
	Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	- Program peningkatan akses pendidikan SD	64.674.325.000

PN RKP 2019	Program Prioritas RKP 2019	Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung 2019	Pagu Anggaran
		- Program peningkatan akses pendidikan SMP	49.544.730.000
		- Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	5.244.414.300
	Jumlah		119.463.469.300
	Akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	- Program pengembangan rumah sehat	29.545.500.000
	Jumlah		29.545.500.000
	Tata kelola layanan dasar	- Program pembinaan kepemudaan	195.000.000
		- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	92.850.000.000
		- Program pengelolaan kebudayaan	1.590.000.000
		- Program Peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	190.000.000
	Jumlah		94.825.000.000
Jumlah PN 1			241.654.219.000
PN 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Peningkatan konektivitas	- Program penyelenggaraan jalan	145.376.500.000
		- Program penyelenggaraan jembatan	11.980.000.000
		- Program pengelolaan lalu lintas dan parkir	3.205.590.000
	Jumlah		160.562.090.000
	Pengembangan telekomunikasi dan informatika	- Program pengembangan komunikasi dan informasi publik	2.625.000.000
		- Program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi	2.482.000.000
	Jumlah		5.107.000.000
	Pengembangan pusat kegiatan di wilayah timur dan pembangunan desa	- Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa	2.010.000.000
		- Program	1.355.000.000

PN RKP 2019	Program Prioritas RKP 2019	Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung 2019	Pagu Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	
	Jumlah		3.365.000.000
	Pembangunan daerah afirmasi	- Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	425.000.000
		- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan	1.601.500.000
	Jumlah		2.026.500.000
	Pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu - hilir perikanan	- Program penyelenggaraan tata ruang	650.000.000
		- Program pengembangan budidaya perikanan	3.226.500.000
	Jumlah		3.876.500.000
	Jumlah PN 2		174.937.090.000
PN 3: Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian	- Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan	7.621.000.000
		- Program Peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis perkebunan	5.130.000.000
		- Program peningkatan ketahanan pangan	3.145.000.000
	Jumlah		15.896.000.000
	Percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan	- Program pengembangan industri	900.000.000
	Jumlah		900.000.000
	Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif	- Program pengembangan koperasi dan UKM	310.000.000
		- Program Pengembangan Perdagangan	3.605.000.000
	- Program pengembangan pariwisata	46.060.340.000	

PN RKP 2019	Program Prioritas RKP 2019	Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung 2019	Pagu Anggaran
	Jumlah		49.975.340.000
	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja	- Program peningkatan produktifitas tenaga kerja	1.417.449.600
	Jumlah		1.417.449.600
	Pengembangan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas	- Program Peningkatan Iklim Investasi	515.000.000
		- Program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi	2.482.000.000
	Jumlah		2.997.000.000
Jumlah PN 3			71.185.789.600
PN 4: Pemanjapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air	Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi	- Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	10.230.000.000
		- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	10.885.000.000
	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya dukung lingkungan		
	Jumlah		21.115.000.000
	Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan	- Program peningkatan ketahanan pangan	3.145.000.000
		- Program peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak	2.620.000.000
	Jumlah		5.765.000.000
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas sumber daya air	- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan- irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	25.402.600.000
	Pemanjapan regulasi dan penguatan kelembagaan energi, pangan dan sumber daya air.		
	Jumlah		25.402.600.000
Jumlah PN 4			52.282.600.000
PN 5: Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	KAMTIBMAS dan keamanan SIBER	- Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik	1.363.000.000
		- Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	1.630.000.000
	Jumlah		2.993.000.000
	Kesuksesan PEMILU	- Program perencanaan,	1.800.000.000

PN RKP 2019	Program Prioritas RKP 2019	Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung 2019	Pagu Anggaran
		evaluasi dan informasi pembangunan daerah	
		- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	3.530.781.000
	Jumlah		5.330.781.000
	Pertahanan wilayah nasional	- Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	839.000.000
		- Program penanganan tanggap darurat bencana	2.700.000.000
		- Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3.305.000.000
	Jumlah		6.844.000.000
	Kepastian hukum dan reformasi birokrasi	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	1.385.000.000
		- Program pengelolaan keuangan daerah	1.610.000.000
	Jumlah		2.995.000.000
	Efektivitas diplomasi	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3.865.000.000
		- Program Pengembangan wawasan kebangsaan	185.000.000
	Jumlah		4.050.000.000
Jumlah PN 5			22.212.781.000
Total PN 1 sampai dengan PN 5			562.272.479.600

5.2 Inovasi Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan dari waktu ke waktu memerlukan penanganan dan perbaikan, tidak hanya di Kabupaten Temanggung saja namun di seluruh dunia ini seringkali hanya dapat diselesaikan secara spesifik dengan pendekatan lokal. Proses perencanaan daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun mendorong adanya inovasi untuk mencapai kualitas perencanaan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Beberapa inovasi perencanaan pembangunan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mengatasi permasalahan di daerah antara lain:

1. *Planning Decision Support System (DSS)* yang melekat di aplikasi e-Planning mulai tahun 2018 untuk perencanaan tahun 2019;
2. E-Planning terintegrasi e-Budgeting;
3. Penetapan pagu indikatif umum dan pagu indikatif khusus (tematik) di tingkat kecamatan;
4. Penetapan pagu indikatif sarana prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di musrenbang tingkat Kelurahan;
5. Penilaian pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan oleh tim asistensi Musrenbang dari Kabupaten. Pemberian penghargaan dari kepala daerah diberikan kepada kelurahan dan kecamatan yang memiliki hasil penilaian/*scoring* terbaik sebagai motivasi untuk penyelenggaraan musrenbang sesuai ketentuan di Peraturan Bupati;
6. Bekerjasama dengan Lembaga non Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kabupaten, yaitu sharing pembiayaan penyelenggaraan dari Bank Jateng dan BUMD Aneka Usaha;
7. Pameran pembangunan dan produk unggulan, produk inovasi daerah dalam event Musrenbang Kabupaten Temanggung;
8. Proses Musrenbang dari tingkat kecamatan didokumentasikan dan didukung oleh media massa, TV Temanggung sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat.

5.3 Pendanaan Daerah

Uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan indikator kinerja daerah (IKD). Indikator Kinerja Daerah terdiri dari indikator tujuan sebagai indikator kinerja utama dan indikator sasaran.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 secara teknis dirumuskan dari indikator kinerja tujuan (sasaran strategis) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (*impact*), atau dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah juga dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator Kinerja Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada akhir tahun 2019.

Penyajian Indikator kinerja Daerah pada bab ini meliputi : indikator kinerja, satuan, realisasi kinerja Tahun 2017, prediksi kinerja Tahun 2018, dan penetapan target kinerja Tahun 2019. Selain itu juga ditambahkan rumus formulasi penghitungan realisasi kinerja dan penjelasan indikator kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab. Indikator kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,0	68,4	68,6	Indeks Harapan Hidup ditambah Indeks Pendidikan ditambah Indeks Standar Hidup Layak dikali sepertiga		Dinkominfo
2.	Angka Kemiskinan	%	11,42	11,35	11,23	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%		
3.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,02	5,03	5,05	PDRB tahun berjalan dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100%	Atas Dasar Harga Konstan	
4.	Laju Inflasi	%	3,12	4	4	menggunakan rumus Indeks Laspeyres yang sudah dimodifikasi (<i>Modified Laspeyres</i>)		
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,5	2,97	2,97	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%		
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	72,34	73	74	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas kkn, dan kualitas pelayanan publik	dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82	83	84	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat : nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah baik yang dilakukan oleh pihak ketiga dan survey mandiri		

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	MISI 1							
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,58	6,61	6,64	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal		Dindikpora
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,23	12,41	12,58	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	2014 : 6,18 ; 2015 : 6,52 ; dan 2016 : 6,55	
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	69,23	76,92	80,76	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%		
4.	Persentase prestasi olah raga	%	40	40	41	Jumlah prestasi cabang olah raga dibagi jumlah event kejuaraan yang diikuti dikali 100%	2014 : 11,69 ; 2015 : 11,89 ; dan 2016 : 12,06	
5.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	n.a	3%	3%	Jumlah pengunjung tahun n dikurangi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dikali 100%		Dinarpus
6.	Cakupan penerapan arsip secara baku	%	15	17	20	Jumlah perangkat daerah, unit kerja, kecamatan, kelurahan dan desa yang		
7.	Angka Harapan Hidup	tahun	75,41	75,43	75,45	dihitung dengan program MCPDA atau <i>Mortpack</i>		Dinkes
8.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	67,5	67,5	100	jumlah ibu yang meninggal karena hamil bersalin, dan nifas di suatu wilayahpada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100.000		

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
9.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	13,2	13,2	12	jumlah bayi (berumur kurang dari 1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 1.000		
10.	Prevalensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)	%	0,35	0,35	0,5	jumlah balita gizi buruk (0 sampai 60 bulan) yang ditemukan dibagi jumlah seluruh anak balita dikali 100%		
11.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	11,55	10,89	10,24	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	Asumsi penanganan 1.500 rmh/tahun	
12.	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	%	100	100	100	Prosentase penyandang cacat berat dan penyakit kronis yang mendapat jaminan sosial yang mendapat jaminan sosial	0,04 % per tahun, jumlah disabilitas = 5.278 jiwa	Dinsos
13.	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,86	0,85	0,84	Jumlah penduduk tahun n dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya dikali 100%		
14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	94,75	94,65	94,55	$IPG = 1/3 [(X_{eds}(1) + X_{eds}(2) + I_{inc-dis})]$		Dindalduk KBPPPA
15.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	82,26	82,31	82,36	indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik		
16.	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,040	0,038	0,037	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100%		

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	MISI 2							
17.	Skor Pola Pangan Harapan	-	85,8	86	86,5	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan		Dintan KP
18.	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	-	3.453	3.460	3.465	Jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan perkapita penduduk		
19.	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	-	115	95	95	Jumlah protein yang tersedia untuk konsumsi pangan perkapita penduduk		
20.	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	102,34	102,6	102,8	Indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayar petani dikali 100		
21.	Produktifitas Ternak Sapi	Kg/Ekor	169	169	169	Jumlah produksi daging sapi dibagi jumlah sapi yang dipotong		Dinakan
22.	Produktifitas Ternak Ayam Pedaging	Kg/Ekor	1,4	1,5	1,6	Jumlah produksi daging ayam pedaging dibagi jumlah		
23.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/org/th	19,73	20,00	20,34	Jumlah Konsumsi Ikan		
24.	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	26,83	26,83	26,83	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB		Dinperindag Kop dan UKM
25.	Persentase UKM Aktif	%	7,6	8	9,6	Jumlah UKM aktif dibagi Jumlah seluruh UKM dikali 100%		
26.	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,35	20,35	20,35	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB		
27.	Persentase Koperasi Aktif	%	87	90	93	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100%		
28.	Laju Investasi	%	11,87	10	15	Realisasi investasi tahun berjalan dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100%		DPMPSTP

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
29.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAT)	%	75,47	74,37	75	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)Dikali 100%		Dinaker
30.	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	12,72	15	17	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dikali 100%	Jumlah kunjungan yang terdata pada obyek wisata	Dinbudpar
31.	<i>Length of Stay</i> (lama tinggal wisatawan)	Hari	1	1	1	Jumlah LOS Hotel di Temanggung dibagi jumlah hotel	rata-rata LOS hotel di Temanggung	
32.	Persentase pelestarian cagar budaya	%	53,19	63,82	74,46	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah seluruh cagar budaya dikali 100% Jumlah 47 yang dilestarikan Th 2016 = 20, Th 2017 = 25, Th 2018 = 30, Th 2019 = 35	CB yang dilestarikan adalah CB yang diinventarisir atau didokumentasikan, dirawat atau dikaji dan ditetapkan sebagai CB dengan SK Bupati, Gub, Menteri	
33.	Indek Infrastruktur Wilayah	-	69	70	71	Akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah	Jalan, jembatan, sanitase, drainase, air bersih, RLH, Irigasi, Gedung, Taman kota	DPUPKP
34.	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi layak	%	80,06	80,50	81,00	Jumlah rumah tinggal bersanitasi layak dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%		
35.	Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	Jumlah fasilitasi pertanahan yang terselesaikan dibagi jumlah fasilitasi pertanahan dikali 100%		

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
36.	Persentase penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	-	n.a	10,98	11,00	Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun n dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya dikali 100%	2017 = 337 2018 = 300 2019 = 250	Dinhub
37.	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	-	70,08	71,5	72,5	Bobot Nilai dari 4 Indikator : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik		Dinkominfo
38.	Cakupan ketersediaan data indikator makro	%	100	100	100	Jumlah data indikator makro yang tersedia dibagi jumlah data indikator makro dikali 100%	PDRB, Inflasi, IPM, Angka kemiskinan, TPT	
39.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	56.57	64.22	64.82	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$		DLH
40.	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	6,52	6,52	8,15	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan rawan bencana dikali 100%		BPBD
	MISI 3							
41.	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan Daerah	%	100	100	100	Jumlah program dalam RKPD yang konsisten dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RKPD		BAPPEDA
42.	Persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%	80	85	90	Jumlah hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penelitian dan pengkajian dikali 100%		
43.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	17,3	19	90	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100%		BPPKAD

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
44.	Opini Pemeriksaan BPK	-	WTP	WTP	WTP	Penyajian sesuai SAP -Kepatuhan peraturan perundangan -Tingkat materialitas temuan -Sistem pengendalian internal	WTP = 4 WDP = 3 TW = 2 disclaimer = 1	
45.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	97	98	99	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jml kegiatan dikali 100%		ASS II
46.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-	CC	B	B	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	ASS III
47.	Nilai EKPPD	-	3,20	3,25	3,30	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja		ASS I
48.	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan dikali 100 %		Inspektorat
49.	Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda	%	100	100	50	Jumlah Perda yang disahkan dibagi jumlah Raperda yang dikirim ke DPRD dikalo 100%		Setwan
50.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	%	1,56	9,29	90	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional dibagi Jumlah ASN dikali 100 %		BKPSDM
51.	Rata-rata Indek Desa Membangun	-	0,62	0,62	0,63	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa		Dinpermades
52.	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	n.a	n.a	0,75	Jumlah desa yang berpredikat mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%		
53.	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	96,30	97,00	98,00	Jumlah kepemilikan KK dibagi jumlah Wajib KK dikali 100%		Dindukcapil

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	PREDIKSI TAHUN 2018	TARGET KINERJA 2019	RUMUS INDIKATOR KINERJA DAERAH	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
54.	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	94,01	98,00	98,50	Jumlah penduduk yang memiliki KTP el dibagi jumlah wajib KTP dikali 100%		
55.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	63,40	66,00	69,00	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%		
56.	Angka Kriminalitas	-	4,31	4,31	4,31	Jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	2018-2019 = pilkada & pemilu	Satpol PP
57.	Indek Rasa Aman	-	n.a	n.a	0,65	-		
58.	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kabupaten dikali 100%		
59.	Indek Gotong-royong	-	n.a	n.a	0,65	-	0,63-0,81 = kategori baik	Kesbangpol
60.	Indek Toleransi	-	n.a	n.a	0,65	-		

BAB VII PENUTUP

RKPD Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2019 yang disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung karena diluar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu : (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan pemerintah daerah tahun 2019; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2019; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung.

Pencapaian target kinerja program/ kegiatan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RKPD 2019 memuat : 32 sasaran, 118 program, 1007 kegiatan, 67 indikator kinerja daerah, 314 indikator kinerja program, dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp1.839.934.500.000 dan rencana belanja daerah sebesar Rp 1.058.526.181.112

Untuk itu, dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,


SUDARYANTO